



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TENTANG



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2008**

DAFTAR ISI

| | HAL |
|---|-------|
| BAB I : PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Pengantar | I-1 |
| 1.2. Pengertian | I-3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | I-3 |
| 1.4. Landasan | I-3 |
| 1.5. Tata Urut | I-4 |
| BAB II : KONDISI UMUM | II-1 |
| 2.1. Kondisi Saat Ini | II-1 |
| A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama | II-1 |
| B. Ekonomi | II-12 |
| C. Sarana dan Prasarana dan Aksesibilitas | II-20 |
| D. Politik dan Pemerintahan | II-35 |
| E. Hukum dan HAM | II-40 |
| F. Geomorfologi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | II-45 |
| 2.2. Tantangan | II-56 |
| A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama | II-56 |
| B. Ekonomi | II-62 |
| C. Sarana dan Prasarana | II-65 |
| D. Politik dan Pemerintahan | II-70 |
| E. Hukum dan HAM | II-72 |
| F. Geomorfologi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | II-73 |
| BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025 | III-1 |

| | | |
|---------------|--|-------------|
| BAB IV | : ARAH,TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NTT TAHUN 2005-2025 | IV-1 |
|---------------|--|-------------|

| | |
|-------------------------------------|------|
| 4.1.Arah Pembangunan Jangka Panjang | IV-1 |
| Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | |

| | |
|--|-------|
| 4.2. Tahapan dan Skala Prioritas Rencana | IV-26 |
| Pembangunan Jangka Panjang Daerah | |

| | | |
|--------------|------------------------|------------|
| BAB V | : P E N U T U P | V-1 |
|--------------|------------------------|------------|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENGANTAR

1. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Bangsa Indonesia telah berhasil mengisi kemerdekaannya melalui pembangunan selama kurun waktu lebih dari 60 tahun. Berbagai tantangan, hambatan, ancaman dan masalah yang multidimensi dalam berbagai skala telah dilalui Bangsa Indonesia dan telah berhasil memelihara dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan jatidirinya dalam gejolak perubahan global, nasional, regional dan lokal yang berlangsung secara terencana maupun selama ini. Salah satu indikator keberhasilan adalah bangsa Indonesia masih eksis dan utuh (meskipun provinsi Timor Timur melepaskan diri dari NKRI) dari Sabang hingga Merauke serta tetap berdinamika secara berkelanjutan dengan negara-negara lain di dunia.
2. Dalam batas-batas kemampuan dan keunikannya Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pernah bebas dari proses dinamika perubahan nasional baik yang disebabkan oleh interaksi dan dinamika internal maupun yang dikarenakan oleh interaksi dengan faktor eksternal. Meskipun demikian secara provincial, provinsi ini berdinamika secara kontekstual menurut kemampuannya.
3. Secara filosofis, “perubahan” itu mengandaikan adanya gerak dan dinamika terus menerus. Kaidah dari “perubahan” menyatakan bahwa tak ada yang tetap dalam perubahan kecuali perubahan itu sendiri, karena itu setiap sistem sebagai organisme untuk dapat tetap eksis dalam perubahan apabila memiliki mekanisme perubahan internal yang baik. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai satu “organisme”, selalu berdinamika dalam perubahan mengikuti kaidah dan realita perubahan sosial.

4. Sejak Provinsi NTT terbentuk 20 Desember 1958 hingga saat ini Pemerintah Daerah telah berhasil menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan melalui Pola Dasar Pembangunan, Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang memberi arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencapai cita-cita bangsa dan daerah yakni masyarakat adil dan makmur. Tahapan-tahapan pembangunan dalam kurun waktu tersebut meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi proses pembangunan "berkelanjutan" dan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat NTT sebagaimana terlihat dalam indikator ekonomi, sosial dan kemajuan bidang lainnya.
5. Bentuk tanggapan reaktif-proaktif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap tuntutan perubahan internal dan eksternal adalah merumuskan kembali dengan cara mengaktualkan dan merelevansikan pandangan filosofis jauh ke depan atau visi pembangunan yang bersubstansi cita-cita, ekspektasi (harapan) dan tujuan yang perlu dicapai sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Selain itu, perlu merancang kembali misi dan strategi pembangunan jangka panjang (yang tunduk di bawah) azas dengan referensi nasional yaitu Visi dan Misi RPJPN menurut amanat TAP MPR Nomor VII Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
6. Pemerintah perlu memperdayagunakan secara optimal semua potensi perubahan internal Nusa Tenggara Timur dan kontribusi kekuatan perubahan eksternal melalui interelasi, interaksi – networking - wilayah dalam skala nasional dan global, sehingga terciptanya ruang perubahan yang berdampak positif demi mencapai jbaran-jbaran visi dan misi dalam target program pembangunan skala menengah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah – RPJMD 5 tahun dan pembangunan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah - RKPD. Untuk itu perlu disusun Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, (RPJPD) 20 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

7. Pemerintah, masyarakat dan seluruh *stakeholder* pembangunan di Nusa Tenggara Timur berkesadaran dan berpengharapan bahwa RPJPD Provinsi NTT 2005 – 2025 merupakan pedoman dan semangat pelaksanaan tugas kemanusiaan melalui perencanaan pembangunan untuk menghasilkan suatu perubahan progresif bermakna yang tidak bersifat regresif (cendrung kembali ke titik awal) dan mundur dan tidak kontra pembaharuan.

1.2. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan substansi jabaran tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan RPJP Nasional. Jabaran dimaksud mencakup visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan dalam rentang 2005-2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 2005-2025 ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional di daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan arahan dan acuan tersebut diharapkan proses pembangunan daerah berlangsung secara sinergis, terpadu dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

1.4. LANDASAN

Landasan idiil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah NTT adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD

1945. Seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan pembangunan nasional dan daerah Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai Landasan operasional RPJPD yaitu :

1. TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi NTT 2004-2008
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi NTT 2004 – 2008
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2006 - 2020
12. Wawasan Nusantara
13. Ketahanan Nasional
14. Millenium Delopement Goals (MDGs)

1.5. TATA URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 bertata urut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Kondisi Umum

- Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025
- Bab IV Arah, Prioritas dan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025
- Bab V Penutup

BAB II

KONDISI UMUM

Pembangunan di Nusa Tenggara Timur yang telah dilaksanakan sampai saat ini bersifat multi-bidang mencakup bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur negara, pengembangan wilayah dan tata ruang, sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan dimaksud telah menghasilkan berbagai kemajuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Selain keberhasilan pelaksanaan pembangunan di masa lampau, masih saja terdapat berbagai hambatan, tantangan dan masalah berkelanjutan yang tetap menjadi beban pembangunan daerah masa kini. Bahwa tiada pelaksanaan pembangunan yang steril terhadap kegagalan dan tidak ada strategi pembangunan yang tidak beresiko, karena resiko dan kegagalan menjadi bagian integral dari satu strategi pembangunan.

Berdasarkan keadaan dan kebutuhan masyarakat, maka pembangunan daerah tidak mungkin ditunda, dihentikan, apalagi ditiadakan. Amanat ini mengharuskan Pemerintah Daerah untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 -2025.

II.1 KONDISI SAAT INI

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Kualitas kehidupan dan penghidupan manusia merupakan penjabaran dari perubahan nilai kemanusiaan yang diartikan sebagai kesejahteraan umum dan kemakmuran secara teoritis dan faktual antara lain diterangkan oleh keberhasilan pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama. Kehidupan agama pada masyarakat NTT masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada menghayati substansi nilai-nilai ajaran agama secara benar dan baik namun sebagian masyarakat telah menghayati ajaran agamanya dan nilai kemanusiaan untuk menciptakan dan membangun kerukunan dan kedamaian intern dan antarumat beragama. Prinsip pembangunan manusia seumur

hidup (*Life long human development*) dan belajar sepanjang hayat (*Life long education*) adalah prinsip pembangunan bidang ini yang diwujudkan melalui aspek demografi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

2. Aspek demografi

2.1 Jumlah penduduk NTT pada tahun 2005 sebanyak 4.260.294 jiwa dengan rincian laki-laki 2.122.045 jiwa (49,8%) dan perempuan 2.138.249 jiwa (50,2%) merupakan modal pembangunan daerah dan nasional, akan tetapi apabila penduduk sebagai sumberdaya manusia berkualitas rendah maka penduduk lebih diposisikan sebagai beban pembangunan karena perannya lebih sebagai konsumen, dan bukan produsen pembangunan. Permasalahan demografis nasional dan daerah dipengaruhi oleh sinergi faktor kekuatan perubahan dan resistensi internal daerah, nasional dan faktor perubahan demografi global.

2.2. Secara internal, tingkat morbiditas (penderitaan) yang masih tinggi di NTT berdasarkan pola penyakit penderita rawat jalan Puskesmas dan Rumah Sakit sesuai urutan 10 besar tahun 2005 adalah:

- ISPA : 685.478 kasus
- Malaria : 295.704 kasus
- Penyakit kulit dan jaringan sub Kutan : 166.895 kasus
- Penyakit pada sistem otot dan jaringan : 157.965 kasus
- Penyakit infeksi pada usus : 104.488 kasus
- Penyakit infeksi Parasit : 48.435 kasus
- Penyakit rongga mulur : 31.877 kasus
- Penyakit pada telinga : 24.944 kasus

- Penyakit kelainan kasus : 6.135
- Sebab kelainan kebidanan kasus : 6.078

- 2.3. Fenomena morbiditas (penderitaan) dan mortalitas (kematian) tersebut menjelaskan tingkat kesuburan baik Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) 2005 terutama pada rentang usia ibu 20 - 24 sampai 35 - 39 (619 = 88,68%) dan Angka Kelahiran Total (TFR) 2005 (3,49) dan Angka Kelahiran Kasar (CBR) 2005 (28,88). Fenomena demografis ini, tidak termasuk migrasi, telah berkontribusi Pertumbuhan Penduduk 2000 - 2004 (2,10%) atau > 0,51% dari pertumbuhan penduduk 1999 - 2000 (1,59). Apabila tidak dikendalikan pertumbuhan penduduk di wilayah ini melalui strategi yang tepat maka pertumbuhan linear berdasarkan data 2005 akan menghasilkan penduduk NTT 2020 sebesar 7.020.375 jiwa.
- 2.4. Kecenderungan global di bidang demografi dengan faktor migrasi internasional yang membawa serta IPTEKS modern ke semua ruang telah melanda daerah ini dan berdampak secara signifikan terhadap reaktualisasi pandangan hidup yang memungkinkan berlangsungnya transformasi budaya dan fungsional. Transformasi fungsional memungkinkan sesuatu yang semula dianggap tidak mungkin, terutama dalam penciptaan pekerjaan dan jabatan baru termasuk efisiensi yang terus-menerus meningkat.
- 2.5. Kecenderungan demografis tersebut di atas berdampak pada perumusan kembali arti 'ruang hidup' yang semula seluas ruang domisili, diperluas menjadi ruang ekonomi karena dampak teknologi jaringan melalui internet (cyber) yang membentuk ruang nafkah baru di dunia maya.
- 2.6. Migrasi geografis penduduk akan berdampak pada perubahan sistem mata pencaharian, perubahan fungsi ruang-lahan dan membidani ancaman sektor pembangunan lain seperti pertanian, padahal justru

sektor pertanian berkontribusi dominan dalam struktur perekonomian daerah. Memang strategi pembangunan daerah sedang berupaya untuk mengembangkan pembangunan industri untuk mengganti posisi sektor ekonomi dalam pembentukan struktur perekonomian daerah, namun perlu direncanakan secara terpadu untuk mengintegrasikan semua permasalahan dalam kerangka menghasilkan nilai tambah ekonomis bagi perubahan.

- 2.7. Migrasi rata-rata seumur hidup 1980 - 2000 bersifat minus dengan kecenderungan meningkat yaitu 1980 (-0,46%) menjadi 2000 (-1,69 %) dengan total kenaikan (-1.23%) dan rata-rata 0,061/tahun. Rata-rata migrasi baru-baru ini pada rentang tersebut juga menunjukkan peningkatan total 1,49% dengan rata-rata 0,074%. Dengan demikian pertumbuhan penduduk lebih ditentukan oleh tingkat kelahiran.

3. Sumberdaya Manusia

- 3.1. Sumberdaya manusia memiliki potensi (*Human Resources Capital*) yang merupakan faktor terdepan dan utama dalam pembangunan daerah. Modal sumberdaya manusia antara lain dalam bentuk kualitas perilaku baik pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesionalisme dan kompetensi melalui pendidikan dan juga kualitas kesehatan pribadi menjadi modal sumberdaya manusia. Modal sumberdaya manusia mengandung energi yang dapat disinergikan dengan modal sosial, ekonomi dan lingkungan akan menghasilkan pembangunan yang lebih bermakna.
- 3.2. Kualitas sumberdaya manusia Nusa Tenggara Timur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (*Human development Index*) tahun 2002 sebesar 60,3 dan 2005 sebesar 63,6, dengan rata-rata pertumbuhan 1,1/tahun. Berdasarkan peringkat nasional, Indeks Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Timur berada pada peringkat 31 dari 33 provinsi di Indonesia sehingga Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) NTT tergolong rendah namun ada kecenderungan IPM meningkat.

- 3.3. IPM NTT harus ditingkatkan secara terus-menerus terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, politik dan ekonomi serta sektor-sektor lainnya. Peningkatan IPM dari sisi pendidikan ditentukan oleh 2 faktor utama yaitu rerata lama pendidikan dan angka melek huruf. Apabila IPM NTT ingin ditingkatkan maka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan percepatan pemerantasan buta aksara fungsional harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan.
- 3.4. Usia Harapan Hidup penduduk Nusa Tenggara Timur tahun 2005 hanya 64,9 tahun dapat dijelaskan bahwa usia harapan hidup Laki-laki 62,9 tahun sedangkan perempuan 67,2 tahun. Kurva pertumbuhan IPM dan harapan hidup masih bersifat flat dan apabila strategi dan perlakuan – artifisial - pembangunan kurang tepat maka IPM NTT akan tetap rendah. Untuk itu, perlu ditingkatkan dan dipercepat pertumbuhan kedua faktor tersebut.

4. Pendidikan

- 4.1. Faktor dominan yang memperburuk kualitas pendidikan di NTT adalah kemiskinan yang berkarakter majemuk mencakup ekonomi, struktural, situasional/alamiah, sosial – politik dan subyektif. Kondisi yang memprihatikan ini sangat mengganggu rendahnya mutu SDM NTT yang pada gilirannya menyebabkan pula rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT Untuk mengatasi persoalan ini maka tepat kebijakan pembangunan memberikan ruang kepada semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif sesuai perannya.
- 4.2. Berdasarkan komposisi demografis Nusa Tenggara Timur, titik berat penduduk berada pada usia muda dan sebagian di antaranya merupakan penduduk usia

sekolah. Pada tahun 2003 penduduk usia 15 - 44 tahun yang berstatus buta aksara masih tinggi yaitu 411.083 jiwa (lak-laki 269.807 jiwa dan perempuan 241.276 jiwa). Data ini menempatkan provinsi NTT dalam kelompok 9 provinsi berpenduduk buta aksara tertinggi di Indonesia. Kecenderungan menunjukkan pertumbuhan penduduk yang masih tinggi ke depan akan tetap menghasilkan komposisi demografis seperti sekarang.

- 4.3. Sampai dengan saat ini angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar khususnya SMP/MTs dan sederajat masih rendah. APK SD/MI telah menjadi 114% sementara APK SMP/MTs dan yang sederajat pada tahun 2005 baru mencapai 70%. APK SMA/SMK/MA dan yang sederajat masih lebih rendah lagi yaitu baru mencapai 40% sementara APK SMP/MTs dan sederajat telah mencapai 82% dan SMA/SMK/MA mencapai 46%. Data ini menunjukkan bahwa pencapaian APK di NTT khususnya dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun masih berada di bawah rerata nasional. Demikian pula hal pada tingkat SLTA dan yang sederajat.
- 4.4. Pada tahun 2005, Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar juga masih rendah dibandingkan dengan rerata nasional SD/MI dan sederajat = 90,47%, APM SMP/MTs dan sederajat 71,41%, APM SMA/SMK/MA dan sederajat 42,10%; sedangkan APM secara nasional pada tahun yang sama 2005 menunjukkan APM SD/MI dan sederajat 94%, SMP/MTS dan sederajat 72% dan APM SMA/SMK/MA dan sederajat 41%
- 4.5. Data nasional menunjukkan rasio *Research and Development* (R&D)/juta penduduk hanya sebesar 1 (1985/1995) dan jumlah paten yang dihasilkan hanya 20 paten (1996), tanpa jumlah ekspor teknologi tinggi/manufaktur (1997). Indonesia ber Nilai Daya Saing Bangsa 13,3 dari nilai maksimum 100 atau

berperingkat 28 dan ber Nilai Kontribusi IPTEKS dan SDM terhadap dunia usaha sebesar 9,6 atau berperingkat 30 dari 30 negara. Daya saing penduduk Nusa Tenggara Timur berdasarkan indikator tersebut diasumsi lebih rendah dari daya saing penduduk secara nasional.

- 4.6. Mutu lulusan SMA/SMK NTT bidang IPA dan IPS berdasarkan indikator skor UMPTN/SPMB selama rentang 1994 - 2005 sangat rendah secara nasional dan berposisi pada kuartil terbawah peringkat nilai nasional menurut provinsi. Posisi mutu lulusan tersebut menjadi salah satu indikator rendahnya daya saing nasional lulusan SMA dan SMK wilayah ini. Dampaknya adalah lulusan di wilayah ini hanya berkemampuan bersaing di wilayah mutu perifer (pinggiran) dan sangat sedikit lulusan bermutu yang bereksodus (berpindah) ke sentrum persaingan nasional dan regional.
- 4.7. Kecenderungan global bidang perdagangan dan demografi mendatang akan menghadirkan jasa dan manajemen pendidikan bermutu luar negeri di Nusa Tenggara Timur. Persaingan komoditi bermutu di pasar global tidak terhindarkan, karena itu mutu manajemen pendidikan dan keluaran pendidikan NTT yang kini hanya diserap oleh kebutuhan pasar lokal perlu dibenahi untuk masuk ke pasar global.
- 4.8. Kualitas mutu lulusan/tamatan pendidikan pada semua aras terutama pendidikan tinggi mengalami krisis kualitas. Krisis ini disebabkan oleh menjamurnya penjualan gelar dan penyelenggaraan pendidikan dalam ragam pendidikan jarak jauh, kelas parallel, kelas akhir minggu, kelas eksekutif dan lainnya, yang tidak memenuhi kaidah dan norma akademik.
- 4.9. Kualitas SDM tahun 2005 berdasarkan status pendidikan masih rendah, yang ditandai oleh populasi penduduk berstatus pendidikan tidak/belum pernah bersekolah cukup besar 352.936 jiwa (11,17%) dan yang tidak/belum tamat SD/MI 1.002.828 jiwa

(31,82%) atau sebanyak 42,99% penduduk yang tidak/belum bersekolah atau belum tamat SD/MI. Besaran relatif kumulatif penduduk berstatus pendidikan setinggi/lebih rendah tamat SD/MI adalah 76,32%, SMTP 87,17% dan setinggi/lebih rendah tamat SMTA adalah 97,48%.

- 4.10. Terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antara kelompok masyarakat seperti penduduk perkotaan dan pedesaan, dan antara daerah, fasilitas pelayanan dan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata.
- 4.11. Kualitas pendidikan masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetisi peserta didik.
- 4.12. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih mengalami kendala dalam menyadarkan orangtua dan menyiapkan kelompok PAUD secara merata. Kecenderungan orangtua dan masyarakat menganggap PAUD tidak terlalu penting dalam proses tumbuh kembang anak.
- 4.13. Pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mengalami hambatan karena terbatasnya buku-buku teks dan jurnal-jurnal internasional yang dapat diakses namun kesadaran masyarakat untuk menyediakan fasilitas pendidikan terus meningkat.

5. Aspek Kesehatan

- 5.1. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2004 Angka morbiditas (penderitaan) Nusa Tenggara Timur tinggi yang berdampak pada tingginya angka mortalitas (kematian) = 5,63/1000 penduduk (2004). Pada tahun 2005 Angka Kematian Bayi = 49/1000 kelahiran hidup dan secara nasional AKB 52/1.000 kelahiran hidup; Angka Kematian Ibu 554/100.000 kelahiran hidup dan secara nasional AKI 334/100.000 kelahiran hidup; demikian juga Angka Kematian Balita 82/1000 BLT dan secara nasional 81/1000 BLT masih tergolong tinggi. Angka

balita tahun 2005 berstatus gizi sedang/kurang/ buruk : 41,54% dan baik 58,45%. Gizi Balita cenderung meningkat pada tahun 2006 dapat dikategorikan gizi lebih 0,7%; gizi baik 60,3%; gizi kurang 27% dan gizi buruk 12%. Dan pada tingkat nasional gizi lebih 2,5%; gizi baik 69,5%; gizi kurang 19,2% dan gizi buruk 8,8%.

- 5.2 Data SKRT menunjukkan jenis penyakit yang paling menerangkan angka morbiditas yaitu ISPA dan diare secara tidak langsung berkaitan dengan peran ibu dan kualitas kesehatan lingkungan yang masih buruk.
- 5.3. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Kondisi lingkungan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat yang tercermin antara lain. dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar.
- 5.4. Sarana pelayanan kesehatan masih terbatas sehingga layanan kepada masyarakat miskin belum optimal namun upaya pengadaan sarana terus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat; dimana pada tahun 2005 jumlah Rumah Sakit Umum Daerah 14 buah, Rumah Sakit Khusus 1 buah, Rumah Sakit ABRI 2 buah, Rumah Sakit Swasta 8 buah; jumlah Puskesmas 244 buah dan Puskesmas Pembantu 919 buah, Balai Pengobatan 46 buah dan Posyandu 8030 buah. Jumlah Puskesmas terbanyak terdapat di Kabupaten Manggarai 22 buah dan paling sedikit jumlahnya Kabupaten Rote Ndao 6 buah. Sedangkan Pustu terbanyak terdapat di Kabupaten Kupang 114 buah dan paling sedikit di Kabupaten Manggarai Barat 15 buah. Demikian pula tenaga kesehatan masih kurang jumlahnya menyebabkan pertolongan persalinan bagi ibu melahirkan terbatas, layanan kesehatan terganggu dan penyakit kronis lainnya tak dapat disembuhkan karena tenaga dokter ahli sangat kurang sebagaimana terlihat bahwa dokter 629 orang, perawat 3.263 orang, bidan 2.077 orang, para medis non perawat 806 orang dan paramedis lainnya 438 orang. Diharapkan setiap kabupaten/kota memiliki rumah sakit dan tenaga dokter

ahli agar pelayanan bagi masyarakat secara cepat dan tepat waktu.

- 5.5. Adanya kecenderungan meningkatnya penyebaran penyakit HIV/AIDS selama 5 tahun terakhir: 231 kasus, yang meninggal dunia 73 orang (31,28%), HIV sebanyak 126 kasus (51,6%) dan AIDS sebanyak 105 kasus (45,4%); dan HIV/AIDS di Kota Kupang terdapat 85 kasus dan Kabupaten Belu terdapat 48 kasus yang perlu ditangani secara bersama oleh semua komponen masyarakat.

6. Sumberdaya Perempuan dan Anak

- 6.1. Hasil analisis situasi perempuan Nusa Tenggara Timur menunjukkan mitos status subordinasi perempuan berbanding terbalik dengan fakta status dan peran perempuan di segala bidang. Penduduk perempuan masih terpinggirkan oleh status subordinasi laki-laki. Pembangunan bias gender dimana kepentingan perempuan belum diakomodir bahkan golongan ini belum diakui sebagai pekerja sektor kerumahtanggaan sekalipun curahan waktu dan tenaga kerjanya melampaui laki-laki. Mereka hanya distatuskan sebagai penerima pendapatan suami yang berasal dari sektor nafkah, hanya karena nilai kerja perempuan non karier tidak bernilai ekonomi.
- 6.2. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan. Permasalahan utama pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik.
- 6.3. Tingginya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu pelanggaran HAM. Data yang akurat belum tersedia karena banyak kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan alasan bahwa masalah tersebut adalah masalah domestik keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain.
- 6.4. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Upaya pemerintah yang telah dilakukan selama ini sepenuhnya

mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Kebutuhan tumbuh kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi perhatian semua pemangku kepentingan dalam pembangunan.

- 6.5. Regulasi dan penegakan hukum yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan yang tidak peduli anak.
- 6.6. Relasi gender timpang karena konstruksi sosial yang dibangun dengan berdasarkan nilai patriakata sehingga menjadi belief system yang sulit dirubah.

7. Pembangunan Budaya

- 7.1. Kecenderungan global di bidang telekomunikasi dan informasi telah menghasilkan tekanan arus Gelombang III dan telah berdampak secara luas terhadap proses akulturasi, enkulturasi, asimilasi dan asosiasi antar nilai dan norma budaya di Nusa Tenggara Timur. Anggota masyarakat sebagai aktor budaya terdorong memiliki identitas “budaya global” dan mengalami pengurangan bahkan penghapusan budaya lokal dan berdampak pada krisis nasionalisme dan jatidiri bangsa, sehingga pelaku budaya terasingkan dalam ruang budayanya (*culture sphere*).
- 7.2. Benturan antar etnis/sub etnis berlangsung dalam wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemajemukan sebagai kekuatan perubahan progresif secara keliru telah dipersepsi dan diperdayakan (*empowering*) sebagai alat kekuasaan dan pemupuk fanatisme kelompok. Benturan dan pengkotakan antar kelompok sangat mencoraki masyarakat majemuk Nusa Tenggara Timur.
- 7.3. Nilai dan norma kultural (*culture system*) yang semula digunakan sebagai rujukan interaksi sosial yang terinstitusionalisasi dan terkarakterisasi dalam pranata sosial lokal mengalami degradasi (penurunan). Keluarga inti tradisional berubah menjadi keluarga inti modern, nilai cinta kasih perkawinan tergusur oleh nilai kontrak, fungsi perlindungan dan rasa kedekatan keluarga diganti oleh peran lembaga formal luar keluarga, kearifan lokal

pendistribusi kesejahteraan masyarakat miskin pedesaan diambil alih oleh hukum ekonomi dan teknologi robotik.

- 7.4. Setiap sistem sosial tidak bebas dari benturan. Benturan merupakan bagian integral dari keberadaan semua sistem sosial. Benturan tidak dihindari tetapi harus dikelola melalui manajemen keseimbangan agar memberikan motivasi persaingan yang sehat untuk berkembang. Intensitas konflik dan pemisahan berlatar suku, agama dan golongan berlangsung dalam wilayah ini. Komunalisme (paham kebersamaan hidup), daya empati sosial, solidaritas mekanistik, toleransi sosial bertentangan terbuka dengan individualisme dan kepentingan kelompok.

B. Ekonomi

1. Ada korelasi yang positif antara rendahnya pendapatan masyarakat NTT dengan tingkat pendidikan rendah dan sebaliknya pendapatan masyarakat tinggi ternyata tingkat pendidikan penduduk tinggi yang berdampak pada penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan.
2. Dinamika perekonomian di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilepaskan dari dinamika perekonomian Indonesia dan perekonomian dunia di mana transaksi-transaksi ekonomi telah menjadi tanpa batas. Falsafah Indonesia yang bebas aktif dalam pergaulan dunia, serta pergeseran tata pemerintahan Indonesia kepada kondisi yang lebih demokratis telah memungkinkan Indonesia menjadi negara yang makin terbuka dalam melakukan transaksi ekonomi.
3. Penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun terus bertambah seiring dengan tuntutan ekonomi, Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin 1.152,100 jiwa atau 27,86% dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 1.546,200 jiwa atau 35,50%.

Untuk mengatasi persoalan ini, kebijakan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat.

4. Sepanjang tahun 1994 sampai 2005, telah terjadi berbagai kejadian penting di berbagai belahan dunia yang telah dan berpotensi mempengaruhi kinerja perekonomian Nusa Tenggara Timur di antaranya adalah:
 - a. Tahun 1992 - 2006: Perang Teluk, Perang Afghanistan dan Perang Irak secara khusus telah menimbulkan krisis minyak dunia yang ditandai oleh variasi harga minyak yang tinggi. Bagi Indonesia, hal ini berdampak buruk karena pada dasawarsa terakhir Indonesia telah menjadi pengimpor netto minyak bumi. Dampaknya bagi Nusa Tenggara Timur berjalan satu garis lurus dengan dampak terhadap Indonesia, karena NTT merupakan konsumen murni minyak bumi.
 - b. Tahun 1997 - 1999: terjadi krisis moneter hebat Indonesia yang disertai oleh pergantian rejim pemerintahan. Nusa Tenggara Timur bereaksi dengan mengalami pertumbuhan ekonomi yang terus berada di bawah tingkat inflasi, dan sampai tahun 2005 belum mengalami reversal pertumbuhan ekonomi seperti sebelum tahun 1997.
 - c. Tahun 1999: Timor Timur dinyatakan sebagai negara independen Timor Leste di bawah referendum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagi Nusa Tenggara Timur, masalah dan peluang datang bersamaan dengan berdirinya Timor Leste; bagaimana mengambil manfaat dari kesempatan perdagangan dengan Timor Leste disamping harus menyelesaikan permasalahan pengungsi Timor Timur.
 - d. Tahun 1999–2002: Kebijakan Otonomi Daerah yang mendelegasikan (melimpahkan) kewenangan pusat kepada provinsi, salah satunya dalam penggunaan anggaran pembangunan.
 - e. Tahun 2005: disepakatinya Tujuan Pembangunan Milenium 2015 secara universal untuk mereduksi setengah porsi kemiskinan \$1/hari pada periode 1990 - 2015.

- f. Tahun 2005–2006: Revitalisasi Pertanian merupakan salah satu program utama Pemerintah Republik Indonesia
 - g. Tahun 2000–2006: Meningkatkan produktifitas usahatani pangan dan hortikultural di Amerika Serikat, Thailand dan Vietnam secara khusus telah mengakibatkan ekspansi (perluasan wilayah) perdagangan beras, buah, daging ayam dan hasil olahan pangan ke Indonesia, tidak terkecuali kepada konsumen di Nusa Tenggara Timur.
5. Selama kurun waktu 1993 – 2004, pertumbuhan ekonomi riil NTT mencapai rata - rata 5.39% per tahun (1993 : 9.54%pa, 2004 : 5.58%pa). Walau demikian, sejak tahun 1997, pertumbuhan ekonomi riil tersebut kalah pacu dengan inflasi. Kejutan inflasi yang terjadi pada tahun 1997 - 1999 yang belum diredam oleh lonjakan pertumbuhan ekonomi secara dinamis mengindikasikan rendahnya daya beli masyarakat pada tahun 2000 - 2004 dibandingkan dengan tahun 1993 - 1996.
 6. Dalam dua tahun terakhir (2004 dan 2005), suku bunga riil menjadi negatif seperti kondisi Tahun 1998, sehingga menghambat ekspansi perekonomian. Kondisi NTT yang terpencar menyulitkan formulasi biaya transportasi murah. Walau demikian, tetap diperlukan upaya menurunkan inflasi dari dua angka menjadi satu angka dengan suku bunga riil positif sehingga perekonomian dapat ekspansif.
 7. Kesejahteraan penduduk yang diindikasikan oleh pendapatan per kapita penduduk NTT atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan dari Rp 767.326 pada tahun 1995 menjadi Rp. 3,244.796 pada tahun 2005 sedangkan pendapatan perkapita penduduk secara nasional tahun 2005 sebesar Rp. 11.193.856. Distribusi pendapatan terjadi dengan ketidakmerataan yang moderat di mana sepanjang kurun waktu 1990 - 2004, 40% penduduk berpendapatan terendah (40% low) hanya merebut 24.07% PDRB, sedangkan 20% penduduk berpendapatan tinggi (20% high) merebut 37.65% PDRB. Dengan distribusi demikian, diperkirakan terdapat 27.86% penduduk miskin di

Nusa Tenggara Timur (tahun 2004), yakni mereka yang pengeluaran per bulannya kurang dari Rp 143.455/bulan di perkotaan, dan kurang dari Rp 108.725 di pedesaan.

8. Pola distribusi pendapatan tersebut dipicu oleh perbedaan upah antar klasifikasi tenaga kerja dan perbedaan pendapatan rumah tangga per lokasi (rural/urban) per kepemilikan usaha. Proporsi terbesar pekerja NTT berada pada klasifikasi (1) Pertanian bukan penerima upah dan gaji, dan (2) Pertanian penerima upah dan gaji. Menurut hasil pengumpulan BPS, kedua klasifikasi tenaga kerja tersebut berada pada 3 kelompok penerima upah terbawah.
9. Berdasarkan jenis rumahtangganya, rumahtangga buruh tani, rumahtangga petani berkepemilikan lahan <0.5 ha, dan rumahtangga petani berkepemilikan lahan 0.5 - 1 ha merupakan tiga dari empat jenis rumah tangga berpenghasilan terbawah. Jadi, selain kebijakan pendidikan, iptek dan kapitalisasi, juga perlu diperkenalkan kebijakan yang memungkinkan kepemilikan lahan di atas 1 hektar per rumah tangga. Kebijakan ini terutama penting dalam pembangunan di daerah Sumba di mana budaya penghambaan melemahkan kemerdekaan kepemilikan aset.
10. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur dalam 4 tahun terakhir (2002 - 2005) adalah 5.09% per tahun, dengan kecenderungan meningkat selama tahun 2004 dan 2005. Menurut hasil pengumpulan data BPS, rata-rata elastisitas kesempatan kerja di Nusa Tenggara Timur tahun 2003-2005 adalah 0,292% artinya setiap peningkatan 1% Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 0.292%. Pada level nasional, elastisitas kesempatan kerja adalah 0.22 dengan sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar negatif 0.01, sektor industri negatif 0.24 dan sektor jasa-jasa positif 0.54.
11. Berdasarkan PDRB, perekonomian Nusa Tenggara Timur didominasi oleh subsektor pertanian (42.16%), kemudian oleh subsektor jasa-jasa (18.97%), dan kemudian oleh subsektor perdagangan (15.22%). Pemerintah mencanangkan pengurangan sebagian dominasi subsektor

pertanian ke sektor industri. Walau demikian, dinamika pembangunan belum memperlihatkan pergeseran arah perubahan mendasar ke arah tersebut.

12. Usaha tani tanaman pangan dan hortikultura didominasi oleh kebijakan hijau atau perberasan yang berlaku secara nasional. Kondisi semi-arid (semi-gersang/kering) Nusa Tenggara Timur seharusnya tidak mengadopsi kebijakan swasembada beras nasional kecuali untuk wilayah dengan irigasi teknis/semiteknis yang memadai. Menurut catatan BPS, Provinsi NTT merupakan salah satu sasaran beras impor dari Vietnam, maupun beras antar pulau dari Jawa dan Sulawesi.
13. Pada subsektor kehutanan, tanaman lontar (*Borassus sundaicus*) sangat berpotensi dikembangkan bagi produksi gula semut, gula lempeng dan gula air. Pada kurun waktu 1994 - 2005, belum ada inisiatif dan kebijakan ekspansif yang menghadirkan perkebunan lontar di Nusa Tenggara Timur, padahal lontar merupakan salah satu tanaman lahan kering yang adaptif di pulau-pulau besar di Nusa Tenggara Timur.
14. Pada subsektor kehutanan, menurut catatan sejarah, Pulau Sumba dan Pulau Timor merupakan dua dari sedikit daerah penghasil kayu cendana (*Santalum album*) di dunia, dan perdagangan kayu cendana di Sumba dan Timor telah berlangsung jauh sebelum jaman penjajahan Belanda. Walau demikian, sejak tahun 1986, pemerintah menetapkan kebijakan kuota dan harga yang tidak baik (favorable) bagi sisi penyedia cendana sehingga upaya pengembangan percendanaan di Nusa Tenggara Timur menurun drastis. Sekalipun kebijakan pembatasan kuota produksi dan pengaturan harga tersebut dicabut pada tahun 2001, belum terjadi peningkatan produksi cendana di Sumba dan Timor yang mencerminkan NTT sebagai Nusa Cendana. Walaupun demikian, inisiatif Pemda dengan mengintrodusir hutan cendana melalui Gerhan di Kabupaten Alor sudah mulai mengindikasikan keberhasilan.
15. Selain kayu cendana, Nusa Tenggara Timur merupakan penyuplai /penghasil 80 - 90% asam nasional, di mana

tanaman asam Jawa (*Tamarindus indica*) tersebut bertumbuhkembang di Timor dan Alor. Dengan demikian kebijakan terkait pemeliharaan hutan asam perlu dipertahankan, dan pengembangan industri terkait perlu diupayakan.

16. Pada sub sektor peternakan, Nusa Tenggara Timur juga dikenal kaya akan rusa, salah satu plasmanutlah yang dilindungi oleh pemerintah dalam eksploitasi/pengembangan peternakan. Rusa (dulunya) banyak terdapat di Alor, Sumba dan Timor, dan sudah diwacanakan (terutama di Alor) untuk menjadi komoditas ekonomi yang unik, baik diperdagangkan hidup maupun dalam bentuk olahan setelah disembelih. Ternak lain yang berpotensi karena langka adalah kuda Sumba, kerbau, sapi Timor dan sapi ongole. Akan tetapi sepanjang tahun 1994 - 2005, baru ternak sapi yang tersentuh oleh kebijakan ekspansif pemerintah maupun kebijakan pengembangan IPTEKS pada institusi riset, padahal kuda Sumba, kerbau dan rusa juga berpotensi menjadi sumber protein hewani yang handal dalam menunjang peningkatan perdagangan antarpulau.
17. Pada subsektor perikanan, kondisi geografis Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan belum terefleksi dalam porsi pendanaan maupun dalam kontribusi subsektor perikanan dalam pembentukan PDRB. Hampir sebagian besar nelayan di NTT yang menggunakan peralatan tangkap dan teknologi kelautan yang relatif baik berasal dari luar NTT, sementara sebagiannya lagi masih menggeluti bidang kerja diluar kenelayan seperti perdagangan kecil dan pertanian. Berkenaan dengan semua itu diperlukan transformasi kultural dari kultur agraris menuju kultur bahari agar dapat meningkatkan pendapatan mereka yang berkecimpung di subsektor perikanan. Disamping itu budidaya subsektor perikanan darat/tambak juga masih memerlukan pembelajaran dan peningkatan kualitas dan kuantitasnya.
18. Pada sektor pertambangan, terdapat komoditas berkelangkaan tinggi seperti marmer (di Timor) emas di Alor, Lembata dan Timor, Bauksit di Timor dan panas bumi

(di daerah vulkanik Flores). Namun demikian, sampai tahun 2005 perkembangan pertambangan tersebut belum memasuki tahapan akselerasi pertumbuhan.

19. Nusa Tenggara Timur memiliki pulau-pulau kecil yang berpotensi menjadi pulau tetirahan eksklusif sehingga berpotensi memperkuat sektor pariwisata. Pada saat ini telah terdapat setidaknya 4 (empat) pulau kecil di NTT yang menjadi tempat tetirahan, diantaranya Pulau Mangkudu dan Pulau Bidadari, pulau Batek, pulau Ndana Sabu dan Ndana Rote. Selain pulau-pulau kecil, pulau-pulau besar (Flores, Sumba, Timor dan Alor) memiliki bauran budaya dan alam yang eksotik. Namun demikian, maraknya pariwisata perlu ditopang oleh kewaspadaan terhadap perdagangan internasional narkoba dan juga infiltrasi ideologi) yang mungkin menyusup melalui aktivitas pariwisata di perbatasan Indonesia.
20. Jika kinerja sisi penawaran dari sektor primer dan sektor sekunder membaik maka arus perdagangan yang telah marak berlangsung akan makin dinamis dengan bersaingnya produk asal Nusa Tenggara Timur pada pasar lokal, nasional maupun internasional. Dengan demikian peluang melakukan reversal terhadap defisit neraca perdagangan selama 1994 - 2005 akan sangat besar.
21. Pembiayaan pembangunan Nusa Tenggara Timur meningkat seiring bergulirnya otonomi daerah yang makin luas di Indonesia. Peningkatan dana pembangunan pada Pemda Kabupaten/ Kota bukan karena perubahan signifikan Pendapatan Asli Daerah, melainkan karena kebijakan pemerintah pusat semata-mata dalam menyediakan dana pembangunan bagi Pemda Kabupaten/Kota.
22. Peningkatan nilai dana belum diikuti oleh perubahan bauran anggaran (*budget mix*), untuk memenuhi kebutuhan dasar, dimana data menunjukkan bahwa tidak signifikannya perubahan proporsi antar sektor/subsektor selama periode 1996/1997 - 2003. Proporsi terbesar dana pembangunan tersebut adalah (1) transportasi, meteorologi dan geofisika (29.46%); (2) Pendidikan (10.65%), (3) Aparatur dan Pengawasan (10.46%), (4) Pembangunan Daerah dan

Transmigrasi (9.98%), dan (5) Pertanian (7.11%). Bidang IPTEK hanya memperoleh proporsi dana 1.1%, menempati urutan ke-12 dari 21 sektor/aspek kategori pendanaan.

23. Menurut analisis input-output tahun 2001, jika dianggap bahwa asumsi homogenitas, proporsionalitas dan aditivitas dipenuhi, maka investasi pada industri makanan, minuman dan tembakau serta listrik, gas dan air minum serta hotel dan restoran memiliki daya dorong yang tinggi dengan kepekaan rendah. Namun demikian, dengan melanggar asumsi proporsionalitas melalui inovasi dan portofolio investasi yang lebih mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya lahan kering (di darat) dan sumberdaya perairan (di laut), pilihan kepada pengembangan plasmanutrafah eksotik dan revitalisasi perikanan menyediakan ruang yang juga menjanjikan. Ini berarti pemerintah perlu menggeser proporsi pendanaannya dari subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan ke subsektor lain (perkebunan, perikanan, kehutanan).
24. Perkembangan perdagangan antara Nusa Tenggara Timur dengan dunia menunjukkan bahwa setelah tahun 2000 terjadi kecenderungan peningkatan ekspor maupun impor. Terdapat empat fenomena penting yakni: (1) Terjadi defisit neraca perdagangan (2) Mitra utama ekspor adalah Timor Leste dengan komoditas utama Bahan Bakar Minyak (BBM), dimana komoditas tersebut hanya lalu-lewat; (3) Share Ekspor Impor terhadap PDRB meningkat menuju pola provinsi pelabuhan (4) Salah satu impor terbesar non-migas NTT adalah bahan pangan olahan.
25. Dengan mengakumulasi pencapaian perekonomian Nusa Tenggara Timur 1994 - 2005, disimpulkan bahwa berbagai kebijakan perekonomian yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum secara optimal menghasilkan perubahan perilaku masyarakat dalam produksi, investasi, menabung dan konsumsi. Hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya: (1), Ketidakselarasan intervensi pemerintah dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, kapitalisasi dan mekanisasi dengan potensi produksi yang tersedia di Nusa Tenggara Timur, atau (2), terjadi

kesalahan pentargetan (*mistargetting*) penerima intervensi, atau (3), ukuran-ukuran kesejahteraan menurut sebagian besar masyarakat tidak selaras dengan indikator kesejahteraan pemerintah.

C. Sarana Prasarana dan Aksesibilitas

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang pembangunan suatu wilayah. Dalam penyediaan sarana dan prasarana di NTT, untuk daerah yang telah memiliki sarana dan prasarana relatif memadai kebijakannya adalah penyerasian dan pengoptimalan pemanfaatan sedangkan untuk daerah-daerah yang sarana dan prasarannya kurang memadai kebijakannya adalah memperluas pembangunan sarana dan prasarana.

1. Transportasi Darat, Laut dan Udara

NTT merupakan provinsi kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pulau yang satu sama lain dipisahkan oleh laut. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi di NTT sangat strategis mengingat posisinya relatif jauh dari pusat-pusat pasar di Indonesia. Sesuai dengan posisi geografisnya, transportasi massal yang potensial dikembangkan di NTT adalah transportasi darat untuk internal wilayah dan transportasi laut untuk akses antar pulau dan ke luar wilayah NTT. Di NTT, transportasi udara masih dalam jumlah terbatas dan lebih dominan untuk mendukung akses ke luar wilayah NTT. Pembangunan di bidang transportasi diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara termasuk peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, terminal, pelabuhan dan bandara.

a. Transportasi Darat. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat di NTT membutuhkan biaya relatif besar disebabkan kondisi topografinya sebagian besar memiliki tingkat keterlereng curam dan berbukit. Selain itu, transportasi darat hanya dapat berfungsi optimal pada pulau yang besar karena secara geografis NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, sehingga hubungan darat kurang efektif. Transportasi darat antar kabupaten, kecamatan dan

desa masih terbatas karena kurangnya sarana dan prasarana jalan.

1. Saat ini, NTT hanya mempunyai jalan aspal yang relatif sedikit, dominannya adalah jalan kerikil dan jalan tanah. Persentasi jalan kerikil dan tanah masih sangat tinggi.
2. Pada 10 tahun terakhir, tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Jumlah jalan aspal di NTT bahkan cenderung menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Selama 10 tahun terakhir, jalan aspal yang relatif tinggi dibangun hanya di Kota/Kabupaten Kupang. Di beberapa kabupaten bahkan terjadi penurunan. Di beberapa kabupaten, jalan aspal sangat sedikit. Beberapa wilayah masih relatif terisolir dan tertinggal dibanding dengan wilayah lainnya.
4. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada perubahan persentasi antara jalan nasional, provinsi dan kabupaten di NTT. Di setiap kabupaten, persentasi jalan nasional dan provinsi relatif kecil dibanding dengan jalan kabupaten. Dengan demikian dominan tanggung jawab pembangunan jalan berada pada tingkat kabupaten.
5. Tidak ada perbaikan yang signifikan, kondisi jalan dalam 10 tahun terakhir bahkan cenderung menurun selama 5 tahun terakhir. Panjang jalan yang termasuk kategori baik menurun. Jumlah jalan yang termasuk kategori rusak dan rusak berat meningkat. Kerusakan jalan tersebut terjadi hampir merata di setiap kabupaten kecuali di Kota Kupang, Kabupaten Belu dan Flores Timur.
6. Penurunan sarana dan prasarana jalan disebabkan oleh kurangnya dana pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan terutama sejak desentralisasi. Kurangnya sarana dan prasarana jalan mengurangi mobilitas orang dan barang terutama dari desa ke kota. Desa merupakan pusat kegiatan ekonomi

pertanian di NTT dan merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan relatif besar terhadap perekonomian NTT khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja.

7. Sarana dan prasarana jalan belum didukung oleh sarana dan prasarana jembatan dan terminal yang memadai.
8. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah kendaraan di NTT mengalami kenaikan yang cukup pesat. Jumlah sepeda motor mengalami peningkatan sekitar tiga kali lipat. Jeep/sedan mengalami kenaikan sekitar 40%, mini bus/mikro bus lebih dari 50% atau meningkat sekitar dua kali lipat. Jenis kendaraan truk, pick up dan mobil tangki naik lebih dari 25%. Walaupun demikian, pertumbuhan jumlah kendaraan tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan sarana dan prasarana jalan sehingga dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan kemacetan lalu lintas terutama di kota-kota dan akan semakin meningkat pada 20 tahun mendatang.
9. Walau masih tertinggal dibanding dengan wilayah lainnya di Indonesia seperti pulau Jawa, setiap tahun ada anggaran pemerintah untuk melakukan pembangunan, perbaikan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan terminal. Akses transportasi darat dari desa ke kota dan beberapa wilayah yang terisolasi dilakukan melalui pembukaan jalan baru. Pada Tahun Anggaran 2006, pemerintah melakukan program rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yaitu pemeliharaan berkala jalan sepanjang 404.16 km; pemeliharaan rutin jalan dan jembatan sepanjang 279.47km, dan program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 183.60 km.
10. Sebagian besar wilayah NTT mempunyai topografi berbukit-bukit, memiliki tingkat keterlerangan yang

curam sehingga secara umum prasarana jalan dan jembatan rawan longsor, erosi dan bencana alam lainnya. Selain itu, juga rawan akan kecelakaan lalu lintas. Akses transportasi darat dari desa ke kota banyak berada di medan yang sulit.

11. Kondisi geografis wilayah provinsi NTT sebagian besar memiliki tingkat kelerengan yang curam dan topografi berbukit sehingga membutuhkan biaya pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat yang tinggi. Oleh karena secara geografis NTT merupakan wilayah kepulauan, maka transportasi darat hanya dapat berfungsi optimal pada pulau yang besar sehingga hubungan darat antar propinsi maupun kabupaten kurang efektif.
 12. Permasalahan 20 tahun mendatang adalah pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat. Hal ini terutama akan dihadapi di tingkat kabupaten/kota karena dominan jalan di NTT merupakan jalan kabupaten. Jumlah kendaraan 20 tahun ke depan diperkirakan akan meningkat 3 sampai 5 kali lipat. Jika pertumbuhan kendaraan ini tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana jalan maka akan memicu kemacetan terutama di ibukota provinsi dan kabupaten.
 13. Dalam 10 tahun terakhir, arus kunjungan angkutan, volume bongkar muat barang dan arus penumpang melalui pelabuhan penyeberangan very meningkat
- b. Transportasi Laut.** Sebagai wilayah kepulauan, transportasi yang cukup potensial yang dikembangkan di NTT adalah transportasi laut, karena
1. Kemampuan keuangan dalam pengadaan sarana dan prasarana transportasi laut seperti pengadaan kapal, pembangunan dermaga/pelabuhan dan lain-lain masih terbatas. Jumlah manusia dan barang yang dapat diangkut melalui laut masih terbatas dan biaya pengangkutan masih mahal.

2. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam hal volume bongkar muat barang pada berbagai pelabuhan laut di NTT. Dominan volume bongkar muat barang yang dominan hanya ada pada sejumlah kecil pelabuhan yaitu Tenau-Kupang, Maumere-Sikka dan Kalabahi-Alor, sedang pada sejumlah pelabuhan lainnya masih rendah.
3. Dalam 10 tahun terakhir, terjadi kenaikan arus kunjungan kapal laut (jenis pelayaran: samudra, nusantara, lokal, khusus, perintis dan rakyat) pada pelabuhan laut NTT. Pada periode 10 tahun tersebut, kenaikannya lebih dari 300%. Pada tahun 2004, jumlah kapal laut yang datang dan berangkat dari pelabuhan NTT yang menduduki peringkat tertinggi adalah pelabuhan di Larantuka-Flores Timur dan Tenau-Kota Kupang sedangkan pelabuhan lainnya masih rendah.
4. Dalam 10 tahun terakhir, terjadi kenaikan arus penumpang kapal laut pada berbagai pelabuhan di NTT. Walaupun demikian, arus penumpang kapal laut yang dominan hanya ada di pelabuhan tertentu seperti di Larantuka, Tenau dan Maumere sedangkan melalui pelabuhan lainnya relatif rendah.
5. Peranan transportasi laut mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Walaupun demikian, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum bisa disinggahi kapal Pelni, kapal perintis dan jenis kapal lainnya karena kondisi pelabuhannya yang belum memadai. Sampai saat ini, transportasi laut belum banyak berperan dalam mendorong import-eksport dan masih ada ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut antar kabupaten.
6. Peranan transportasi laut dalam perekonomian NTT diperkirakan akan semakin penting dalam 20 tahun mendatang terutama dalam perdagangan antar pulau, provinsi dan negara. Hal ini sesuai dengan posisi geografi NTT sebagai provinsi kepulauan dan dekat dengan beberapa negara tetangga. Peluang yang

dapat dikembangkan di masa mendatang adalah meningkatkan transportasi laut dari berbagai wilayah di NTT ke berbagai wilayah di Negara Timor Leste untuk meningkatkan volume perdagangan, dan membuka jalur transportasi laut dari beberapa wilayah di NTT dengan beberapa wilayah di Australia untuk mendukung ekspor terutama hasil-hasil pertanian.

7. Analisis proyeksi ancaman di bidang transportasi laut di masa mendatang adalah terjadinya kecelakaan laut akibat ombak, cuaca buruk akibat perubahan cuaca global dan usia kapal yang tua. Terjadinya perubahan iklim global menyebabkan terjadinya perubahan cuaca yang kadang sulit diprediksi dan dapat mempengaruhi efektifitas dan keamanan transportasi laut. Efektifitas dermaga juga terpengaruh oleh akibat perubahan iklim tersebut. Selain itu, transportasi laut rawan kebakaran, keamanan dan perdagangan ilegal melalui laut terutama ke beberapa negara tetangga terdekat khususnya Timor Leste.
8. Permasalahan lain adalah adanya sarana dan prasarana yang ada masih tradisional dengan teknologi rendah. Kemampuan keuangan pemerintah dalam pengadaan kapal, pembangunan pelabuhan/dermaga, jalan pelabuhan dan sarana prasarana lainnya terbatas sehingga mobilitas manusia dan barang yang dapat diangkut masih terbatas dan biaya pengangkutan masih tinggi.
9. Mengingat peranan transportasi laut yang sangat strategis dan potensial di NTT, diproyeksikan bahwa pada 20 tahun mendatang perlu meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan laut, termasuk pengadaan berbagai jenis kapal modern untuk meningkatkan arus penumpang dan barang dari dan ke NTT. Arus kunjungan berbagai jenis kapal: PELNI, PELRA dan jenis kapal lainnya pada pelabuhan di NTT diperkirakan akan meningkat. Peranan transportasi laut dalam mendukung ekspor

produksi NTT diperkirakan penting mengingat adanya posisi NTT terutama yang dekat dengan negara Timor Leste dan Australia.

c. Transportasi Udara. Transportasi udara di NTT secara umum belum berkembang. Jumlah pesawat yang masuk dan keluar NTT masih relatif rendah. Selain itu, masih terdapat beberapa daerah/ bandara yang cukup rendah dilalui oleh pesawat. Volume bongkar muat barang melalui pelabuhan udara masih rendah. Pengangkutan komoditi lingkup intra provinsi maupun antar provinsi melalui pesawat udara masih rendah. Sarana dan prasarana bandara masih kurang dan dominan merupakan bandar udara yang sedang berkembang yang secara finansial belum mandiri. Jalur penerbangan ke beberapa wilayah di negara tetangga potensial khususnya ke Timor Leste dan Australia juga belum berkembang. Berbagai kecenderungan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir adalah:

1. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah pesawat yang datang dan berangkat melalui bandara NTT hanya sedikit bertambah, bahkan pada periode Tahun 1996 - 2003 menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, bandara udara yang relatif padat disingahi pesawat di NTT adalah bandara udara El Tari - Kupang, Mali - Alor, Wai Oti - Sikka, Mauhau - Sumba Timur dan Komodo - Mangarai Barat. Sedangkan bandara lainnya relatif rendah. Dari sejumlah bandara di NTT, yang cukup pesat berkembang dalam 10 tahun terakhir adalah bandar udara Mali, Mauhau dan Komodo, di mana jumlah pesawat yang datang dan pergi meningkat tajam bila dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, sedangkan bandar udara lainnya relatif konstan dan bahkan sebagian menurun.
2. Volume bongkar muat barang melalui pelabuhan udara di NTT juga tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Volume bongkar muat barang melalui pelabuhan udara di

NTT terutama melalui bandar udara El Tari Kupang, Wai Oti dan Mali, sedangkan bandara lainnya relatif tidak berkembang.

3. Arus penumpang yang datang dan berangkat melalui pelabuhan udara di NTT selama periode 1994 - 2003 hanya sedikit berkembang, bahkan pada periode tahun 1998 - 2002 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Arus penumpang yang datang dan berangkat lewat pelabuhan udara di NTT terutama adalah melalui bandara El Tari Kupang, Wai Oti dan Mali sedangkan melalui bandara lainnya relatif sedikit.
4. Peranan transportasi udara dalam perekonomian NTT diperkirakan akan semakin penting dalam 20 tahun mendatang, terutama dalam mendukung mobilitas penduduk, ekspor-import dan pariwisata. Hal ini sesuai dengan posisi geografi NTT yang dekat dengan beberapa negara tetangga khususnya Timor Leste dan Australia; perairan pesisir dan laut serta budaya NTT yang sangat potensial dalam pariwisata serta posisi NTT yang dekat dengan Pulau Bali. Sejumlah bandara di NTT diperkirakan potensial berkembang menjadi bandara Internasional. Jalur penerbangan ke Timor Leste dan ke beberapa negara bagian di Australia sangat potensial untuk dikembangkan. Peranan transportasi udara dalam angkutan barang, khususnya barang bernilai ekonomi tinggi diperkirakan akan meningkat terutama ke Indonesia bagian barat dan ke beberapa negara tetangga terdekat.
5. Transportasi udara secara umum rawan akan kecelakaan karena sebagian besar bandara berada atau dekat dengan area perbukitan, umumnya sarana dan prasarana bandara masih minim, dan sering terjadi perubahan cuaca di NTT. Selain itu, juga rawan akan pelanggaran batas udara karena posisi NTT yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga.

2. Akses Terhadap Air Bersih dan Sanitasi

Kondisi iklim NTT relatif kering dan curah hujan terbatas sehingga sumberdaya air pun terbatas. Permasalahan utama di bidang akses terhadap air bersih adalah bahwa air yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan atau tidak sesuai dengan peningkatan kebutuhan. Banyak rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air bersih (air minum yang berasal dari air mineral, ledeng atau PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung). Banyak yang tidak mendapat layanan air minum perpipaan. Kemampuan PAM untuk menyediakan air, untuk menemukan sumber air baru, serta meningkatkan debit air masih terbatas. Air yang ada pun kurang dimanfaatkan secara efisiensi oleh PAM. Kemampuan PDAM dalam pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan perpipaan dan sumberdaya air juga masih terbatas. Harga air bersih belum terjangkau masyarakat sehingga jumlah pelanggan air minum masih rendah.

- 2.1. Sebagian besar rumah tangga di NTT saat ini menggunakan sumber air minum dari mata air, sumur dan sungai. Sekitar 42.32% rumah tangga di NTT menggunakan fasilitas air minum umum. Sebanyak 28.51% menggunakan fasilitas air minum bersama, hanya 17.03% yang menggunakan fasilitas air minum sendiri dan tidak ada fasilitas air minum 12,14%..
- 2.2. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah rumah tangga yang memakai air minum yang bersumber dari ledeng hanya sedikit mengalami peningkatan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah rumah tangga yang menggunakan fasilitas air minum sendiri hanya sedikit bertambah. Pada tahun 2005 prosentase rumah tangga masyarakat NTT menggunakan mata air masih tinggi yakni 21,57%; air kemasan 0,77%; ledeng 19,53%; pompa air 0,45%; sumur/perigi 18,28%; sungai 6,83% dan air hujan 2,91%.
- 2.3. Kondisi sanitasi lingkungan umumnya masih rendah, terutama di pedesaan dan kawasan pesisir pantai. Jumlah rumah tangga yang tidak dapat memiliki akses terhadap sanitasi yaitu tidak memiliki kamar mandi sendiri atau tidak dapat memanfaatkan fasilitas kamar mandi umum

cukup tinggi. Sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah untuk menangani sampah juga masih terbatas terutama di kawasan perkotaan.

- 2.4. Jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban menurut jenis kloset yang digunakan, dominan adalah menggunakan kloset jenis cemplung, disusul jenis leher angsa dan plengsengan. Dalam sepuluh tahun terakhir, walau ada perubahan jumlah rumah tangga yang menggunakan jenis kloset leher angsa, masih cukup banyak rumah tangga yang belum menggunakan jenis kloset leher angsa.
- 2.5. Kesadaran masyarakat terhadap sanitasi juga masih rendah. Masih cukup banyak rumah penduduk yang sumber airnya (pompa, sumur, mata air) berdekatan dengan tempat penampungan kotoran/tinja, makam dan relatif tidak berubah dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan sanitasi lingkungan masih rendah.
- 2.6. Peluang untuk meningkatkan akses terhadap air bersih cukup besar. Masih terdapat sejumlah sumber air yang belum dikembangkan. Sumber daya air yang berpotensi ditingkatkan produktifitasnya, seperti dengan cara konservasi. Efisiensi pemanfaatan air saat ini masih dapat ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat dan badan usaha lainnya dalam penyediaan air bersih dapat ditingkatkan di masa mendatang.
- 2.7. Kondisi NTT saat ini belum mengalami kendala yang signifikan dalam masalah sanitasi dan persampahan, sehingga masih relatif mudah dalam perencanaan pengelolaan di masa mendatang.
- 2.8. Jika konservasi tidak dilakukan, maka NTT rawan terhadap krisis air bersih. NTT merupakan wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan musim hujan sedangkan 8 bulan adalah musim panas sehingga sumber-sumber mata air kering. Banyaknya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat

karena sebagian besar masyarakat mengkonsumsi air yang tidak higienis yang mengakibatkan diare dan penyakit menular, khususnya penyakit kulit menjadi penyakit tahunan pada musim penghujan. Selain itu, minimnya ketersediaan air dapat mengurangi minat usaha di NTT.

3. Kelistrikan

Permasalahan utama di bidang kelistrikan adalah kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan. Kebutuhan energi listrik untuk rumah tangga, industri, perkantoran, perhotelan dan lain-lain belum seluruhnya dapat dilayani. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam hal pemerataan distribusi, keterbatasan daya, ketepatan waktu, volume maupun kontinuitas penyediaan. Terbatasnya sumber daya listrik di NTT menyebabkan banyak rumah tangga, terutama di pedesaan, belum dapat menikmati layanan listrik dan sering terjadi pemadaman. Dari seluruh rumah tangga yang ada di NTT, dominan menggunakan pelita, obor untuk penerangan rumah. Jumlah rumah tangga yang menggunakan layanan PLN untuk penerangan rumah hanya 34.06% sedangkan sisanya menggunakan petromaks dan sumber penerangan lainnya.

- 3.1. Permasalahan dalam pemerataan pemenuhan kebutuhan listrik adalah luasnya wilayah berbentuk kepulauan dengan kepadatan penduduk bervariasi sehingga menyulitkan pengembangan sistem kelistrikan yang efisien. Ada kesulitan geografis sehingga beberapa wilayah sulit dijangkau jaringan listrik PLN.
- 3.2. Ketergantungan pembangkit listrik terhadap BBM di NTT sangat besar karena penggunaan sumber energi lainnya - seperti energi matahari, arus laut, tenaga angin dan lain-lain - belum berkembang.
- 3.3. Kemampuan keuangan pemerintah untuk merehabilitasi, menghidupkan kembali kapasitas energi serta pembangunan pembangkit listrik baru terbatas. Peranan swasta, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyediakan tenaga listrik belum berkembang. Daya beli masyarakat terhadap listrik umumnya masih rendah.

- 3.4. Di masa mendatang, pembangunan di bidang kelistrikan perlu memberi peluang bagi swasta, pemerintah daerah, masyarakat dan lainnya dalam pembangunan pembangkit listrik, terutama listrik non BBM. Ketergantungan pada pembangkit listrik BBM perlu diperkecil melalui penggunaan energi matahari, biodisel, panas bumi, hidro gas, batubara, gelombang atau sumber energi lainnya yang potensial di NTT. NTT berpeluang meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik terutama pembangkit listrik non BBM. Sesuai dengan kondisi klimatologi NTT dan luasnya laut NTT, penggunaan energi surya, gelombang laut dan angin sangat potensial untuk dikembangkan. Hal ini akan dapat mengatasi luasnya wilayah NTT yang berbentuk kepulauan dengan kepadatan penduduk yang bervariasi yang menyulitkan pengembangan sistem kelistrikan PLN konvensional.

4. Permukiman

- 4.1. Permasalahan di bidang sarana dan prasarana permukiman terletak pada masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri dan banyak rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan terutama di pedesaan dan kawasan pesisir pantai. Kemampuan masyarakat untuk membangun rumah sendiri yang sehat dan layak huni atas kemampuannya sendiri masih rendah.
- 4.2. Dari jumlah rumah tangga yang memiliki rumah, diperoleh bahwa jumlah rumah tangga yang mempunyai rumah dengan jenis lantai terluas terdiri dari tanah sangat tinggi yaitu mendekati 50% dari jumlah yang memiliki rumah dan cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. Dari 881.120 rumah tangga pada tahun 2004 sebanyak 403.463 rumah tangga mempunyai rumah yang lantainya sebagian besar terdiri dari tanah.
- 4.3. Dalam 10 tahun terakhir, walau jumlah rumah yang dibangun meningkat setiap tahun, peningkatan tersebut relatif kecil dibandingkan dengan peningkatan

kebutuhan sesuai penambahan penduduk. Pada tahun 1997, ada 716.638 rumah yang dibangun, dan hanya meningkat menjadi 881.120 rumah pada tahun 2004. Dari rumah tersebut dominan mempunyai luas < 50 m². Dari 881.120 rumah pada tahun 2004 lebih dari 600.000 rumah memiliki luas < 50 m² dan lebih dari 90% rumah di NTT mempunyai luas di bawah 100 m².

- 4.4. Dari seluruh rumah yang ada di NTT, sekitar 80% mempunyai atap terbuat dari seng, sisanya terbuat dari dedaunan, ijuk, sirap dan hanya sebagian kecil beratap genteng atau beton. Dari data Tahun 2004, kebanyakan rumah di NTT mempunyai dinding terbuat dari bambu, disusul tembok dan kayu sedang lainnya terbuat dari bahan murah lainnya. Proporsi ini relatif tidak berubah dalam 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir, walau terjadi pertumbuhan rumah tembok batu, namun pertumbuhan ini tidak signifikan karena rumah bertembok bahan murah lainnya juga meningkat.

5. Telekomunikasi/Telematika

Dalam 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan penggunaan berbagai jenis sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi, mulai dari penggunaan telepon, internet, televisi, radio dan lain-lain. Walau demikian, akses terhadap Teknologi Informasi (TI) dan komunikasi ini hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, umumnya yang tinggal di perkotaan. Secara umum akses terhadap telekomunikasi/telematika tersebut belum terjangkau ekonomi masyarakat. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang telekomunikasi/telematika tersebut juga masih terbatas.

Dalam 10 tahun terakhir, jumlah pelanggan telepon swasta mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari 10.250 pelanggan pada tahun 1994 menjadi 36.562 pada tahun 2004. Jumlah pelanggan telepon pemerintah mengalami kenaikan, yaitu dari 1.988 pelanggan pada tahun 1994 menjadi 2.525 pada tahun 2004. Walau demikian, jumlah pelanggan telepon tersebut sebagian besar hanya terdapat di Kota/Kabupaten Kupang.

Dalam 10 tahun terakhir, jumlah kantor pos hanya sedikit mengalami kenaikan yaitu dari 92 buah pada tahun 1994 menjadi 127 buah pada tahun 2004. Kantor pos tersebut kebanyakan terdapat di kota/kabupaten Kupang, yaitu dari 127 kantor pos sebanyak 23 berada di kota/kabupaten Kupang. Penyebaran kantor pos di kabupaten lainnya relatif merata kecuali di kabupaten Lembata, Rote Ndao dan Manggarai Barat yang masing-masing baru mempunyai satu kantor pos.

Dalam 20 tahun mendatang, diperkirakan pemanfaatan telekomunikasi, Teknologi Informasi (TI), penyiaran dan lain-lain di NTT akan meningkat pesat. Investasi dalam penyediaan infrastruktur telematika, terutama swasta, diperkirakan akan meningkat. Saat ini terdapat sejumlah wilayah potensial di NTT yang belum dikembangkan dan cukup menarik dalam investasi. Selain itu, akibat semakin berkembangnya perekonomian NTT, kebutuhan akan teknologi telekomunikasi dan telematika juga meningkat.

6. Sumberdaya Air dan Irigasi

Tujuan pembangunan di bidang sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi adalah untuk meningkatkan hasil pertanian melalui peningkatan luas lahan beririgasi dan meningkatkan intensitas tanam.

- 6.1. Dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk, maka meningkat pula permintaan akan kebutuhan pangan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, perluasan areal tanam dan peningkatan intensitas tanam diperlukan.
- 6.2. Salah satu permasalahan di NTT adalah terbatasnya luas lahan beririgasi sehingga hasil pertanian dan pendapatan petani rendah. Di sisi lain, jumlah lahan tidur dan lahan kritis cukup besar yang potensial untuk dikembangkan menjadi lahan produktif, namun belum dapat dimanfaatkan karena terbatasnya sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi seperti embung, bendungan dan jaringan irigasi lainnya.

- 6.3. Belum optimalnya program embung kecamatan dan desa, dan program seribu embung yang dicanangkan untuk meningkatkan luas areal tanam dan intensitas tanam dan penyediaan air minum. Dana pembangunan dan pemeliharaan bendungan, embung dan saluran irigasi terbatas. Selain itu, usaha untuk melindungi kawasan tangkapan air dan daerah aliran sungai untuk mendukung ketersediaan sumberdaya air belum optimal.
- 6.4. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam hal luas panen dan produksi padi di NTT.
- 6.5. Total lahan yang diairi (irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana, tadah hujan dan pasang surut) dalam 10 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Lahan yang diairi di NTT sejak Tahun 1994 sampai 2004 dominan di Kota/Kabupaten Kupang, Manggarai, Sumba Barat dan Sumba Timur sedang di kabupaten lainnya relatif kecil.
- 6.6. Sampai dengan tahun 2005, jumlah embung kecil yang sudah dibangun di NTT sebanyak 334 buah dengan daya tampung 8.318.112 m³, embung irigasi sebanyak 24 buah dengan daya tampung 4.222 m³ untuk mengairi lahan areal irigasi seluas 4.222 Ha.

7. Sarana Kesehatan dan Pendidikan

- 7.1. Permasalahan di bidang sarana dan prasarana kesehatan di NTT terletak pada kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu dan lain-lain yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan. Satu rumah sakit melayani sekitar 119.913 orang. Selain itu, kapasitas tempat tidur di rumah sakit masih terbatas.
- 7.2. Di bidang pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang ada jauh dari tuntutan peningkatan mutu dan perluasan akses; Pemerintah telah menetapkan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi kurikulum, standart penilaian, standart kompetensi kelulusan,

standart proses, standart tenaga kependidikan, standart sarana prasarana, standart pengelolaan dan standart pembiayaan (PP 19 Tahun 2005). Sebagian besar sekolah-sekolah di NTT pada umumnya belum memenuhi standart nasional tersebut. Khususnya sarana prasarana pendidikan yang ada di NTT masih sangat kurang seperti perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium IPA, kimia, biologi, bengkel kerja, sarana sanitasi, UKS dan sebagainya. Disamping itu sebagian prasarana pendidikan berada dalam kondisi rusak sedang/rusak berat terutama pada SD/MI.

- 7.3. Pada 10 tahun terakhir, terjadi pertambahan sarana dan prasarana kesehatan di NTT seperti jumlah rumah sakit, kapasitas tempat tidur, puskesmas, posyandu dan dan lain-lain. Walau demikian, pertumbuhan tersebut masih belum sesuai dengan peningkatan kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk, sehingga belum mampu menurunkan nisbahnya terhadap jumlah penduduk. Demikian juga halnya dengan sarana dan prasarana pendidikan.

D. Politik dan Pemerintahan

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur secara administrasi pada tahun 2005 terbagi dalam 15 kabupaten dan 1 kota dan tahun 2007 menjadi 19 kabupaten dan 1 kota dengan luas wilayah daratan 47.349,9 km². dan sebagian besar wilayah terdiri dari perairan laut diperkirakan sekitar 200.000 km atau 80,86% dengan garis pantai 5.700 km. Jumlah pulau 566 yang mempunyai nama 246 pulau dan yang belum mempunyai nama 320 pulau; 42 pulau yang berpenghuni dan 524 pulau yang belum dihuni. Hal ini mengakibatkan akumulasi wilayah NTT tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, kecuali beberapa kabupaten yang mengalami pemekaran wilayah. Paralel dengan luas wilayah NTT tersebut adalah dilakukannya perencanaan dan penetapan anggaran pembangunan di mana selama ini alokasinya relatif belum memadai untuk mendukung pembangunan di wilayah NTT karena perhitungannya hanya

didasarkan pada luas wilayah daratan dan mengabaikan luas wilayah lautan sebagai satu kesatuan. Provinsi NTT terdapat 3 pulau besar yaitu Flores, Sumba dan Timor serta beberapa pulau kategori sedang yaitu pulau Alor, Lembata dan Rote dan selebihnya pulau-pulau kecil yang letaknya tersebar.

2. Pelaksanaan otonomi daerah di NTT belum sepenuhnya membawa dampak positif bagi rakyat di daerah antara lain karena keterbatasan sumberdaya, kurangnya persiapan, dsb. Beberapa dampak negatif yang perlu diantisipasi pemecahannya antara lain:

Pemilihan Gubernur atau Bupati/Walikota secara langsung oleh rakyat dan yang memenangkan pemilihan Kepala Daerah, mengambil kebijakan pembinaan PNS berdasarkan kepentingan, dan bukan berdasarkan kompetensi/keahlian sehingga dapat merusak sendi – sendi penyelenggaraan pemerintahan lokal dan adanya kecenderungan etnisitas dan politik aliran dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di NTT.

Terjadi krisis sumber daya manusia sehingga pengisian jabatan di lakukan dengan cara mengatrol kepengkatan seseorang akibat keterbatasan sumber daya manusia yang memenuhi syarat.

Koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten masih lemah.

Masyarakat enggan mengontrol dan mengkritik pemerintah akibat tidak adanya payung hukum yang melindungi.

Fanatisme kedaerahan, kesukuan, kekeluargaan, keagamaan, kian menguat menjadi salah satu bahaya disintegrasi bangsa di tengah – tengah upaya mempertahankan NKRI.

3. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik, namun terkendala oleh kondisi geografis yang terdiri atas pulau – pulau serta dukungan sarana dan prasarana transportasi yang

belum memadai seperti transportasi darat, laut dan udara; akibatnya pelayanan publik menjadi terhambat dan mahal biayanya.

4. Selain hambatan sarana prasarana transportasi serta komunikasi yang terbatas dan jauh dari memadai yang dihadapi oleh pemerintah provinsi NTT, hambatan lain yang tidak kalah pentingnya juga adalah hambatan dari segi profesionalisme, di mana dijumpai bahwa pelayanan publik yang dikeluhkan oleh masyarakat lamban, pilih kasih, tebang pilih, dan sebagainya, sebenarnya permasalahannya antara lain terletak pada kurangnya profesional aparatur birokrasi di dalam melaksanakan tugasnya, menyikapi perkembangan pembangunan 20 tahun mendatang maka membutuhkan profesionalisme aparatur.
5. Kesadaran tentang rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), mestinya membuat pemerintah daerah provinsi NTT menata kembali struktur organisasi kelembagaan sebagai salah satu upaya penghematan anggaran agar benar-benar penggunaan anggaran tersebut terarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun sebagian besar kabupaten di NTT belum melakukan restrukturisasi birokrasi pemerintahan yang hemat struktur dan kaya fungsi.
6. Hakekat otonomi daerah adalah kemampuannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri tanpa mengharap penuh pada bantuan pemerintah. Harapan tersebut tampaknya belum sepenuhnya terpenuhi karena PAD relative masih kecil dan karenanya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah cukup besar. Presentase PAD terhadap keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkisar antar 4% sampai 6% saja.
7. Otonomi daerah berpeluang membawa dampak positif bagi masyarakat mengingat sumber daya manusia yang makin baik, ketersediaan sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam hampir semua kegiatan pembangunan.
8. Pengejawantahan prinsip – prinsip demokrasi melalui proses pilkada di Nusa Tenggara Timur diakui telah berjalan,

namun belum adanya kesadaran politik masyarakat, pemerintah dan lembaga – lembaga politik seperti partai politik dan LSM untuk mengawal proses demokrasi tersebut agar berlangsung jujur dan adil sesuai harapan masyarakat.

9. Dukungan pemerintah daerah provinsi NTT untuk menyukseskan pemilihan umum langsung anggota DPR, DPD dan DPRD Kota/Kabupaten serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004, telah berjalan aman, jujur, adil dan demokratis. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan penting di bidang politik dan pemerintahan, demikian juga pemilihan kepala daerah secara langsung : Sumba Timur, Sumba Barat, Flotim, Manggarai, Manggarai Barat, Lembata dan Kota Kupang. Keberhasilan ini semua merupakan modal awal untuk berkembang di provinsi ini akan berjalan lancar dan demokratis.
10. Masyarakat Nusa Tenggara Timur cukup responsive terhadap dinamika kehidupan partai politik di Indonesia. Pada tahun 1955, di NTT terdapat 21 partai politik; tahun 1971 terdapat 8 partai politik; kemudian pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1997 terdapat 3 partai politik; dan sejak tahun 1999 sampai 2004 terdapat 37 partai politik. Total pemilih pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I tahun 2004 adalah sebanyak 2.527.429 orang dan pada putaran II sebanyak 2.540.224 orang.
11. Secara umum, pemilihan umum tahun 2004 di Nusa Tenggara Timur telah berhasil diselenggarakan dengan baik. Hasil akhir Pemilu telah berhasil menempatkan 5 partai besar yaitu: Golkar, PDIP, Damai Sejahtera, Patriot Pancasila serta Keadilan dan Persatuan Indonesia. Kalau diurut menjadi 10 partai besar maka urutan partai tersebut menjadi: Golkar, PDIP, Damai Sejahtera, Patriot Pancasila, Keadilan dan Persatuan Indonesia, Kebangkitan Bangsa, Demokrat, Pelopor, Persatuan Demokrasi Kebangsaan, dan Persatuan Daerah. Hasil ini merupakan salah satu keberhasilan pembangunan politik di Nusa Tenggara Timur.
12. Hasil pemungutan suara anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur tahun 2004 juga telah berhasil menempatkan 13

orang mewakili provinsi Nusa Tenggara Timur di DPR RI; 4 orang di DPD; 55 orang di DPRD Provinsi; dan 479 orang di DPRD Kabupaten/Kota. Adapun 13 orang yang mewakili provinsi Nusa Tenggara Timur di DPR RI tersebut adalah berasal dari partai Demokrat 1 orang; partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1 orang; partai Penegak Demokrasi 1 orang; partai Demokrasi Perjuangan 3 orang; partai Damai Sejahtera 1 orang; Partai Golongan Karya 5 orang; dan partai Pelopor 1 orang. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat NTT di DPR RI.

13. Pematokan 30% alokasi target perempuan dalam bidang politik belum terpenuhi. Kendala yang paling utama dirasakan di NTT adalah akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan kurang, antara lain disebabkan oleh faktor sosial – budaya. Pemenuhan 30% target perempuan dalam bidang politik seperti menduduki jabatan politik kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.
14. Hak inisiatif DPRD untuk mengajukan rancangan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk perjuangan politik atas tuntutan dan dukungan rakyat belum sepenuhnya terlaksana.
15. Stabilitas keamanan dan ketertiban sangat kondusif dan terkendali, sekalipun penentuan referendum di Timor – Timur berdampak besar bagi keamanan dan ketertiban di wilayah Pulau Timor bagian barat, namun berkat kesigapan pemerintah daerah, aparat keamanan dan dukungan masyarakat, dampak tersebut dapat diatasi. Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif ini diharapkan akan menjadi salah satu prasyarat penting untuk memacu pembangunan pada bidang yang lain seperti: bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya.
16. Pemekaran dan pembentukan beberapa kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan public yang lebih baik kepada masyarakat, memperpendek jarak pelayanan, membuka ruang partisipasi yang semakin luas dan memacu pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan ekonomi di

daerah melalui pemberian kewenangan dan tanggungjawab pemekaran dan pembentukan kabupaten.

17. Provinsi Nusa Tenggara Timur berpeluang menjadi provinsi kepulauan, dengan demikian luas wilayah provinsi NTT akan bertambah luas; hal ini berdampak pada peningkatan alokasi anggaran pembangunan dari pemerintah kepada provinsi ini. Meskipun Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi kepulauan namun masih mempunyai peluang untuk dimekarkan menjadi provinsi demi mendekatkan dan memperpendek jarak pelayanan publik. Demikian juga kabupaten masih berpeluang untuk dimekarkan menjadi daerah otonomi baru, selanjutnya untuk tingkat kecamatan

E. Hukum dan HAM

1. Krisis multi dimensi yang diawali oleh krisis keuangan di penghujung era orde baru diyakini disebabkan, antara lain, oleh karena hukum cenderung difungsikan semata sebagai instrument legitimasi penyelenggaraan kekuasaan politik. Reformasi pembangunan hukum diarahkan untuk penegakan supremasi hukum. Krisis juga diyakini disebabkan oleh sentralisasi kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif, dan sebab itu era reformasi secara bertahap terarah pada proses konstruksi hukum secara terdesentralisasi. Dengan demikian supremasi hukum dewasa ini adalah supremasi hukum yang dikonstruksikan secara demokratis. Ini berarti bahwa telah terjadi perluasan tekanan masalah hukum. Masalah validitas hukum tidak lagi hanya ditekankan pada aspek-aspek filosofis dan yuridis saja, tetapi juga mencakup aspek sosiologisnya. Masalah efektivitas sistem hukum tidak lagi bertumpu pada kekuatan daya paksa yang melebihi daya resistensi, tetapi bergeser ke masalah efektivitas yang bertumpu pada dukungan sosial. Ini berarti bahwa selain wajib sesuai dengan struktur hukum nasional, struktur hukum di daerah juga mesti bersifat kontekstual yang memungkinkan akses ke keadilan dapat menempuh berbagai cara dan memanfaatkan berbagai lembaga alternative. Ini berarti bahwa substansi hukum produk daerah tidak semata merupakan penjabaran dari ketentuan perundangan yang

lebih tinggi melainkan juga dengan sengaja dimaksudkan untuk mengontrol dan merekayasa realitas serta demi menyelesaikan masalah-masalah sosial. Ini berarti bahwa kultur hukum di daerah tidak mungkin lagi bersifat ortodoks semata melainkan terutama mesti berkarakter responsive.

2. Rekonstruksi struktur hukum di NTT konkordan dengan struktur hukum nasional. Di tingkat nasional, rekonstruksi dilakukan ketika institusi-institusi yang ada ternyata tidak efektif lagi dalam menjawab berbagai masalah yang timbul seiring dengan perkembangan sosial kontemporer. Perubahan masyarakat ditandai oleh meningkatnya hasrat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik yang semakin demokratis, pilihan ideologi dan partai politik yang semakin beraneka, meningkatnya sikap dan daya kritis, dan tuntutan akan hukum yang berkarakter responsive, dan desakralisasi UUD 45 dan berbagai lembaga Negara. Susunan kekuasaan Negara setelah amandemen UUD 45 berubah secara fundamental. DPA ditiadakan, DPD dibentuk, dan MPR berubah dari lembaga tertinggi Negara menjadi lembaga gabungan DPR dan DPD. Lembaga-lembaga baru juga dibentuk seperti: Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial (KY), KPU dan BI. Selain itu, fungsi DPR [D] dipertegas kewenangannya baik sebagai legislator maupun sebagai supervisor. Aturan tentang BPK ditambah dan kekuasaan MA ditambah dengan tugas-tugas yang tadinya diemban oleh Departemen Kehakiman, sekaligus dibatasi dalam hal rekrutmen hakim agung. Pembatasan ini memicu konflik antara MA dengan KY; perubahan struktur dan fungsionalisasi struktur dimaksud memicu berbagai fenomena hukum di daerah. Profesionalisme legislator di daerah kini ditentukan melalui proses demokratis dengan syarat kompetensi profesionalitas yang tidak optimal.
3. Konsekuensi otonomi daerah kabupaten-kota adalah, antara lain, dikonstruksinya produk hukum yang secara konseptual mungkin sesuai kebutuhan lokal namun belum tentu sesuai dengan ketentuan hukum lebih tinggi yang dijadikan referensi, *vice versa*. Model konstruksi hukum pada tataran legislasi telah bertambah dari penekanan pada validasi substansi pada ketentuan hukum yang lebih tinggi dan

keabsahan prosedural konstruksi serta keabsahan otoritas konstruktor, dengan justifikasi saintifik [naskah akademik], penyerapan aspirasi rakyat, kearifan lokal dan orientasi utilitarian mendampingi keadilan dan kepastian.

4. Penguasaan tanah tanpa hak, nepotisme dalam rekrutmen PNS, TKI/TKW ilegal, KDRT, konflik horizontal dan vertikal, konflik ideologi ekonomi neo-libertarian dengan ideologi hubungan simbiotik mutualistik manusia dengan alam, penguasaan dan eksploitasi pulau-pulau kecil, cyber crime, merupakan aneka masalah sosial yang menonjol selama sepuluh tahun terakhir. Tetapi penekanan kalangan akademik seperti ini tidak selaras dengan model konvensional kepolisian yang lebih cenderung menekankan urgensi kejahatan-kejahatan konvensional seperti: Curat, Curas, Curanmor, pembunuhan, perkosaan dan kenakalan remaja. Polisi adalah pintu pertama penanganan masalah pidana. Jika perhatian polisi mengutamakan kejahatan-kejahatan konvensional saja, maka kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat justru akan lolos dari jeratan hukum.
5. Pada aras penegakan hukum, yurisdiksi *de jure* dan atau *de facto* lembaga-lembaga penegak hukum konvensional tidak lagi bersifat satu-satunya. Korupsi merupakan salah satu masalah sosial utama yang ditangani oleh berbagai lembaga dan berdampak tumpang tindih dalam tanggungjawab institusional atas kegagalan atau keberhasilan misi yang diemban. Jika korupsi sulit diatasi, institusi manakah yang mesti bertanggung jawab: polisi, kejaksaan, Timtastipikor, ataukah KPK? Kecenderungan politik hukum seperti itu, menyebabkan perancang kebijakan publik berpikir bahwa penyebab ketidak-efektifan terletak pada kurang sempurnanya institusi, padahal penyebab utama terletak pada komitmen dan kompetensi para fungsionaris hukum.
6. Daya tampung dan kapasitas penyelesaian masalah kriminal dan patologi oleh institusi penegak hukum rendah, model proses tidak konsisten dan mutu produk hukum sulit diprediksi karena kurangnya komitmen dan kompetensi profesionalitas para penegak hukum yang bertugas di NTT.

Tingginya “eigenrichting,” dan putusan PN yang dimintakan banding dan putusan PT yang dimintakan kasasi, dan permintaan PK merupakan indikasi rendahnya mutu putusan pengadilan. “Eigenrichting,” atau main hakim sendiri memang berkonotasi negatif, namun di sisi lain merupakan katup pengaman bagi kasus-kasus yang penyelesaiannya tak tersalurkan melalui sistem resmi bagi warga masyarakat yang tak mempercayai.

7. Paradigma [mindset] para fungsionaris hukum di NTT dapat dikategorisasikan berdasarkan orientasi utama tertentu, yaitu penegakan sistem dalam rangka memenuhi cita hukum kepastian, atau menggunakan sistem secara fleksibel dalam rangka memenuhi cita hukum pemecahan masalah, atau menggunakan sistem dalam rangka mewujudkan cita hukum keadilan versi tertentu. Kategori pertama dapat dipilah lagi atas penganut yurisprudensi pengertian, yaitu fungsionaris yang cenderung menerapkan ketentuan perundangan sebagaimana adanya; penganut yurisprudensi asas, yaitu mereka yang menerapkan ketentuan hukum dengan merujuk pada asas-asas hukum; dan penganut yurisprudensi kepentingan. Sementara para penegak sistem cenderung menggeneralisasi kasus sesuai dengan sistem yang mapan, maka para pengguna sistem demi pemecahan masalah dan atau perwujudan keadilan justru bertumpu pada keunikan kasus. Kaidah dan asas dipandang sebagai khayalan belaka, sebab bagi mereka, penyelesaian terbaik adalah yang sesuai dengan keunikan kasus itu sendiri.
8. Selama sepuluh tahun terakhir ini konsep hak asasi manusia [HAM] yang bersifat universal telah mulai diadopsi dalam berbagai kebijakan daerah NTT. Dua kelompok masyarakat, yaitu perempuan dan anak-anak dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran HAM. Kriteria pelanggaran dimaksud mengadopsi kriteria dalam konsep HAM universal, padahal dalam konsep kultur lokal pelanggaran tertentu dipandang sebagai kelaziman atau sedikitnya bukan pelanggaran. Tetapi kerentanan ini bersifat sementara dan akan tereliminasi di masa depan. Di masa depan diprediksikan terjadi penekanan yang berbeda, yaitu pada aplikasi konsep kebebasan individual. Kebebasan

dimaksud berorientasi ganda, yaitu *bebas dari* hambatan-hambatan artifisial yang tidak wajar atau tidak adil, sebagai prasyarat agar *bebas untuk* mengaktualisasikan diri secara optimal. Kebebasan sebagai esensi HAM tersebut telah diakui secara konseptual dan dijamin keberadaannya dalam ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional, dan hanya soal waktu saja untuk diadopsi dalam peraturan daerah [Perda]. Pengakuan dan implementasi HAM tersebut pada tataran internasional, nasional dan lokal merupakan *condition sine qua non* bagi pengembangan pribadi individu dan komunitas, serta bagi kemajuan peradaban daerah, nasional dan dunia. Namun, pengakuan konseptual atau *de jure* sekalipun tidak selalu sama dengan implementasi *de facto* pada tataran lokal. Kultur lokal menanggapi konsep HAM universal dengan berbagai cara. Ada yang bersikap *receptio in complexu*, yaitu mengadopsi sepenuhnya konsep HAM universal; ada yang menerima aspek-aspek tertentu saja sejauh sesuai dengan praksis lokal.

9. Sebagian besar pelanggaran HAM di NTT dikategorisasikan sebagai pelanggaran HAM anak dan perempuan. Bentuknya adalah KDRT dan penelantaran anak. Kasus-kasus ini baru sekarang mencuat karena memang sebelumnya dikategorikan bukan sebagai perbuatan pidana, bukan KDRT atau penelantaran, dan karena itu bukan pelanggaran HAM. Perempuan, anak dan, kini mulai menggejala, para jompo, merupakan kelompok yang rentan karena “bargaining position” mereka lebih lemah dibanding dengan para pelanggarnya.
10. Perempuan menjadi korban pelanggaran HAM dalam berbagai status dan peranannya dalam interaksi sosial (isteri, mantan isteri, ibu, anak, menantu, keponakan, saudara, semenda, pacar, bekas pacar, teman kerja dan tetangga). Pelakunya adalah “counter part” dalam interaksi sosial dimaksud (suami, bekas suami, dst). Selain kekerasan fisik dan penelantaran, pelanggaran dimaksud juga ada yang bersifat psikis, ekonomi dan seksual, atau gabungan semuanya. Penyebabnya beraneka: merentang dari karakter pelanggar sampai dengan karakter korban, dari kondisi struktural sampai dengan pola kultural yang tetap. Tidak

semua pelanggaran HAM dipublikasikan atau terdata dan ditangani secara sistemik. “Dark number” diduga lebih besar dari yang terdata pada lembaga-lembaga terkait. Biaya sosialnya juga besar, merentang dari menurunnya produktivitas sampai dengan biaya-biaya penanggulangan dan pemulihan. Selain respons secara hukum, terdapat juga penanggulangan secara medis, perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan, pembinaan pelaku, dan pemberdayaan korban dalam rangka memperbaiki “bargaining position”-nya. Ketidakpedulian terhadap gejala pelanggaran HAM anak [penelantaran] disebabkan oleh luasnya skala kejadian. Telah merupakan dalil/kaidah dalam politik kriminologi bahwa tingginya minat masyarakat terhadap suatu patologi sosial berbanding terbalik dengan tingginya frekuensi peristiwa. Sekalipun UU mengkategorikannya sebagai pelanggaran, namun tingginya kasus penelantaran anak di NTT menyebabkan fenomena ini dipandang sebagai sesuatu yang lumrah.

F. Geomorfologi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup

1. Geomorfologi dan Sumberdaya Alam

- a. Provinsi NTT terletak di belahan Selatan Indonesia, membentang antara 8° - 12° Lintang Selatan (LS) dan 118° - 125° Bujur Timur (BT). Jarak Utara Selatan membentang sepanjang 4° dan jarak Barat-Timur sepanjang 7° , sehingga NTT berada pada zona iklim tropik yang sangat khas. Letak astronomis kepulauan NTT seluruhnya berada di Selatan katulistiwa. NTT adalah provinsi kepulauan dengan luas daratan 4.734.991 Ha ($47.349,9 \text{ Km}^2$) atau 2.5% dari luas Indonesia, dan luas perairan 18.311.539 Ha. Secara fisik batas wilayah provinsi NTT, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia (Australia), sebelah Timur berbatasan dengan Timor Leste dan Laut Timor, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape (Provinsi NTB). Posisi NTT strategis dari aspek ekonomi dan geopolitik karena berbatasan dan dekat dengan negara Australia dan Timor Leste.

- b. Berdasarkan ketinggian, 48.78% dari luas wilayah provinsi NTT berada pada rentang ketinggian 100-500 m dpl. Sedangkan wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 m hanya sebagian kecil, yaitu 3.65%. Topografi NTT adalah berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis pada luluhan sempit. Pada semua pulau, kebanyakan permukaannya berbukit dan bergunung, dataran-dataran sempit memanjang di sekitar pantai atau diapit oleh dataran tinggi atau sistem perbukitan. Lahan dengan kemiringan 15-40 persen mencapai 38.07% dan lahan dengan kemiringan > 40% mencapai 35.46%. Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran di NTT sangat terbatas, baik pertanian basah maupun lahan kering. Pertanian lahan kering banyak dilakukan pada daerah dengan kemiringan yang curam sehingga produktifitasnya umumnya rendah.
- c. Wilayah Provinsi NTT termasuk dalam kawasan *Circum-Pasifik* sehingga daerah ini, terutama di sepanjang Pulau Flores, memiliki struktur tanah yang labil (sering terjadi patahan). Pulau-pulau seperti Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau di sekitarnya terbentuk secara vulkanik, sedangkan pulau Sumba, Sabu, Rote, Semau, Timor, dan pulau di sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Kondisi jalur pulau-pulau yang terletak pada jalur vulkanik subur namun sering mengalami bencana alam.
- d. Adanya perbedaan iklim, cuaca dan geologi menghasilkan perbedaan jenis tanah di wilayah NTT. Jenis tanah meliputi *Meditran*, *Litosol*, *Alufial*, *Grumosol* dan *Regosol*. Kedalaman tanah di berbagai daerah relatif tipis yang sebagian besar disebabkan faktor struktur batuan induk berupa koral dan tanah yang terbuka karena vegetasi penutup minimum sehingga rentan terhadap erosi. Kedalaman tanah < 30 cm mencapai luas 1.938.403 Ha (40.94%); 31-60 cm seluas 1.186.801 Ha (25.06%); 61-90 cm seluas 199.707 Ha (10.55%) dan 995.489 Ha (21.03%) memiliki kedalaman > 90 cm. Lapisan tanah tipis dengan kedalaman < 30 cm

sangat luas sedang lapisan tanah tebal dengan kedalaman > 90 cm sangat sempit. Kedalaman efektif tanah adalah kedalaman di mana akar-akar tanaman dapat leluasa mengambil unsur hara untuk pertumbuhannya. Sekitar 40.94 % dari luas wilayah NTT atau 1.938.403 Ha memiliki kedalaman efektif 0-30 cm.

- e. Berdasarkan tekstur tanah, wilayah Provinsi NTT sebagian besar memiliki tekstur kasar, yaitu sekitar 47% dari luas total wilayah, tekstur sedang 39% dan tekstur halus 11,33%. Berdasarkan drainase, 96% berdrainase tidak tergenang. Berdasarkan tingkat erosi, hampir 60% dari luas tanah mengalami erosi. Tanah yang tererosi ini banyak dijumpai pada jenis penggunaan ladang, alang-alang atau semak belukar dan memiliki kemiringan lereng di atas 40%.
- f. Iklim di NTT memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada Bulan Juni-September arah angin dari Australia, tidak banyak mengandung uap air mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember-Maret arah angin dari Asia dan Samudera Pasifik, banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim hujan. NTT termasuk wilayah kering, di mana 4 bulan (Januari s/d Maret, dan Desember) keadaan relatif basah dan 8 bulan relatif kering. Tingkat curah hujan berbeda-beda di tiap daerah dengan rata-rata curah hujan 3.849 mm/tahun. Keadaan curah hujan pada umumnya sulit diramalkan. Datangnya hujan dan mulainya bulan kering kadang terlalu cepat dan kadang terlalu lambat.
- g. Secara umum, keadaan hidrologi di wilayah Provinsi NTT, terutama air permukaan agak kurang. Hal ini disebabkan oleh karena musim hujan dalam satu tahun yang hanya berlangsung selama 3 bulan. Kondisi ini mengakibatkan sulit mengeksploitasi sumber air permukaan. Keadaan tanah pada ekosistem lahan kering secara umum mempunyai ciri yang kurang menguntungkan dan merupakan faktor pembatas utama usaha pertanian. Hal ini diindikasikan oleh semua orde

tanah yang tingkat kelembabannya rendah; reaksi tanah netral sampai alkalin; ketersediaan unsur hara makro dan tingkat kesuburan tanah rendah dan topografi tanah berbukit-bukit mengakibatkan tanah rentan terhadap erosi. Sebagian besar lahan adalah lahan kering dan hanya sebagian kecil lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan basah atau sawah.

- h. NTT banyak mengandung bahan-bahan mineral yang terdiri dari bahan galian seperti: logam mulia, logam dasar besi dan bahan galian industri seperti batu kapur, tanah liat, gypsum, pasir, silica, belerang, barit dan lain-lain. Tetapi dari sumber daya pertambangan yang ada tersebut, hanya beberapa mineral yang telah dieksploitasi dan peranan sektor pertambangan dalam struktur ekonomi NTT masih kecil. Provinsi NTT dengan kekayaan sumber daya mineral berpotensi untuk ditingkatkan dalam eksplorasi maupun eksploitasi. Beberapa komoditas unggulan di bidang pertambangan dan energi adalah minyak bumi, emas, marmer, batu hijau, batu apung, batu hitam, energi panas bumi, energi angin, energi surya dan lain-lain. Informasi mengenai potensi tambang; teknologi dan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan potensi tambang tersebut masih kurang. Masih sedikit perusahaan yang melakukan eksploitasi dan investasi di bidang pertambangan. Banyak peraturan daerah yang menghambat iklim investasi, dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi tambang masih rendah.

2. Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup mencakup pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam, rehabilitasi dan perbaikan daerah atau kawasan sumberdaya alam yang telah rusak untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

- a. Di masyarakat masih terjadi praktek pemanfaatan sumberdaya lingkungan dengan cara merusak (penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan beracun, penebangan liar, peyerobotan kawasan hutan

lindung dan lain-lain). Pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan masih kurang. Telah terjadi permukiman di tepian pantai dan pencemaran di kawasan pesisir dan pantai, sungai dan tanah, menurunnya kualitas udara di kawasan perkotaan akibat pencemaran udara, meningkatnya sampah perkotaan, belum ada sistem pengelolaan limbah B3 dan penggunaan bahan perusak ozon meningkat.

- b. Hukum lingkungan atau peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup kurang bersinergi dengan peraturan perundangan sektor lainnya, banyak inkonsistensi, tumpang tindih dan bahkan saling bertentangan yang terjadi. Kawasan lindung sering tumpang tindih dengan kegiatan budidaya. Misalnya perambahan hutan lindung oleh masyarakat untuk perladangan berpindah; permukiman pada kawasan hutan lindung, kondisi kawasan hutan lindung yang tidak berfungsi lindung lagi tetapi sudah termasuk hutan produksi (kawasan budidaya) dan penambangan yang dapat mengganggu fungsi lindung. Banyak kawasan konservasi atau kawasan lindung tidak dikelola dengan baik sehingga tidak berfungsi lagi sesuai dengan tujuannya.
- c. Kurang kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menangani masalah lingkungan hidup. Lemah koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Kurangnya data dan informasi mengenai lingkungan, termasuk informasi tentang wilayah-wilayah yang rentan dan rawan terhadap bencana lingkungan.
- e. Aturan/isu global mengenai lingkungan hidup kurang diadopsi dalam pembangunan daerah. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan belum diterapkan pada seluruh bidang pembangunan. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan belum dilaksanakan semestinya. Penyelamatan ekosistem, flora dan fauna belum sepenuhnya digunakan sebagai bagian integral dalam pembangunan.

- f. Alokasi dana pemerintah untuk sektor lingkungan hidup tidak memadai dikarenakan oleh keterbatasan dana dan kurangnya perhatian terhadap lingkungan hidup.
- g. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah mengembangkan Penetapan Standar Kualitas Lingkungan. Gerakan Tata Praja Lingkungan pada semua kabupaten/kota untuk menciptakan kesamaan persepsi aparatur daerah tentang kebijakan dan upaya penanganan masalah lingkungan. Penguatan kelembagaan Bapedalda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peningkatan profesionalisme aparatur Bapedalda.
- h. Duapuluh tahun ke depan, akibat penambahan jumlah penduduk adalah akan meningkatnya kebutuhan pangan, papan dan sandang. Hal ini akan menuntut peningkatan lahan pertanian yang dapat mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Pada 20 tahun ke depan, akan meningkat jumlah industri dan kegiatan ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jumlah lahan/kawasan kritis meningkat. Akan semakin banyak flora dan fauna yang terancam punah yang akan memicu sorotan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan dunia internasional serta akan mengganggu keseimbangan alam dengan akibat-akibat turutan yang berkelanjutan.

3. Hutan

Provinsi NTT mempunyai areal kawasan hutan sekitar 1.808.981,21 Ha yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan yang dapat dikonversi. Pembangunan di bidang kehutanan diarahkan pada upaya pelestarian, rehabilitasi dan perluasan hutan untuk mengkonservasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Penebangan hutan dan perburuan liar masih berlangsung sehingga jumlah flora dan satwa yang terancam punah

akan semakin tinggi. Banyak satwa yang dilindungi, tidak mendapat perlindungan dan tidak diketahui statusnya baik pada golongan reptil, mamalia, aves, insekta, biota laut dan lain-lain. Masih sedikit diketahui mengenai biologi dan ekologi satwa langka di NTT dan tidak ada informasi mengenai flora langka. Banyak areal/kawasan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan konservasi (suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata, taman nasional dan lain-lain). Dalam sepuluh tahun terakhir, tidak ada perubahan luas hutan. Kawasan hutan dalam tata-ruang kurang teradopsi

2. Pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan lainnya belum berkembang. Optimalisasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu dan penerapan iptek pada sektor kehutanan belum berkembang.
3. Luas Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai basis pengembangan ekonomi-hutan masih rendah. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembalok liar dan penyeludup kayu masih lemah. Kurang adanya askes dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan kurang berkembangnya kemitraan pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas (berbeda penafsiran perundang-undangan) antara pusat-provinsi-kabupaten/kota.
4. Dalam 10 tahun terakhir, kebakaran hutan masih terjadi setiap tahun terutama di Kabupaten Alor dan di Sumba Timur dikarenakan oleh kebutuhan pembukaan lahan, strategi penyiapan pakan ternak, perburuan dan tradisi lokal.
5. NTT mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi yang belum dimanfaatkan. NTT berpeluang memperoleh manfaat dari kekayaan keanekaragaman hayati terutama jasa lingkungan pesisir dan pantai karena NTT merupakan propinsi kepulauan dengan kawasan pesisir dan pantai yang sangat luas. Provinsi NTT berpeluang meningkatkan sumberdaya kehutanan. Saat ini NTT mempunyai lahan tidur dan lahan kritis cukup luas

yang potensial untuk dikembangkan tetapi belum dikelola. Peningkatan hasil hutan dapat dilakukan dengan cara merehabilitasi dan mendayagunakan lahan kritis dan lahan yang sudah rusak menjadi lahan produktif untuk pertanian dan perkebunan, pengembangan hutan produksi, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan lain-lain. NTT mempunyai flora dan fauna khas yang potensial untuk dikomersialisasi seperti kayu cendana.

6. Dalam 20 tahun ke depan, NTT diperkirakan akan mengalami kekurangan suplai/produksi kayu dan harga kayu akan sangat mahal karena meningkatnya kebutuhan akan kayu di satu sisi dan semakin berkurangnya persediaan kayu lokal di sisi lain.

4. Lahan Kritis

- a. Lahan kritis nampak cukup luas, terutama di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Kupang dan Manggarai.
- b. Dalam sepuluh tahun terakhir, luas lahan kritis yang ditangani di NTT sangat sedikit dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada pelita III, luas lahan kritis yang ditangani adalah sekitar 45.811.00 Ha dan pada pelita V seluas 39.082.00 Ha namun pada tahun 1999 hanya 665.00 Ha dan pada tahun 2000 hanya 1.324.00 Ha.
- c. Sebaran lahan kritis belum dipetakan dengan baik. Publikasi dan informasi mengenai perkembangan dan kondisi lahan kritis terbatas.
- d. Praktek-praktek pertanian dan penggunaan lahan yang menimbulkan lahan kritis masih dibiarkan berkembang.
- e. Usaha untuk mencegah dan memulihkan kembali lahan kritis yang sudah rusak seperti penghijauan, reboisasi dan konservasi hutan, tanah dan air yang dipadu dengan upaya pengembangan pertanian, kehutanan dan lain-lain itu nampak masih kurang. Sistem perladangan berpindah dengan cara tebas bakar yang mengganggu keseimbangan lingkungan, menghambat pemudaan vegetasi dan mengakibatkan pembentukan lahan-lahan kritis juga masih berkembang.

5. Sumberdaya Air dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

- a. Masih terjadi pengrusakan atau pemanfaatan sumber air yang tidak bertanggung jawab. Usaha untuk memulihkan sumber air yang rusak kurang. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumberdaya air rendah.
- b. Identifikasi dan pemetaan sumber air potensial; pemantauan dan pengawasan pemanfaatan sumber air; pemeliharaan dan rehabilitasi sumber air, regulasi pemanfaatan dan pelestarian sumber air kurang.
- c. Pembangunan infrastruktur dalam penjagaan pelestarian air dan perlindungan terhadap sumberdaya air terbatas. Teknologi tepat guna dalam pemanfaatan air secara efisien belum berkembang.
- d. Kawasan *catchment area* (terutama di bagian hulu) kurang terpelihara. Pengamanan sungai dan pengembangan wilayah sungai dan penanggulangan bencana alam kurang. Pelestarian dan perlindungan Daerah/wilayah Aliran Sungai (DAS/WAS) kurang terencana, terarah dan terpadu. Kurang pengendalian/perlindungan DAS. Banyak DAS yang tidak berfungsi optimal. Terjadi Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu DAS menyebabkan menurunnya ketersediaan air dan mengancam turunnya debit dan pasokan air.
- e. Pengelolaan DAS kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir, antara pemerintah kabupaten yang dilalui konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di DAS terprioritas untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan. Koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya kurang
- f. Proyeksi ancaman, NTT akan mengalami kekurangan suplai/produksi air, baik untuk kehidupan sehari-hari, irigasi maupun untuk ternak.

6. Kawasan Pesisir dan Laut

Sebagai provinsi kepulauan, sumber daya pesisir dan laut di NTT sangat beraneka ragam dan potensial digunakan untuk pengembangan ekonomi NTT. Potensi sumber daya ikan laut cukup besar yaitu sekitar 365,7 metrik ton/tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 292,2 metrik ton/tahun sedangkan tingkat pemanfaatan baru sekitar 30%. Potensi pengembangan budidaya laut diperkirakan sekitar 5.150 Ha, dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 8,74% atau sekitar 450 Ha. Jenis produksi yang potensial adalah mutiara, rumput laut, teripang, budidaya tambak, ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, ikan karang, kerang-kerangan dan ikan hias laut. Selain itu, sumber daya pesisir dan laut juga potensial dikembangkan untuk wisata bahari dan serta jasa lingkungan laut lainnya. Beberapa persoalan yang mengancam sekarang di masa depan antara lain:

1. Potensi kelautan belum didayagunakan secara optimal. Pembagunan masih cenderung berorientasi ke darat. Walau wilayah NTT lebih banyak terdiri dari laut dan terdiri dari banyak pulau, sebagian besar laut dan pulau tersebut belum dikelola/dimanfaatkan.
2. Petani nelayan menggunakan peralatan tradisional. Pendapatan nelayan/masyarakat pesisir masih rendah. Sumbangan subsektor perikanan terhadap PAD masih rendah.
3. Banyak habitat di kawasan pesisir dan laut rusak seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun dan lain-lain. Terjadinya pencemaran yang berasal dari industri, pertanian, rumah tangga dan lain-lain. Pencurian dan pola penangkapan ikan yang merusak masih berlangsung menyebabkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati laut yang tinggi dan banyak flora dan fauna laut yang terancam punah. Masih terjadi pelanggaran dan perusakan sumber daya pesisir dan laut.
4. Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan kawasan pesisir dan laut masih rendah antara lain kerana kurangnya kesadaran akan pentingnya pesisir, tradisi hidup masyarakat pesisir

serta beberapa penyebab pengrusakan pesisir yang baru seperti sampah plastik, teknologi kenelayanan, dsb.

5. Belum selesai batas wilayah laut dengan beberapa negara tetangga. Sarana dan prasarana penegakan hukum di laut, jumlah dan kapasitas petugas pengawas masih kurang, sistim pengawasan dan partisipasi masyarakat dan koordinasi antar instansi masih lemah sehingga pengendalian dan pengawasan belum optimal.
6. Informasi mengenai wilayah pesisir dan laut terbatas. Riset dan pengembangan teknologi di bidang kelautan masih minim. Teknologi dan manajemen pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut masih kurang.
7. Kurang serasinya peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut.
8. Kurang berfungsinya kawasan konservasi laut dan meningkatnya jenis/genetik biota laut langka dan terancam punah.
9. Sumber daya pesisir dan laut di NTT sangat beraneka ragam, potensi ekonominya cukup tinggi untuk perikanan, pariwisata serta jasa lingkungan lainnya. Panjang garis pantai mencapai 5.700 km, memiliki kualitas perairan pantai yang relatif baik. Tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan baru sekitar 30%. NTT masih sangat berpotensi meningkatkan produksi perikanan dan kelautan; mengembangkan bahan pangan dan industri SDA pesisir dan laut dan pulau-pulau kecil.

II. 2 TANTANGAN

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Aspek Demografi

Apabila tingkat pertumbuhan penduduk berdasarkan data dasar 2004 (2,10%) terus berkembang secara linear maka pada tahun 2020 jumlah penduduk NTT mencapai 7.020.375 jiwa. Pertambahan penduduk tersebut yang lebih diterangkan oleh angka kematian dan kelahiran, kecuali migrasi. Apabila pertambahan penduduk tidak ditangani secara baik maka dalam 20 tahun mendatang akan terjadi tekanan penduduk, sedangkan daya dukung sumberdaya alam terus mengalami penurunan melalui pemerosotan terutama sumberdaya alam yang tidak terbarukan. Tekanan penduduk tersebut berdampak negative pada kelestarian sumberdaya alam, lingkungan, kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan melalui pelbagai kemiskinan.

Strategi pengendalian pertumbuhan penduduk lebih ditekankan pada parameter berkontribusi utama yang berkaitan secara runtut yaitu tingkat kesakitan, tingkat kematian (IMR, ASDR dan CDR) dan tingkat kelahiran (ASFR, TFR dan CBR). Jika parameter tersebut dapat diperbaiki secara signifikan maka rasio ketergantungan dan jumlah penduduk usia produktif menjadi lebih besar. Peluang perubahan parameter berada pada fungsi kualitas SDM yang diterangkan oleh peran variable pendidikan.

Penyebaran penduduk merupakan persoalan di masa depan manakala terjadi konversi peruntukan lahan produktif menjadi lahan pemukiman, pariwisata dan rekreasi. Penyebaran penduduk akan menuai masalah, apabila kepadatan agraris dan teknis tidak diatasi dengan cara memanfaatkan lahan tidur, darat terutama laut selain untuk bermukim terutama dalam diversifikasi usaha. Dalam bidang pertanian telah lama terjadi kemiskinan terutama alamiah dan kualitasnya semakin meningkat jika terjadi peningkatan kepadatan agraris yang berdampak *Law of deminishing return*, apalagi produksi dan produktivitas pertanian rendah.

Banyak ruang yang belum dimanfaatkan untuk kepentingan pemukiman dan sebagai ruang ekonomi/produktif. Terdapat peluang migrasi geografis untuk diversifikasi usaha melalui pemanfaatan ruang hidup baru di subsektor kelautan.

Masalah demografis 2020 adalah bagaimana strategi pengelolaan pertumbuhan penduduk yang masih tinggi dan penyebarannya melalui pengendalian faktor penentu utama yaitu tingkat morbiditas/penderitaan yang berkorelasi positif dengan tingkat kematian dan melalui transisi demografi berdampak pada penurunan tingkat kelahiran agar tercapai pertumbuhan yang semakin menurun yang berdampak pada migrasi internasional baik in-migration maupun out-migration (TKI) yang berkaitan dengan devisa, keamanan, identitas bangsa, dsb

2. Aspek Pendidikan

Tantangan aspek pendidikan ditunjukkan oleh masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia NTT berdasarkan parameter HDI/IPM. Rendahnya kualitas SDM tersebut dapat dilihat pada indikator rerata lama pendidikan dan angka buta huruf yang masih tinggi. Disamping itu kualitas lulusan yang belum memadai pada semua jenis dan jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Rerata lama pendidikan masyarakat NTT NTT baru mencapai 6,2 tahun sementara tingkat nasional mencapai 6,9 tahun pada tahun 2005. Angka buta aksara di NTT sebesar 14% dan berada di atas rerata nasional 11%. Kondisi menempatkan NTT pada kelompok 9 provinsi yang mempunyai persentase penduduk buta huruf yang tinggi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Banten, Papua, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. Rendahnya kualitas SDM tersebut di atas menempatkan NTT pada posisi daya saing lulusan SLTA secara nasional masih rendah. Pendidikan di NTT belum menghasilkan daya saing lulusan SMTA secara nasional, rasio R&D/1 juta penduduk dan jumlah paten yang dihasilkan. Pendidikan NTT belum menghasilkan paten (hak cipta) dan ekspor teknologi tinggi/manufaktur, karena itu, kualitas SDM NTT berdaya saing rendah pada skala

provincial dan nasional. Proporsi penduduk menurut usia dan jenjang pendidikan formal telah mengalami peningkatan secara relative tetapi tetap masih harus ditingkatkan. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan pada 2006 masih rendah dan dalam waktu 20 tahun kemudian (2020) APM pendidikan dasar baru berubah secara signifikan kecuali pendidikan menengah yang belum tinggi (SMTP 63,06, SMTA 48,33). Terjadi kelambanan peningkatan kualitas SDM, dan daya saing masyarakat NTT, kelambanan perubahan kesejahteraan. Rasio guru : murid, prasarana pendidikan : jumlah penduduk masih kurang.

Tantangan aspek pendidikan lainnya adalah sekalipun pendidikan dasar merupakan hak tetapi aspek pemerataan belum dipenuhi terutama untuk penduduk margin karena status ekonomi, ketidakadilan gender dan alasan isolasi geografis.

Pendidikan tetap berpeluang dikembangkan pada semua jenjang dan jenis atas dasar *life long education*. Jika dapat dipercepat peningkatan mutu pendidikan dan hasilnya diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama SSE (Status Sosial, Ekonomi) akan meningkat maka kualitas kesejahteraan meningkat dan pada gilirannya berdampak positif pada kualitas pendidikan dan hasilnya/lulusannya. Perbaikan prasarana transportasi membuka isolasi geografis yang berdampak positif terhadap pemerataan pendidikan terutama bagi kelompok terpencil.

Masalah utama pendidikan di NTT adalah 1) Pemerataan pendidikan (a) masih banyak lulusan yang tidak melanjutkan karena alasan ekonomi; (b) masih tinggi angka putus sekolah; (c) masih banyak siswa yang belum terjangkau layanan pendidikan. 2) Mutu pendidikan yang rendah (a) jumlah guru kurang; (b) pemerataan guru timpang; (c) dalam 5 tahun ke depan akan pensiun \pm 15% - 20% guru. 3) Sarana penunjang mutu terbatas : (laboratorium, perpustakaan, buku-buku, media pembelajaran; 4) Manajemen pendidikan yang belum optimal dilaksanakan oleh pengelola pendidikan dan lain-lain).

Masalah pendidikan yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang adalah bagaimana meningkatkan sediaan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan bermutu untuk diperdayagunakan dalam proses pembelajaran bermutu untuk menghasilkan keluaran pendidikan bermutu menurut jenis dan jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Peningkatan kesejahteraan guru perlu dilakukan. Efek yang diharapkan dari solusi ini adalah peningkatan daya saing masyarakat untuk memasuki persaingan dan membentuk jaringan perubahan pada aras nasional.

3. Sumberdaya Manusia

Tantangan pengembangan sumberdaya manusia berkaitan dengan 'kualitas' sumberdaya manusia. Bahwa kualitas sumberdaya manusia merupakan modal yang berenergi perubahan yang harus dikelola melalui *life long human development*. Rendahnya mutu sumberdaya manusia akan memicu daya saing bangsa dan dapat membidani dan melestarikan kemiskinan.

Kemungkinan peningkatan kualitas sumberdaya manusia cukup terbuka selain karena modal SDM dalam bentuk naluri hakiki manusia yang selalu menginginkan diri dan generasinya kemudian dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik, juga tersedia berbagai jenis dan jenjang pendidikan sekolah yaitu pendidikan akademik, professional dan vokasional/kejuruan, dan pendidikan luar sekolah. Peningkatan sediaan sarana dan prasarana pendidikan yang semakin meningkat semakin memperbesar kemungkinan dimaksud.

Selain itu, transformasi fungsional telah menghasilkan berbagai pekerjaan dan jabatan baru bagi sumberdaya professional berdaya saing. Tantangan terbesar dalam PSDM ke depan adalah kemiskinan dan proses SDM unggul berdaya saing kuat guna berpindah ke arah jalur sentral akibat hukum ekonomi pasar. Tantangan yang tidak kalah penting adalah krisis mutu SDM (involusi) pendidikan akademis S1, dan S2 yang disebabkan oleh penyelenggaraan pendidikan illegal, penjualan gelar akademis yang dimotivasi oleh aktualisasi diri khususnya pemenuhan

kebutuhan prestise. Pada sisi lain belum tersedia perangkat hukum positif pada tataran praksis untuk mengatur penyimpangan tersebut.

Masalahnya bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk memperoleh daya saing dalam kerangka peningkatan kualitas hidup. Perubahan sikap mental untuk memilih keutamaan prestasi bukan prestise akan mendorong terbentuknya SDM professional. Penyehatan iklim dan kondisi dunia usaha termasuk kepastian dan stabilitas politik dan keamanan dapat menjadi daya tarik bagi SDM berdaya saing tinggi untuk berpindah kembali dari jalur tengah/sentrum ke pinggiran/perifer.

4. Aspek Kesehatan

Kemiskinan dalam arti luas termasuk kemampuan ekonomi, kualitas lingkungan, dan pendidikan yang rendah menerangkan kualitas kesehatan masyarakat. Tingkat morbiditas/ penderitaan karena penyakit infeksi dan pernapasan masih tinggi, angka kematian juga masih tinggi, demikian pula penduduk berstatus gizi buruk. Bahwa rasio dokter:penduduk; paramedis:penduduk; rumah sakit:penduduk dan sarana kesehatan lainnya masih belum baik tetapi tetap berpeluang untuk mengalami perbaikan setiap tahun. Perubahan pendidikan dan kualitas SDM yang mudah-mudahan lebih cepat dari angka proyeksi 2020 akan mendorong percepatan perbaikan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan layanan kesehatan.

Pembangunan jangka panjang memerlukan program percepatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pengendalian variable-variabel yang menjadi bagian dari itu seperti kemiskinan, pendidikan dan mutu sumberdaya termasuk pendayagunaan perempuan sebagai kekuatan perubahan menuju masyarakat NTT yang sehat melakukan transformasi budaya menuju budaya hidup sehat dengan konsekwensi pemindahan sebagian biaya pemeliharaan kesehatan dari negara ke individu/rumahtangga agar tidak membebani keuangan negara).

5. Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Dengan adanya globalisasi, semua sekat kehidupan ditembus oleh perkembangan IPTEKS terutama teknologi informasi dalam masyarakat yang terbuka tanpa batas tidak lagi dapat hidup secara terisolasi, ada kecenderungan untuk berpijak dan berperilaku secara bebas keluar dari rambu-rambu agama, tradisi, adat istiadat dan tata hidup feodal, maka tantangan dalam pemberdayaan perempuan adalah status subordinasi/ketundukan perempuan di bawah subordinasi/kekuasaan laki-laki termasuk dalam domain perempuan dipedesaan, masih sangat kuat. Pendidikan belum berhasil secara signifikan mendorong percepatan perubahan ideologi gender untuk perubahan status perempuan. Dampak ketidak setaraan tersebut adalah adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi. Perempuan belum berakses sama dengan laki-laki untuk mengikuti pendidikan formal karena preferensi/keinginan laki-laki. Tantangan internal kelompok perempuan adalah relative merasa aman dengan posisi subordinasi dan status ketenagakerjaan bukan sebagai angkatan kerja, tetapi hanya sebagai penerima pendapatan suami. Preferensi/keinginan laki-laki masih mengekang perempuan mengaktualisasi diri melalui perdayagunaan modal SDM. Oleh sebab itu diperlukan grant design agar pemberdayaan perempuan dan anak tetap dalam bingkai Pancasila dan UUD 45.

Komposisi penduduk menurut seks menunjukkan bahwa wanita sedikit lebih banyak dari lelaki, tetapi distribusi tenaga kerja wanita di berbagai sektor terutama sektor politik masih sangat rendah. Ada peluang yang terbuka untuk aktualisasi status dan peran perempuan yaitu potensi sumberdaya perempuan secara populatif dan berbagai peraturan dan tata tertib yang telah dilegalkan dalam kerangka pemberdayaan perempuan.

6. Aspek Pembangunan Budaya

Benturan budaya dan antar pelaku budaya masih cukup terasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat di Nusa Tenggara Timur. Perbedaan nilai dan

norma budaya dalam kemas sistem kultural masih salah difungsikan sebagai pemicu fanatisme. Benturan dan keretakan/pengkotakan akan menguras energi pembangunan melalui persaingan yang menekan motivasi bersaing. Mestinya kemajemukan dan perbedaan dapat digunakan sebagai faktor kekuatan menginstitusionalisasi persatuan.

Masalah yang dihadapi oleh pembangunan masa depan NTT adalah bagaimana mensinergikan modal sosial budaya, yaitu kepelbagaian, solidaritas mekanistik, komunalisme, kohesi social, jaringan social budaya dan interaksi budaya untuk menghasilkan energi penguatan dan pengembangan budaya agar eksis dalam perubahan untuk menghilangkan alienasi budaya yang berdampak negatif dalam bentuk komunitas global dan budaya global yang mereduksi jatidiri bangsa.

Bagaimana mempertahankan jatidiri bangsa dari terpaan globalisasi telekomunikasi dan informasi agar walaupun masyarakat wilayah ini masuk dalam interaksi kehidupan global tetapi tetap memiliki identitas ke Indonesiaan. Bangsa ini tidak perlu menjadi asing di negerinya sendiri atau sebagai tamu di rumahnya hanya karena mengadopsi identitas global karena ingin menjadi manusia global.

Bagaimana mengubah kekeliruan asumsi bahwa peran budaya bersifat tidak menentukan karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan gagasan factor lain. Karena itu budaya harus digunakan sebagai salah satu kekuatan perubahan, ini masalah pembangunan aspek budaya ke depan.

B. Ekonomi

1. Pembangunan perekonomian belum terintegrasi dengan baik terlihat dari tidak terdorongnya kemajuan industri sekalipun aktivitas meningkat relatif terhadap pendapatan domestik. Tantangan pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur adalah bagaimana mengintegrasikan secara spiral (bergerak melingkar tetapi berkembang) pembangunan pada sektor primer, sekunder dan tersier sehingga pertumbuhan sektor primer mendorong pertumbuhan sektor sekunder, dan bersama-sama keduanya mendorong sektor tersier.

2. Dalam aspek pengembangan kebijakan revitalisasi pertanian, tantangan pembangunan ekonomi adalah bagaimana mengefektifkan kebijakan pembangunan nasional dalam revitalisasi pertanian melalui pembangunan pertanian spesifik wilayah yang sesuai dengan potensi semi-arid (semi kering) dan kelautan Nusa Tenggara Timur serta aspek sosial budayanya.
3. Dalam aspek perilaku ekonomi, pergulatan antara kepentingan pembangunan ekonomi modern dengan kepentingan mempertahankan eksistensi suku bangsa di Nusa Tenggara Timur masih akan terus menjadi tantangan yang berat. Upaya-upaya masa depan dalam mendorong pergeseran perilaku produksi, investasi, menabung dan konsumsi ke arah yang lebih memungkinkan terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi di tengah-tengah masyarakat memerlukan strategi berwawasan ekologi manusia sehingga terjadi keselarasan ke arah yang positif.

Rendahnya pendapatan per kapita dan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat merupakan akumulasi dari perilaku sosial ekonomi selama dasawarsa (10 tahun) terakhir. Jika tidak ada intervensi yang mendorong perilaku ke arah investasi kapital dan curahan kerja yang lebih efisien, maka kemiskinan terus meningkat adanya tantangan untuk mengintegrasikan perekonomian NTT ke dalam perekonomian nasional di satu pihak dan keharusan untuk memelihara ekonomirakyat di lain pihak agar tidak terlalu banyak pelaku ekonomi kerakyatan yang tertinggal/dikorbankan.

4. Pada aspek ketenagakerjaan, 63% pekerja di NTT bekerja <15 jam/minggu, dan hanya 15% pekerja bekerja >41 jam, (BPS, 2002). Ada indikasi bahwa curahan kerja tersingkat dikontribusikan oleh aktivitas pertanian di mana 82% pekerjanya tergolong miskin. Dari aspek dinamisnya, 85% kepala keluarga di keluarga miskin berpendidikan sebatas SD, hal mana menjadi penghalang adopsi lompatan manajemen pertanian lahan kering.

Tantangan aspek ketenagakerjaan adalah bagaimana menciptakan angkatan terampil bermotivasi kerja tinggi

yang pada gilirannya mencurahkan waktu, daya dan inovasi bagi penciptaan produksi bernilai tinggi yang cukup untuk memutuskan mata rantai kemiskinan.

Jika investasi pada bidang pendidikan SDM serta investasi IPTEK tidak dilaksanakan dengan bijaksana dan berkelanjutan, maka kualitas SDM dan sumberdaya teknologi akan menurun, terbentuk rantai kemiskinan yang makin kuat yang pada gilirannya memposisikan penduduk berusia produktif sebagai beban pembangunan dan persaingan dengan expatriat dalam kualitas pengetahuan dan keterampilan jejaring kerja dan politik luar negeri negara maju.

5. Pada aspek kapital, rendahnya ketersediaan dan keteraksesan terhadap lembaga keuangan telah menghambat upaya pencapaian skala usaha ekonomis. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengakselerasikan ketersediaan lembaga keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat yang memungkinkan ketersediaan lembaga keuangan di pedesaan.

Tantangan keteraksesan perbankan bukan hanya oleh jarang tersedianya lembaga tersebut namun juga karena tingginya suku bunga kredit yang ditawarkan (sampai 99% per tahun) relatif kepada pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur (<10% per tahun). Solusi ke depannya adalah pada penciptaan sistem perkreditan yang memungkinkan peranan perbankan sebagai lembaga intermedia yang pro investasi.

6. Pada aspek SDA, tantangan terbesarnya adalah bagaimana memposisikan kondisi semi-arid (semi-kering) Nusa Tenggara Timur sebagai potensi dan bukannya kendala semata. Secara simultan dengan pembangunan aspek ketenagakerjaan dan kapital, keunikan semi-arid Nusa Tenggara Timur tersebut harus menjadi alat pencarian kebijakan pembangunan pertanian spesifik wilayah.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mengejewantahkan potensi sumberdaya pesisir dan laut ke dalam aktivitas ekonomi produktif sehingga terjadi optimalisasi penggunaan sumberdaya pesisir dan laut.

Terkait dengan bahan tambang bernilai tinggi, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan aktifitas pertambangan yang telah dimulai dalam dasawarsa terakhir sehingga optimalisasi eksplorasi dan eksploitasi deposit tersebut.

7. Pada aspek teknologi, tantangan 20 tahun ke depan adalah bagaimana mengembangkan sistem mekanisasi pedesaan di mana aktivitas-aktivitas produksi di pedesaan sudah harus bergeser dari sistem manual semata ke sistem yang lebih mekanik. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan ketersediaan dan keteraksesan energi yang memadai. Dalam kaitan dengan ketersediaan energi, penyediaan bahan bakar nabati menggunakan minyak jarak, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit perlu terus dikembangkan dan diimpelemtasikan sehingga secara bertahap pedesaan di Nusa Tenggara Timur menikmati manfaat mekanisasi.

C. Sarana dan Prasarana

1. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat di NTT dapat dicapai lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan seperti mengurangi kebocoran dana dalam pelaksanaan; perbaikan sistim/management pelaksanaan proyek; mempertajam skala prioritas pembangunan; meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan penciptaan sumber dana baru. Tantangannya adalah karena sebagian besar wilayah NTT mempunyai topografi berbukit-bukit, memiliki tingkat kelerengan yang curam sehingga secara umum prasarana jalan dan jembatan rawan longsor, erosi dan bencana alam lainnya). Selain itu, juga rawan akan kecelakaan lalu lintas. Akses transportasi darat dari desa ke kota banyak yang berada di wilayah medan yang sulit (curam dan perbukitan).
2. Peranan transportasi laut dalam perekonomian NTT diperkirakan akan semakin penting dalam 20 tahun mendatang. Terutama dalam mendukung mobilitas barang dalam perdagangan antar pulau, provinsi dan eksport-

import. Hal ini sesuai dengan posisi geografi NTT sebagai provinsi kepulauan dan dekat dengan beberapa negara tetangga. Peluang yang dapat dikembangkan di masa mendatang adalah meningkatkan volume transportasi laut dari berbagai wilayah di NTT ke berbagai wilayah di Negara Timor Leste untuk meningkatkan volume perdagangan. Membuka jalur transportasi laut dari beberapa wilayah di NTT dengan beberapa wilayah di Australia untuk mendukung ekspor terutama hasil-hasil pertanian NTT.

Tantangannya adalah, karena NTT merupakan provinsi kepulauan, di mana sebagian besar wilayahnya terdiri dari pulau yang satu sama lainnya dipisahkan oleh laut. Transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pergerakan orang dan barang masuk dan keluar NTT. Analisis proyeksi ancaman di bidang transportasi laut di masa mendatang adalah terjadinya kecelakaan laut seperti kapal tenggelam, tabrakan dan kandas akibat ombak dan cuaca buruk. Terjadinya perubahan iklim global menyebabkan terjadinya perubahan cuaca yang kadang sulit diprediksi dan diperkirakan akan mempengaruhi efektifitas dan keamanan transportasi laut di masa mendatang. Utilitas dermaga yang ada juga akan terpengaruh akibat terjadinya perubahan iklim global tersebut. Selain itu, transportasi laut juga rawan kecelakaan, keamanan dan perdagangan ilegal seperti ilegal fishing, ilegal logging dan ilegal BBM melalui laut terutama ke beberapa negara tetangga terdekat khususnya Timor Leste.

3. Peranan transportasi udara dalam perekonomian NTT diperkirakan akan semakin penting dalam 20 tahun mendatang, terutama dalam mendukung mobilitas penduduk, ekspor-import dan pariwisata. Hal ini sesuai dengan posisi geografi NTT yang dekat dengan beberapa negara tetangga khususnya Timor Leste dan Australia; perairan pesisir dan laut serta budaya NTT yang sangat berpotensi dalam pariwisata serta posisi NTT yang dekat dengan Pulau Bali. Sejumlah bandara di NTT diperkirakan berpotensi untuk berkembang menjadi bandara Internasional. Jalur penerbangan ke Timor Leste dan ke

beberapa negara bagian di Australia sangat berpotensi untuk dikembangkan. Peranan transportasi udara dalam angkutan barang, khususnya barang bernilai ekonomi tinggi diperkirakan akan meningkat terutama ke Indonesia bagian barat dan ke beberapa negara tetangga terdekat. Tantangannya adalah bahwa transportasi udara secara umum rawan akan kecelakaan karena sebagian besar bandara berada atau dekat dengan area perbukitan; umumnya sarana dan prasarana bandara masih minim dan sering terjadi perubahan cuaca di NTT. Selain itu, juga rawan akan pelanggaran batas udara karena posisi NTT yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga.

4. NTT sangat berpeluang untuk meningkatkan akses terhadap air bersih; meningkatkan pasokan sesuai kebutuhan, meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih dan meningkatkan jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum perpipaan. Masih terdapat sejumlah sumber air yang belum dikembangkan di NTT. Sumber daya air yang ada masih berpotensi untuk dikembangkan produktifitasnya, seperti peningkatan debit air dengan cara mengkonservasinya. Efisiensi pemanfaatan air saat ini masih cukup potensial untuk ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat dan badan usaha lainnya dalam penyediaan air bersih masih dapat ditingkatkan di masa mendatang. Propinsi NTT sangat berpeluang untuk meningkatkan akses terhadap kebersihan. Kondisi NTT saat ini belum mengalami kendala yang signifikan dalam masalah sanitasi dan persampahan, sehingga masih relatif mudah dalam perencanaan pengelolaan di masa mendatang. Jika kegiatan konservasi tidak dilakukan, maka NTT rawan akan terjadinya krisis air bersih. NTT merupakan wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan keadaannya relatif basah sedang 8 bulan lainnya relatif kering sehingga rawan akan kekurangan air. Banyaknya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan memicu berbagai jenis penyakit. Selain itu, minimnya ketersediaan air dapat mengurangi minat investor untuk menanam modal di NTT. Selain itu, ketidakmampuan pemerintah menyediakan air

bersih yang harganya terjangkau masyarakat dapat memicu masyarakat mengkonsumsi air yang tidak higienes. Banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi dapat mengurangi kesehatan masyarakat dan memicu berbagai jenis penyakit terutama penyakit menular.

5. Peningkatan produktifitas hasil pertanian masih cukup potensial untuk dikembangkan di NTT di masa mendatang dengan meningkatkan luas lahan beririgasi dengan memanfaatkan sumberdaya air yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan bendungan, embung dan sarana dan prasarana irigasi lainnya pada berbagai lahan kering potensial. Jumlah lahan tidur dan lahan kritis yang potensial untuk diubah menjadi area produktif masih cukup besar di NTT. Peningkatan luas lahan beririgasi di NTT dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya air yang ada melalui pembangunan bendungan, embung dan saluran irigasi lainnya. Jumlah lahan tidur dan lahan kritis yang berpotensi diubah menjadi area produktif cukup besar di NTT. Jika usaha peningkatan produksi hasil pertanian melalui peningkatan luas lahan beririgasi gagal maka dapat mengakibatkan adanya kekurangan pangan dan gizi buruk masyarakat. Selain itu, dapat berakibatkan banyaknya pengangguran di pedesaan.
6. Provinsi NTT mempunyai peluang untuk meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik terutama pembangkit listrik non BBM. Mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi energi biogas, biomassa, energi matahari, arus laut dan tenaga angin. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan energi listrik terutama untuk masyarakat yang berada di pedesaan dapat dipenuhi. Sesuai dengan kondisi klimatologi/iklim NTT dan luasnya laut NTT, penggunaan energi surya, laut/gelombang dan angin misalnya sangat potensial untuk dikembangkan di NTT. Hal ini akan dapat mengatasi masalah luasnya wilayah NTT yang berbentuk kepulauan dengan densitas/kepadatan penduduk yang bervariasi yang menyulitkan pengembangan sistim kelistrikan PLN

konvensional. Luasnya wilayah NTT yang berbentuk kepulauan dengan densitas/kepadatan penduduk yang bervariasi menyulitkan pengembangan sistem kelistrikan PLN. Jika peningkatan penyediaan energi listrik gagal maka banyak rumah tangga, industri, perkantoran, perhotelan dan lain-lain akan tidak mendapat penyediaan listrik. Banyak industri rumah tangga yang berhenti beroperasi karena terbatasnya sumber daya listrik PLN dan sering terjadi pemadaman. Banyak anggota masyarakat terutama yang berada di pedesaan belum mendapat layanan listrik.

7. Provinsi NTT mempunyai peluang untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peningkatan komitmen pada seluruh pemangku kepentingan. Kegagalan dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan akan menyebabkan minimnya derajat kesehatan masyarakat di NTT dan rendahnya kualitas SDM di NTT.
8. Peningkatan kepemilikan rumah dan fasilitas pemukiman potensial untuk dikembangkan di NTT. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan rumah dan melibatkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan rumah. Kegagalan pembangunan di bidang pemukiman akan berakibatkan banyaknya penduduk yang tidak memiliki rumah, terjadinya pemukiman kumuh terutama di perkotaan dan rendahnya kualitas pemukiman di kawasan pesisir dan pantai dan pedesaan.
9. Dalam 20 tahun mendatang diperkirakan pemanfaatan telekomunikasi, Teknologi Informasi (TI), penyiaran dan lain-lain di NTT akan meningkat pesat. Akses informasi ke seluruh pelosok NTT dan akses ke wilayah nasional dan Internasional akan meningkat. Investasi dalam penyediaan infrastruktur di bidang telematika terutama dari swasta di NTT diperkirakan akan meningkat karena saat ini masih terdapat sejumlah wilayah potensial di NTT yang belum dikembangkan dan cukup menarik dalam investasi. Selain itu, oleh karena akibat semakin berkembangnya

perekonomian di NTT, maka kebutuhan akan teknologi telekomunikasi dan telematika juga meningkat. Akan terjadi perubahan yang terkait dengan masalah keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi. Selain itu, akan meningkat kejahatan dengan menggunakan informasi teknologi telematika.

D. Politik dan Pemerintahan

1. Diperkirakan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, nilai – nilai sosial budaya yang menjadi lem perekat (kohesi sosial) persatuan dan kesatuan masyarakat di NTT akan mengalami degradasi karena tergeser oleh peradaban baru yang bersifat universal.
2. Harapan terhadap sistem politik demokratis yang akan membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih tertib, aman, adil, transparan, bertanggungjawab, dan sejahtera dapat menjadi ancaman bila hal tersebut tidak terjadi. Masyarakat akan berpaling kembali kepada sistem politik yang otoriter karena dipandang lebih memberikan rasa aman dan nyaman, sering terjadi antagonisme dan konflik antara kekuatan pembaharu dan kekuatan yang ingin mempertahankan hegemoni kelompok tua/status quo.
3. Isyarat terhadap otonomi daerah yang berlaku di negara kita adalah bahwa melalui otonomi daerah, masyarakat akan menjadi lebih sejahtera, namun bila hal tersebut tidak terjadi, maka diduga akan menjadi ancaman yang serius bagi otonomi daerah itu sendiri. Salah satu ancaman serius yang sudah dapat dipastikan ialah kembali berlakunya sistem sentralistik.
4. Kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah yang kurang profesional dapat mengancam perkembangan industri pariwisata (waktu 20 tahun yang akan datang di provinsi ini).
5. Diduga terbatasnya anggaran pemerintah daerah menjadi ancaman bagi DPRD untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam rangka mengajukan rancangan peraturan daerah.

6. Hambatan – hambatan sosial budaya merupakan ancaman bagi kaum perempuan untuk aktif dalam bidang politik serta dipercaya menduduki jabatan – jabatan politik dan publik, di samping kesiapan sumber daya perempuan yang relatif masih terbatas.
7. Selaku provinsi dengan banyak pulau, hubungan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi antar pulau merupakan prasyarat utama yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam rangka pelayanan publik. Pemenuhan terhadap tuntutan ini sudah barang tentu tidak mungkin menjadi beban pemerintah daerah sendiri, namun menjadi beban dan tanggungjawab pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah serta swasta berdasarkan prinsip–prinsip saling menguntungkan dengan didasarkan pada regulasi–regulasi yang jelas dan transparan akan sangat mendukung terpenuhinya pelayanan publik yang baik. Hanya dengan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi yang memadai–lah yang akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar mobilitas sosial, komunikasi politik, budaya, serta hubungan antar manusia. Sampai saat ini sarana dan prasarana transportasi tersebut belum memadai.
8. Tergesernya nilai – nilai budaya lokal oleh peradaban baru yang bersifat universal perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi melahirkan konflik horizontal yang berlabel SARA. Konflik yang terjadi diperkirakan dapat merengangkan hubungan–hubungan sosio kultural yang telah melembaga sementara nilai–nilai baru yang diharapkan berperan membimbing sikap dan perilaku masyarakat sedang berproses ke arah tersebut.
9. Tumbuhnya demokrasi berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan penduduk yang makin baik, mobilitas sosial yang tinggi, budaya politik yang partisipan, serta kemauan politik yang besar dan kuat dari semua elemen masyarakat, pemerintah dan swasta. Hingga saat ini, elemen–elemen penting tersebut belum tumbuh dan berkembang secara baik.

10. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah telah membuat ketergantungan yang sangat tinggi dengan pemerintah yang menjadi sulit dilepaskan. Alhasilnya, otonomi daerah tidak lebih daripada sebuah cita-cita politik ketimbang menjadi sebuah kenyataan.
11. Kemauan kaum perempuan untuk terlibat dalam dunia politik cukup tinggi, namun kemauan tersebut belum cukup kuat untuk menggeser pandangan sosial budaya masyarakat terhadap posisi perempuan dalam struktur sosial. Alhasilnya, target 30 persen untuk diposisikan dalam lembaga – lembaga politik relatif masih sulit terpenuhi.
12. Harapan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik dan pemerintahan untuk mengakomodir tuntutan-tuntutan mereka cukup tinggi, namun hal tersebut belum didukung oleh kemampuan kelembagaan yang memadai.
13. Perampingan struktur birokrasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di provinsi NTT disebabkan antara lain karena berkaitan erat dengan aparatur birokrasi yang masih lebih kuat berorientasi kepada jabatan struktural ketimbang jabatan fungsional.
14. Profesionalisme, kualitas dan kompetensi SDM aparatur birokrasi pemerintah provinsi belum dioptimalkan secara penuh.

E. Hukum dan HAM

1. Tantangan masa depan dalam bidang hukum adalah bagaimana mewujudkan sistem hukum [struktur, substansi dan kultur] yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan terwujudnya HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran. Kesepahaman akan penentuan definisi operasional dari keadilan dan kebenaran yang dijadikan orientasi sikap ditingkatkan. Keadilan dan atau ketidak-adilan hukum dapat terjadi pada dua aras yaitu substansi dan prosedur. Keadilan memiliki dua batas, yaitu ‘batas dalam’ pada aplikasi asas legalitas dan ‘batas luar’ pada respons atas kepentingan umum. Pandangan paling mutakhir tentang kebenaran secara eksplisit meragukan adanya kebenaran absolute; yang ada

adalah cara-cara yang berbeda untuk mengungkapkan kebenaran.

2. Tantangan masa depan dalam bidang HAM adalah bagaimana merancang strategi yang jelas guna meredam masalah tersebut, yang tentunya didukung oleh riset hukum yang valid dan konseptual guna menemukan dan menjawab respons-respons hukum dan non hukum. Untuk itu, modal dasar yang dipersiapkan adalah peningkatan SDM di kalangan akademis, politisi, penegak hukum dan LSM di NTT.

F. Geomorfologis, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Jika permasalahan-permasalahan terkait SDA dan lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur tidak diselesaikan secara bijaksana, maka diperkirakan akan memicu pada krisis pangan, air dan energi. Hal ini diterangkan oleh pemikiran berikut:

1. Pada 20 tahun ke depan, akibat penambahan jumlah penduduk, kebutuhan pangan, papan dan sandang akan meningkat. Hal ini akan menuntut peningkatan lahan pertanian, meningkatnya deforestasi/penghilangan hutan yang dapat mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air, ketersediaan air, debit air serta pasokan air.
2. Pada 20 tahun ke depan, jumlah industri dan kegiatan ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan pencemaran air, sungai, tanah, udara, B3, pesisir dan laut dan lain-lain akan meningkat. Di perkotaan, akan terjadi perumahan kumuh akibat terkonsentrasinya penduduk yang dapat meningkatkan sampah perkotaan, polusi udara perkotaan dan meningkatnya penggunaan bahan perusak ozon.
3. Pada 20 tahun ke depan, akan terjadi perubahan gaya hidup masyarakat yang konsumtif. Akan meningkat pemanfaatan keanekaragaman hayati tidak semestinya. Akan meningkat pula kerusakan lingkungan. Akan meningkat pula jumlah lahan/kawasan Kritis.
4. Meningkatnya jumlah flora dan fauna yang terancam punah.

5. NTT akan mengalami kekurangan suplai/produksi kayu, dan harga kayu akan sangat mahal. Luas hutan tanaman industri (HTI) sebagai basis pengembangan ekonomi-hutan masih rendah.
6. NTT akan mengalami kekurangan suplai/produksi air, baik untuk kehidupan sehari-hari, irigasi maupun ternak. Hal ini disebabkan oleh masih terjadinya pengrusakan atau pemanfaatan sumber air yang tidak bertanggung jawab, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumberdaya air. Usaha untuk memulihkan sumber air yang mengalami pengrusakan masih kurang. Teknologi tepat guna dalam pemanfaatan air secara efisien akan berkembang.
7. Meningkatnya peluang terjadi pelanggaran dan perusakan sumber daya pesisir dan laut
8. Meningkatnya jenis/genetik biota laut langka dan terancam punah
9. Meningkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar (danau, situ, perairan umum), dan pulau-pulau kecil;
10. Meningkatnya potensi konflik batas laut dengan negara tetangga

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005 - 2025

VISI

Berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan menurut perkembangan selama dasawarsa terakhir, serta memperhatikan berbagai kemajuan, tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa ke depan maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut :

NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945.

Visi ini merupakan jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi Pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kedudukan dan susunan kedua visi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena merujuk pada tujuan yang sama.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bersifat umum, abstrak dan tidak operasional karena itu perlu secara bertingkat ke bawah dilakukan penjabaran ke tataran operasional melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Hanya dengan cara tersebut maka dapat ditentukan petunjuk keberhasilan pembangunan untuk mempermudah proses evaluasi, khususnya pengukuran dan interpretasi kemajuan, kemandirian dan keadilan yang dicapai dalam rentang waktu program tersebut.

Kemajuan

Kemajuan, kemandirian dan keadilan adalah kualitas karakter dari konsep yang lazim dipergunakan dalam pembangunan. Tiga konsep dasar tersebut menjadi prerequisite integral dari satu visi pembangunan artinya keberhasilan pembangunan selain memenuhi ukuran dan makna secara ekonomi, sosial, budaya, politik, IPTEKS dan pertahanan keamanan, juga kemajuan harus bermuara pada kemandirian dalam interaksi global dan memberikan keadilan kepada semua lapisan, kelompok dan anggota masyarakat dan bangsa. Visi pembangunan nasional dan daerah tidak ingin mencapai kemajuan yang tidak berkeadilan, atau kemajuan yang berasal dari mewariskan ketergantungan pada sumber-sumber pembiayaan atau sumber-sumber perubahan eksternal bangsa, sekalipun tidak terhindarkan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan negara baik secara regional maupun internasional.

Kemajuan suatu bangsa dan masyarakat dapat diukur dari berbagai bidang dan aspek. Ukuran kemajuan secara ekonomi menggunakan tingkat kemakmuran yang berindikator tingkat pendapatan dan distribusinya menurut golongan pendapatan. Peranan industri manufaktur sebagai penggerak kemajuan ekonomi juga dapat diduga melalui jumlah dan besaran sumbangannya terhadap kemakmuran. Bahkan industri IPTEK digunakan untuk mengukur tingkat daya saing bangsa.

Pengukuran kemajuan masyarakat juga diukur dari aspek sosial. Pada umumnya ukuran itu menggunakan variable nilai tambah sebagai fungsi sinergi modal sosial. Nilai tambah sosial merupakan sumbangan peran faktor kualitas sumberdaya manusia berindikator IPM dan diukur dari tingkat daya saing bangsa/masyarakat berindikator rerata, kumulatif tingkat pendidikan masyarakat dan APM serta jumlah produk IPTEKS yang dipatenkan serta jumlah industri manufaktur hasil kajian penelitian dan pengembangan yang diekspor. Kualitas kesehatan masyarakat juga dapat digunakan sebagai indikator kemajuan sosial antara lain dengan indikan angka morbiditas dan kualitas kesehatan. Kemajuan dari aspek kependudukan diukur dari pertumbuhan penduduk yang terus menurun karena penurunan angka kelahiran, kematian dan migrasi.

Kemajuan suatu masyarakat dari segi politik dapat diukur dari kualitas kehidupan berdemokrasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, kesehatan organisasi kelembagaan politik baik lembaga perwakilan, lembaga penghubung atau partai politik dan kualitas pelaku politik di lembaga suprastruktur politik maupun subordinasinya. Kemajuan politik secara proyeksi dapat diduga menggunakan kualitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpolitikan dan kualitas produk lembaga politik.

Kemandirian

Kemandirian tidak mengandung pengertian kesendirian dan keterisolasian dari interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan masyarakat. Dalam pergaulan antar bangsa yang semakin mengglobal, tidak ada lagi masyarakat yang mampu hidup dalam kesendirian dan keterisolasian. Bahkan manajemen transformatif menggunakan networking sebagai variable yang dapat memberi nilai tambah yang lebih bermakna di banding keunggulan sendiri.

Kemandirian adalah hak dan tanggung jawab untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu apa yang dianggap baik dan bermanfaat bagi dirinya dan bagaimana cara mencapainya agar bangsa dapat bertumbuh dan hidup sejajar dengan bangsa lain. Karena itu kemandirian tidak diinterpretasi secara fisik-geografis melainkan secara filosofis yaitu hak dan tanggung jawab menentukan nasib sendiri.

Pembangunan daerah selain bertujuan mencapai kemajuan tetapi juga harus mencapai kemandirian. Kemandirian masyarakat mensyaratkan kemampuan dan daya saing ekonomi wilayah selain ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang dapat bersaing dalam interaksi regional, nasional dan internasional. Kemandirian sudah harus mengalihkan titik berat pilihan landasan dari kekuatan modal sumberdaya alam (*natural resources capital*) ke modal sumberdaya manusia (*human resources capital*) untuk menghasilkan kemampuan ekonomi yang dipergunakan untuk mencapai kemandirian.

Fakta ekonomi menunjukkan masyarakat belum mandiri dalam kehidupan di bidang ekonomi. Pembiayaan pembangunan daerah

masih sangat tergantung pada sumber-sumber pembiayaan eksternal. Wilayah ini belum mandiri dalam bidang ekonomi dan hal ini berdampak pada posisi tawar politik dalam interaksi politik. Kemandirian antara lain diukur dari berapa besar ketergantungan pembangunan pada kekuatan sendiri dan seberapa kuat keberhasilan pembangunan ekonomi mendukung kemajuan dan kemandirian masyarakat dan wilayah ini.

Kemandirian juga dapat diukur dari sikap masyarakat dan bangsa untuk dengan semangatnya menyelesaikan sendiri semua persoalan di berbagai bidang. Kemandirian dalam politik tercermin dalam sikap terhadap penyelesaian masalah politik internal maupun antar bangsa. Namun sering ketidakmandirian secara ekonomi melemahkan kemandirian politik bahkan dapat merambat ke bidang-bidang yang lain.

Keadilan dan Kemakmuran

Keadilan menunjuk pada suatu keadaan dimana di dalam kehidupan masyarakat di segala bidang tidak dipraktekkan diskriminasi golongan, strata, gender dan wilayah; standar ganda, ketidaksamaan akses terhadap penguasaan faktor perubahan, dan sebagainya. Program Pembangunan Jangka Panjang Nusa Tenggara Timur adalah program pembangunan kerakyatan artinya pembangunan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat.

Pembangunan yang berkeadilan tidak berwajah komutatif melainkan lebih bersifat distributif – demokratis.. Pembangunan berkeadilan menunjuk pada adanya kesempatan yang sama pada semua individu untuk mengalami, mengikuti, berpartisipasi dalam berbagai bidang untuk mencapai peningkatan kualitas hidup. Pengukuran keadilan dalam bidang pendidikan menggunakan indicator pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan khususnya pendidikan dasar yang merupakan hak, terutama bagi golongan margin ekonomi, gender dan isolasi geografis.

Keadilan dalam bidang kesehatan diukur dari kesempatan setiap individu untuk memperoleh layanan kesehatan dengan mutu yang sama termasuk akses ke sumber-pelayanan kesehatan. Keadilan di bidang hukum menunjuk pada kesempatan setiap subyek hukum baik individu maupun institusi untuk diperlakukan sama di hadapan

hukum, untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dan untuk memperoleh rasa adil.

Keadilan politik diukur dari kualitas kehidupan demokrasi politik dalam berbagai dimensi dan aktivitas politik. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, keadilan diukur dari kedudukan dan peran serta setiap individu dalam tugas bela Negara dan pertahanan keamanan. Salah satu yang terpenting adalah keadilan dalam menikmati, memelihara hasil pembangunan dan memikul resiko pembangunan di berbagai bidang.

Adil dan makmur merupakan kondisi ideal yang diharapkan setiap masyarakat NTT di masa akan datang, maka untuk mewujudkannya regulasi pemerintah tentang memberikan kepada setiap masyarakat NTT segala sesuatu menjadi haknya yang semestinya diterima secara sosial, politik, ekonomi dan hukum sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar dan bertanggungjawab ke arah kemakmuran masyarakat merata melalui produksi terus menerus meningkat dan pendapatan masyarakat tersebar secara merata serta adil kepada semua penduduk sehingga daya beli masyarakat dapat bertambah pula. Kemakmuran dapat dicapai melalui membangun ekonomi yang kokoh secara bertahap, kongkrit dan realistis serta berkelanjutan.

MISI

Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, dapat dilaksanakan melalui agenda :**
 - Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
 - Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi-pekerti terpuji.
 - Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku,

sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

- Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
- Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global, dilakukan melalui agenda :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
- Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
- Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.

3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum, dapat dilaksanakan dengan agenda :

- Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.

- Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
 - Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
 - Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
 - Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.
- 4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, dapat dilakukan melalui agenda :**
- Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
 - Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT
 - Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.
- 5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan, dapat dilakukan melalui agenda :**
- Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
 - Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
 - Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
 - Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan
 - Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

6. **Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat,** dapat dilakukan melalui agenda :
- Memosisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmitter/penyebar, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.
7. **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim,** dapat dilakukan melalui agenda :
- Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
 - Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

BAB IV

ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2005-2025

4.1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah **Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia** sebagai jabaran dari tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual. Visi pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam arah pembangunan jangka panjang sebagaimana berikut.

4.1.1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA DAN BERADAB BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA

1. Pembangunan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya meletakkan dasar bagi perwujudan identitas dan karakter pembangunan nasional serta kesadaran budaya yaitu kesadaran terhadap kepelbagaian budaya, suku, ras, agama, golongan untuk membangun toleransi, solidaritas, suasana harmonis dan menghindari benturan, diskriminasi dan friksi.
2. Pembangunan agama untuk menguatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mewujudkan agama sebagai peletak moral dan etika pembangunan, membina akhlak, membentuk ethos kerja dan sebagainya. Pembangunan agama akan mendorong toleransi dan kerukunan kehidupan beragama dan hidup berdampingan yang aman dan serasi,
3. Pembangunan moral, etika dan budaya untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial budaya yang berciri Indonesia yang meletakkan dasar bagi pembentukan kepribadian yang taat terhadap kode etik bermasyarakat, berprofesi dan berinteraksi dalam berbagai bidang,

sekaligus untuk membentuk karakter masyarakat dan aparaturnya yang bersih dan berwibawa dalam kerangka pemerintahan yang bersih.

4. Pembangunan budaya untuk menghasilkan ketahanan budaya dan mengembangkan budaya nasional dan daerah mencakup pembentukan masyarakat religius, pembentukan perilaku budaya, pengembangan kreasi budaya baru baik nasional maupun lokal melalui inovasi budaya, pengembangan kearifan budaya lokal, pelestarian budaya dan pengungkapan kreativitas melalui kesenian dalam kerangka membentuk manusia budaya yang berkeimbangan secara material dan spiritual.
5. **Penemuan kembali** (*recovery*), pendataan, pembelajaran kembali dan pelestarian budaya lokal sebagai akar dari budaya nasional agar dengan demikian dapat membangun satu mekanisme komunikasi lintasbudaya yang mampu memperkokoh ketahanan nasional.

4.1.2. MEWUJUDKAN MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING GLOBAL

4.1.2.1. Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas

1. Untuk mencapai Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan berdaya saing dalam era globalisasi maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi yang nilai tambah profesionalnya dapat ditawarkan ke ruang persaingan pada skala nasional dan global. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara berkelanjutan merupakan syarat mutlak. Untuk itu pembangunan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat. Pertumbuhan penduduk dengan menunjukkan NRR (*Net Reproduction Rate*) sebesar 1 atau TFR (*Total Fertility Rate*) NTT sebesar 3,49 harus diturunkan ke 2,1
2. Pertumbuhan penduduk dikendalikan melalui kebijakan angka kelahiran yang ditentukan oleh angka kematian. Dua variabel utama pengendali TFR adalah angka

kematian dan kelahiran, kecuali angka migrasi yang bersifat minus. Untuk itu program keluarga berencana harus memperoleh perhatian dan prioritas termasuk program peningkatan kualitas kesehatan reproduksi. Perlu ditingkatkan ketersediaan sarana program yang terjangkau secara ekonomi dan terakses secara lokal. Kepadatan agraris masih harus diatasi dengan strategi penyebaran yang lebih baik terutama ke dalam ruang pemukiman baru. Jenis usaha produktif di ruang nafkah lain, seperti laut, masih perlu diupayakan secara terus menerus untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya beli jasa kesehatan. Peningkatan efektivitas, transparansi, kemutakhiran, kesahihan mencakup keakuratan dan ketepatan informasi dan data administrasi kependudukan.

3. Pembangunan bidang pendidikan dasarnya merupakan investasi sumberdaya insani yang membutuhkan biaya yang besar, konsistensi dan komitmen yang tinggi dengan motto belajar sepanjang hayat (baik melalui jalur formal, nonformal maupun informal) diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM NTT sebagai modal dasar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pendidikan yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing global menjadi tuntutan dan kebutuhan publik dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, profesionalisme dan kesejahteraan guru, manajemen dan layanan pendidikan yang berkualitas dan pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha dalam menciptakan dunia pendidikan yang bermutu. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar bagi kelompok margin, keluarga miskin (*better education for the poor*), percepatan pemberantasan buta aksara fungsional, peningkatan pendidikan anak usia dini dan lain sebagainya. Berkenan dengan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu disediakan subsidi biaya pendidikan secara terencana, memadai, konsisten dan berkesinambungan. Disamping itu diperlukan perhatian yang proporsional bagi

pengembangan pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta sebagai aset pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas baik secara akademik maupun non akademik.

Oleh karena itu kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan pada mutu baik tenaga pendidik dan kependidikan serta tamatan pendidikan pada semua jenis dan jenjang agar dapat bersaing dalam pasar kerja global.

4. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai Nusa Tenggara Timur Sehat dilaksanakan melalui peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan SDM kesehatan menurut jenis keahlian, peningkatan kualitas administrasi dan layanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS, NAPZA, malaria dan penyakit-penyakit menular lainnya. Pengelolaan kesehatan berkaitan langsung dengan masalah fenomena demografis, lingkungan, epidemiologi penyakit, globalisasi demografi dan mobilisasi, IPTEK kesehatan dan kerjasama lintas lembaga.
5. Potensi sumberdaya manusia perempuan dan anak Nusa Tenggara Timur perlu dibangun melalui program pendayagunaan kelompok perempuan. Program pendayagunaan penduduk perempuan bertujuan untuk meningkatkan status, peran, tugas, martabat dan harga diri kelompok perempuan yang memungkinkan perempuan berkesempatan mengaktualisasikan dirinya. Pemberdayaan kelompok perempuan juga bertujuan untuk mensejajarkan kelompok perempuan dengan laki-laki agar proses aktualisasi dirinya dapat berjalan dengan semestinya. Pendidikan kelompok perempuan harus dikembangkan secara wajar melalui semua jalur jenis dan jenjang baik formal dan nonformal sehingga kelompok perempuan memiliki kemungkinan dan aksesibilitas yang lebih besar untuk mencurahkan tenaga, waktu dan keahliannya di semua sektor pembangunan.

Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan formal dan nonformal diharapkan dapat mencegah perkawinan usia dini. Dengan demikian dapat meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.

6. Pembangunan masyarakat yang adil dan setara didasarkan pada kesadaran masyarakat maupun individu untuk tidak melakukan berbagai praktek diskriminasi terhadap golongan, strata, gender, wilayah, standar ganda, kesempatan untuk mendapatkan akses pembangunan di semua bidang.
7. Pembangunan manusia kelompok usia anak dan remaja perlu dilakukan di Nusa Tenggara Timur untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kelompok ini untuk mendapatkan pendidikan dan terhindar dari eksploitasi tenaga anak usia sekolah di sektor produktif terutama sektor informal.
8. Pembangunan kelompok pemuda diarahkan untuk memperkuat jati dirinya sebagai pelaku budaya sekaligus untuk memperoleh ketahanan budaya, peningkatan kualitas ketrampilan dan kesehatan melalui olahraga dan upaya bela negara.

4.1.2.2. Meningkatkan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS)

1. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri dan untuk mengabdikan kepada kemanusiaan dan dipergunakan bagi kesejahteraan manusia khususnya dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan, industri yang *knowledge based* (berbasis pengetahuan). Pembangunan teknologi bertujuan agar masyarakat berkemampuan menguasai, mengadopsi dan mengkombinasikan, menciptakan dan menemukan kembali berbagai hal baru di bidang teknologi yang dipergunakan bagi kepentingan manusia.
2. Pembangunan ilmu pengetahuan di berbagai bidang keilmuan selain untuk menghasilkan SDM berkualitas dan

professional, juga untuk memperkuat daya saing masyarakat dan bangsa melalui peningkatan jumlah paten/hak cipta hasil kajian penelitian dan pengembangan, ekspor teknologi tinggi (manufaktur) untuk meningkatkan besaran kontribusi IPTEKS dan SDM terhadap dunia usaha agar mencapai > 9,6. Karena siklus satu daur teknologi lebih singkat dari satu periode pendidikan S1 maka ketertinggalan pemahaman dan penguasaan teknologi yang terus meningkat mengakibatkan terjadinya penguasaan dan penggunaan teknologi kadaluarsa, untuk itu perlu dilakukan percepatan transformasi teknologi dan reinventing teknologi yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS, konteks dan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

3. Pembangunan IPTEKS diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan, energi, pertahanan keamanan, kesehatan dan berbagai bidang lainnya. Pengembangan teknologi telekomunikasi dan informatika bertujuan untuk mendukung interaksi global melalui sistem cybernetika/internet dalam cyberspace/dunia maya, mengaktualkan penguasaan IPTEKS, merelevansikan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Pengembangan IPTEKS didukung oleh berbagai bidang dan jenis penelitian baik yang bersifat dasar, terapan dan pengembangan. Oleh karena itu harus ditunjang dengan sarana dan kelembagaan penelitian serta sumberdaya peneliti yang memadai. Pengembangan IPTEKS dipergunakan untuk mendukung rekayasa termasuk inovasi di berbagai bidang pembangunan.

4.1.2.3. Menciptakan Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Kokoh

1. Pembangunan perekonomian perlu diarahkan kepada pembangunan sektor primer, sekunder dan tersier yang terintegrasi dan saling mendukung, sehingga pertumbuhan sektor primer mendorong pertumbuhan sektor sekunder, dan bersama-sama keduanya mendorong sektor tersier begitu pun sebaliknya.

2. Revitalisasi pertanian perlu dikembangkan dalam upaya pengejawantahan kebijakan pembangunan nasional dalam revitalisasi pertanian melalui pembangunan pertanian spesifik wilayah yang sesuai dengan potensi semiarid dan kelautan Nusa Tenggara Timur serta aspek sosial budayanya.
3. Pembangunan perilaku ekonomi perlu diupayakan ke arah yang lebih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui upaya-upaya yang mendorong pergeseran perilaku produksi, investasi, menabung dan konsumsi ke arah yang lebih memungkinkan terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi. Oleh karena itu perlu dikembangkan pendekatan ekologi manusia yang mampu menyelaraskan kaidah-kaidah sosial ekonomi masyarakat dengan kaidah-kaidah ekonomi.
4. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan kepada upaya peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja guna memutuskan mata rantai kemiskinan.
5. Pada aspek kapital, pembangunan diarahkan kepada peningkatan ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses pada lembaga keuangan mikro dan padat modal guna penguatan modal masyarakat miskin dan perdesaan. Untuk itu perlu diformulasikan dan diimplementasikan sistem perkreditan, kelembagaan koperasi dan bank yang memungkinkan peranan perbankan sebagai lembaga intermedia yang pro investasi.
6. Pembangunan teknologi diarahkan pada upaya mekanisasi pedesaan melalui upaya diseminasi teknologi tepat guna dan pengembangan bahan bakar nabati untuk kemandirian penyediaan energi pedesaan.
7. Perkuatan perekonomian domestik perlu dikembangkan guna mewujudkan masyarakat berdayasaing yang secara bertahap-berkelanjutan dilaksanakan melalui perbaikan efisiensi ekonomi, pereduksian ketimpangan ekonomi,

penstabilan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keterkaitan dengan kebijakan ekonomi internasional.

4.1.2.4. Mengoptimalisasikan Eksplorasi, Eksploitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam

1. Peningkatan Eksplorasi dan Eksploitasi Potensi Tambang.

Pembangunan di bidang pertambangan diarahkan untuk pemanfaatan secara optimal potensi tambang NTT untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sumbangan subsektor pertambangan terhadap PAD serta mengupayakan berbagai tindakan pengamanan untuk menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang yaitu : pembinaan, pengawasan dan pengaturan pemanfaatan potensi tambang. Meningkatkan ketersediaan informasi potensi tambang. Meningkatkan teknologi dan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan potensi tambang. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan potensi tambang. Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum dengan tetap memperhitungkan dan menjaga keseimbangan dan keserasian alam serta keberlanjutan sumberdaya alam.

2. Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air dan DAS.

Ketersediaan sumber air yang cukup untuk kebutuhan konsumsi dan produksi masyarakat dengan cara mengatur pemanfaatan sumberdaya air yang berasas lestari, menata regulasi pemanfaatan dan pelestarian sumber air, identifikasi dan pemetaan sumber air potensial, melindungi dan merehabilitasi sumber air dan memulihkan sumber air yang mengalami pengrusakan. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumberdaya air. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan air. Pembangunan infrastruktur dalam pelestarian air. Konservasi dan rehabilitasi lahan di sejumlah DAS untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya. Pengamanan sungai dan pengembangan daerah aliran sungai, rehabilitasi sungai

dan pengembangan daerah aliran sungai dan menjaga tangkapan air (*catcment area*), yang meliputi: pengukuhan dan penataan batas; pengendalian kegiatan budidaya; mengoptimalkan pemanfaatan kearifan lokal dan norma tradisional yang sesuai (*customary law*) dalam menjaga kelestarian air dan DAS.

3. **Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan lahan Kritis**, diarahkan untuk mencegah bertambahnya lahan kritis dari upaya-upaya pengrusakan lingkungan seperti praktek pertanian dan penggunaan lahan yang menimbulkan lahan kritis. Pemulihan kembali/rehabilitasi lahan kritis yang sudah rusak dengan usaha penghijauan, reboisasi dan konservasi hutan, tanah dan air yang dipadu dengan pengembangan pertanian, kehutanan. Studi dan pemetaan ulang luas dan sebaran lahan kritis di Nusa Tenggara Timur. Penyediaan/penyusunan informasi dan publikasi yang lengkap tentang perkembangan dan kondisi lahan kritis. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan lahan kritis. Mencegah sistem perladangan berpindah yang menghambat pemudaan vegetasi/tanaman secara alamiah dan mengakibatkan pembentukan lahan kritis. Mengurangi luas lahan kritis terutama di Sumba Timur, Sumba Barat dan Kupang. Mengurangi luas lahan kritis dalam hutan pada DAS dan di luar kawasan hutan. Pendayagunaan lahan kritis melalui rehabilitasi lahan diarahkan menjadi lahan pertanian yang produktif, upaya pemukiman kembali dalam areal pertanian, pengembangan usaha kehutanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat peladang berpindah. Memulihkan fungsi lahan-lahan kritis dan lahan-lahan bekas pertambangan, pembakaran hutan atau kegiatan merusak di dalam hutan maupun di luar hutan baik melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan, bersama-sama dengan masyarakat dan swasta;
4. **Konservasi dan Optimasi Hasil Hutan**. Pembangunan di bidang kehutanan diarahkan pada upaya pelestarian, rehabilitasi dan perluasan hutan untuk mengkonservasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Optimasi

pemanfaatan hasil hutan non-kayu, jasa lingkungan dan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu dan penerapan IPTEKS pada sektor kehutanan. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan hutan. Meningkatkan informasi mengenai perkembangan hutan konservasi dan produksi. Meningkatkan teknologi dan management pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Meningkatkan sumbangan subsektor kehutanan terhadap PAD. Penetapan kawasan hutan dalam tata-ruang. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya (pertanian dan pertambangan). Memberi perlindungan terhadap kawasan yang mempunyai nilai historis, nilai tambah maupun nilai ilmiah. Penegakan hukum dalam upaya perlindungan hutan. Pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu. Mencegah kebakaran hutan. Meningkatkan penelitian biologi dan ekologi satwa dan flora langka. Pendayagunaan lahan kritis menjadi lahan produktif untuk pertanian dan perkebunan, pengembangan hutan produksi. Mengembangkan flora dan fauna khas potensial seperti kayu cendana. Pemantapan regulasi pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Pengukuran, pemetaan dan penyusunan informasi; pemantapan perencanaan, koordinasi dan pengawasan lintas wilayah; pengkajian dan peyusunan model pengembangan dan pengelolaan hutan konservasi, lindung dan produksi berbasis masyarakat. Penataan batas dan pemetaan hutan konservasi, lindung dan produksi. Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Melindungi flora dan fauna terutama yang bersifat endemik lokal. Mencegah pemungutan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi. Melestarikan keanekaragaman hayati. Mengembangkan koleksi plasmanutfah dengan mendirikan herbarium di tingkat provinsi. Mencegah masuknya spesies dan varietas eksotis. Mencegah penggunaan teknologi/teknik yang merusak. Mengantisipasi terjadinya Komersialisasi Bahan Hayati seperti tanaman hasil rekayasa genetik atau tanaman *trans* *genis* dan Bioprospeksi dan

Biopirasi. Meningkatkan pemahaman dalam menilai sumberdaya alam berbasis budaya setempat dan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan norma tradisonal yang sesuai (*customary law*)

5. **Optimasi Manfaat Sumberdaya Pesisir dan Laut.**

Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat. Meningkatkan sumbangan subsektor perikanan terhadap PAD. Meningkatkan produksi perikanan dan hasil laut. Meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan pantai dan pelaku ekonomi terkait. Meningkatkan bahan baku industri pengolahan hasil laut. Pengembangan, perbaikan dan modernisasi sarana dan prasarana usaha perikanan dan kelautan. Kapitalisasi kegiatan ekonomi nelayan. Perbaikan teknologi dan manajemen penangkapan. Diversifikasi dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pantai. Pengembangan model industri hasil laut berbasis masyarakat. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, kemitraan dan kerjasama dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi. Pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan dan kelautan. Memodernisasi sarana dan prasarana penangkapan nelayan, perbaikan teknologi dan manajemen penangkapan. Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan laut; peningkatan kemampuan personil; pemantapan sistim pengamanan dan regulasi pemanfaatan sumberdaya kelautan. Menjaga keamanan wilayah laut sebagai suatu teritori multifungsi. Menjaga sumberdaya laut sebagai kekayaan lestari dari segala gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Menurunkan aktivitas pencurian di wilayah laut. Penegakan hukum bagi pelanggar dan perusak sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Peningkatan keselamatan, pengurangan bencana alam laut, dan prakiraan iklim laut. Menjalin kerja sama

regional dan internasional untuk menyelesaikan batas laut dengan negara tetangga. Meningkatkan Riset, Teknologi dan Informasi di bidang Sumberdaya Pesisir dan Laut. Meningkatkan riset dan pengembangan teknologi kelautan. Pengembangan sistem MCS (*monitoring, controlling, and surveillance*) dalam pengendalian dan pengawasan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan. Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumber daya non hayati lainnya. Memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi IPTEKS, SDM, kelembagaan dan peraturan perundangan. Pemantapan sistem informasi wilayah pesisir dan laut. Meningkatkan teknologi dan manajemen pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. Pemantapan sistem informasi perikanan dan kelautan; pengukuran, pemetaan dan penyusunan informasi, pemantapan perencanaan, koordinasi dan pengawasan lintas wilayah pesisir dan kelautan berbasis masyarakat dan advokasi masyarakat. Memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan pesona keindahan alam sebagai provinsi kepulauan. Pembangunan pulau-pulau kecil dan perbatasan. Menyeraskan peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah. Terselenggaranya pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara serasi sesuai dengan daya dukung lingkungan. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Nelayan dan Masyarakat Pesisir dan Pantai Memperkuat kelembagaan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir sehingga dapat berfungsi untuk mendukung kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran dan penyediaan input produksi. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; Penataan dan peningkatan kelembagaan, termasuk lembaga masyarakat di tingkat lokal dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya

terbaharukan di pesisir dan pantai (gelombang untuk listrik, olahraga dan pariwisata, dan jasa lainnya).

4.1.2.5. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Berkualitas

- 1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan, Jembatan dan Terminal.** Arah pembangunan di bidang sarana dan prasarana jalan dan jembatan 20 tahun mendatang adalah peningkatan kuantitas dan kualitas fisik jalan, jembatan dan terminal untuk memperlancar mobilitas orang dan barang, meningkatkan transaksi ekonomi dan terbukanya isolasi antar wilayah. Pengkajian teknik dan sistem pengelolaan/ penanganan jalan, jembatan dan terminal. Meningkatkan jumlah/panjang jalan yang termasuk kategori baik dan mengurangi yang termasuk kategori rusak dan rusak berat, terutama di beberapa kabupaten yang jalannya cukup banyak rusak dan rusak berat. Mengurangi proporsi jalan kerikil dan tanah dan meningkatkan jalan aspal terutama di kabupaten yang proporsi jalan kerikil dan tanah cukup tinggi dan juga di pedesaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Membuka beberapa wilayah yang masih terisolasi untuk mengembangkan ekonomi.
- 2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Perhubungan Darat dan Penyeberangan.** Menyelaraskan semua peraturan perundangan di bidang sarana dan prasarana transportasi, baik yang mencakup investasi maupun peyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha di bidang transportasi. Mendorong peran perbankan dan sumber pendanaan lainnya untuk menunjang investasi di bidang sarana dan prasarana transportasi. Mendorong stakeholder atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan di bidang sarana dan prasarana transportasi. Menciptakan cetak biru (*blue print*) Sistem Transportasi Wilayah. Meningkatkan jumlah dan kualitas kendaraan untuk mendorong mobilitas penduduk dan barang. Menetapkan standard kualitas

kendaraan digunakan di jalan umum. Mengembangkan sistem transportasi perkotaan di tiap ibukota kabupaten/provinsi. Menerapkan sistem pajak lingkungan pada kendaraan untuk mengurangi beroperasinya kendaraan yang tidak layak jalan dan berdampak pada lingkungan. Mengembangkan pengkajian dan sistem perhubungan darat antar wilayah dan sistem transportasi perkotaan. Pengembangan regulasi perhubungan darat dengan memperhatikan kuantitas dan memperhitungan efeknya pada daya dukung jalan raya, efisiensi penggunaan bahan bakar, keseimbangan lingkungan seperti polusi udara, Pengrusakan ozon, dsb. Meningkatkan arus kunjungan kapal penyeberangan verry, Meningkatkan volume bongkar muat barang pada pelabuhan penyeberangan ferry. Meningkatkan arus penumpang melalui penyeberangan ferry

- 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.** Pengadaan dan pemeliharaan kapal penumpang dan barang. Pembangunan dan modernisasi dermaga/pelabuhan laut. Meningkatkan peranan transportasi laut untuk mendukung perdagangan dan ekspor import. Meningkatkan volume bongkar muat barang melalui pelabuhan laut. Meningkatkan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut di seluruh wilayah NTT. Meningkatkan arus kunjungan kapal laut. Meningkatkan arus penumpang kapal laut. Mengembangkan sistem jaringan transportasi intra wilayah maupun antar wilayah untuk menjamin kelancaran hubungan transportasi antar negara, antar provinsi, antar pulau, antar kota dan antara kota dengan desa sehingga membentuk kesatuan wilayah yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan peluang-peluang yang ada. Menciptakan sistem perhubungan darat, laut dan udara secara sinkron untuk meningkatkan volume transaksi ekonomi antar wilayah. Mengembangkan transportasi laut untuk menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar.

Mendorong peningkatan arus penumpang, arus kunjungan dan volume bongkar muat barang pada pelabuhan. Mengembangkan keterpaduan antara pembangunan sarana dan prasarana jalan dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara.

- 4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Udara.** Meningkatkan jumlah pesawat yang datang menuju dan berangkat dari NTT terutama pada daerah yang cukup rendah dilalui oleh pesawat. Pengembangan sarana dan prasarana bandara untuk mendukung transportasi udara. Mendorong peningkatan arus penumpang udara yang masuk dan keluar NTT. Meningkatkan dan mendorong volume bongkar muat barang melalui pelabuhan udara. meningkatkan route penerbangan pada kabupaten-kabupaten yang belum berkembang dan juga ke propinsi lain di luar NTT. Mengembangkan status bandara yang potensial menjadi bandara bertaraf internasional. Meningkatkan/membuka route penerbangan ke negara-negara lain terutama negara tetangga terdekat seperti Timor Leste dan Australia. Melakukan promosi angkutan komoditi khusus dengan pesawat terbang khususnya untuk barang-barang segar (*fresh goods*) dan bernilai ekonomi tinggi.
- 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi.** Meningkatkan hasil pertanian melalui peningkatan luas lahan beririgasi dan meningkatkan intensitas tanam. Mengembangkan lahan tidur dan lahan kritis potensial menjadi lahan produktif dengan meningkatkan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi seperti embung, bendungan dan jaringan irigasi lainnya. Peningkatan luas panen dan produksi padi. Peningkatan lahan beririgasi (irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana, tadah hujan dan pasang surut). Peningkatan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi adalah untuk memanfaatkan sumberdaya air yang tersedia secara optimal dan berkelanjutan untuk menunjang kegiatan pertanian, mendorong peningkatan produksi dan produktifitas pertanian. Pengkajian dan

penyusunan model atau sistem pengairan yang efisien. Perbaikan manajemen dan teknologi pengairan. Pengembangan kelembagaan masyarakat pemakai air. Pembangunan dan pemeliharaan bendungan, embung dan saluran irigasi pada daerah berlahan kering seperti embung kecamatan atau desa untuk memperpanjang kalender musim petani, peningkatan ketersediaan pakan ternak dan holtikultura.

- 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi.** Peningkatan ketersediaan air bersih. Mendorong kemampuan PAM menyediakan air, menemukan sumber air baru, meningkatkan debit air dan mengefisieni memanfaatkan air yang ada. Mendorong kemampuan PDAM dalam pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan perpipaan dan sumberdaya air. Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih. Pengkajian dan penyusunan model/sistem pengairan yang efisien. Mengembangkan sumber air yang potensial seperti dengan cara konservasi. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan. Mendorong keterlibatan masyarakat dan badan usaha lainnya dalam penyediaan air bersih. Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi. Meningkatkan rumah tangga yang memiliki kamar mandi sendiri. Meningkatkan jumlah dan fasilitas kamar mandi umum. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menangani sampah. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi.
- 7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Listrik.** Mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik rumah tangga, industri, perkantoran, perhotelan dan lain-lain. Meningkatkan jumlah rumah tangga menggunakan layanan PLN. Mengembangkan penggunaan sumber energi matahari, arus laut, tenaga angin dan lain-lain. Mendorong peranan swasta, badan usaha milik negara, pemerintah daerah, masyarakat membangun pembangkit listrik terutama listrik non BBM. Mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik BBM melalui

penggunaan energi matahari, biodiesel, panas bumi, hidro gas, batu bara, angin, gelombang atau sumber energi lainnya yang potensial di NTT untuk mengatasi luasnya wilayah NTT yang berbentuk kepulauan dengan densitas penduduk yang bervariasi yang menyulitkan pengembangan sistim kelistrikan PLN konvensional.

- 8. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Pendidikan.** Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. Membangun rumah sakit dan puskesmas sesuai kebutuhan masyarakat. Meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit sesuai standar kesehatan. Membangun sekolah sesuai kebutuhan masyarakat. Merehabilitasi dan merenovasi semua sekolah yang mengalami kerusakan sesuai standar mutu gedung. Dan perlu memperhatikan peluang dan tantangan/ persaingan dengan pihak asing dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- 9. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman.** Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman sehingga tercipta lingkungan pemukiman yang memenuhi syarat. Meningkatkan kepemilikan rumah sehat. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana pemukiman. Perbaikan kawasan pemukiman penduduk terutama di pedesaan dan pesisir pantai. Mendorong investasi di bidang perumahan. Mendorong peranan perbankan dalam pendanaan pembangunan perumahan dan permukiman
- 10. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Telekomunikasi/Telematika.**

Meningkatkan akses terhadap telekomunikasi/ telematika. Mencegah ketimpangan distribusi akses terhadap telekomunikasi/telematika antar daerah/wilayah. Meningkatkan jumlah telepon swasta dan pemerintah terutama di Kabupaten yang belum berkembang. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kantor pos terutama di Kabupaten yang belum berkembang. Mendorong investasi dalam penyediaan

infrastruktur telekomunikasi/telematika terutama di daerah potensial dan belum dikembangkan. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telekomunikasi/telematika.

4.1.3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM

1. Arah pembangunan politik diarahkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dengan menciptakan iklim kehidupan masyarakat dimana setiap anggota masyarakat memiliki kesamaan kedudukan dalam bidang politik dan hukum, peningkatan peranan pers yang bertanggungjawab dan peranan masyarakat sipil; pemantapan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi birokrasi yang efektif dan efisiensi untuk layanan prima kepada masyarakat dan pemanfaatan potensi daerah secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan rakyat.
2. Arah kebijakan hukum berorientasi pada Rekonstruksi sistem hukum. Rekonstruksi struktur merujuk pada rekonstruksi struktur secara nasional dengan tetap membuka peluang bagi akses para pencari keadilan melalui berbagai forum tidak resmi dan melalui berbagai cara yang dipilih sendiri. Forum resmi melegitimasi produk forum tidak resmi sejauh tidak bertentangan dengan hukum positif dan harus memberi ruang bagi LEGAL PLURALISM dalam masyarakat sehingga tidak ada pengingkaran kebenaran dan kemanusiaan dalam proses hukum.
3. Rekonstruksi substansi hukum meliputi tahap-tahap formulasi, implementasi dan penegakan. Dalam hal formulasi, selain mekanisme baku yang diwajibkan, kajian akademis yang kini dilakukan secara sporadic perlu dibakukan pula.
4. Dalam hal penegakan, sesuai dengan kecenderungan karakter responsive, maka di masa depan kebijakan para fungsionaris hukum mesti lebih diorientasikan pada pemecahan masalah dan perwujudan nilai keadilan. Artinya hukum ditegakkan bukan demi kepentingan penegakan

hukum semata melainkan dalam rangka menyelesaikan masalah **termasuk masalah KKN** yang justru menjadi alasannya untuk diformulasikan.

5. Sifat multi dimensi yang inheren dengan gejala pelanggaran HAM di NTT merupakan petunjuk bahwa ini merupakan isu yang mesti didekati dari berbagai perspektif yang saling melengkapi. Setiap strategi yang digunakan mesti disesuaikan dengan konteksnya. Pencelaan terhadap pelaku saja tidak memadai tanpa dibarengi dengan perbaikan posisi tawar para korban [potensial]. Rekonstruksi realitas sosial artificial mesti mencapai tahap kristalisasi dalam pola pikir [mind-set] individu warga masyarakat NTT.

4.1.4. MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI WILAYAH YANG BERKETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, POLITIK DAN KEAMANAN

1. Pluralitas masyarakat Nusa Tenggara Timur diarahkan sebagai hal yang positif untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik agar bermanfaat dalam pembangunan perlu peningkatan kualitas SDM dalam berbagai jenis keahlian, peningkatan pemahaman dan penghayatan tentang pluralisme di NTT sebagai suatu realitas sosio-kultural untuk mewujudkan kepentingan sosial, ekonomi, politik, hukum pertahanan dan keamanan masyarakat.
2. Kebudayaan daerah adalah sebagai aset pembangunan daerah yang perlu secara terus menerus dipelihara, dibina dan dikembangkan. Seiring dengan hal tersebut, perlu pula diupayakan terbukanya peluang bagi masyarakat luas untuk makin berperan aktif dalam proses pengembangan kebudayaan daerah tersebut dan dalam menikmati hasil – hasilnya. Perlu pula ditumbuh kembangkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai – nilai sosial budaya daerah yang luhur serta menyerap nilai – nilai dari luar yang positif dan yang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan.

3. Dalam pembangunan politik perlu dikembangkan budaya politik kompetitif dari semua proses politik maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian output yang dihasilkan dapat selaras dengan nilai – nilai profesionalisme yang diharapkan dan meningkatkan kesadaran politik kritis agar terhindar dari mobilisasi politik yang dangkal, optimalisasi fungsi partai politik dan dengan demikian dapat tercipta demokrasi dalam arti sebenarnya.
4. Dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan sebaiknya didahului dengan sebuah research (*policy analysis*) yang memadai untuk mendapatkan informasi yang valid sebelum suatu keputusan ditetapkan.
5. Dalam pembangunan daerah ke depan budaya disiplin hendaknya lebih dimasyarakatkan dan dijadikan sebagai sebuah gerakan masyarakat dalam pembangunan daerah.
6. Dalam rangka menghindari berbagai penyimpangan dan pemborosan pembangunan di daerah maka perlu diberlakukan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
7. Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan KKN perlu terus diupayakan perwujudannya sekalipun disadari bahwa pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala yang amat luas, rumit, dan kompleks. Pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah salah satu *prasyarat good governance*.
8. Pengembangan pendidikan kewarganegaraan dini (*early civic education*) kepada warga masyarakat di NTT agar memperkokoh nilai nasionalisme dan identitas nasional dalam tata pergaulan internasional dan dalam interaksi internal sebagai bangsa yang majemuk.
9. Pengembangan pendidikan politik masyarakat yang dapat membuka sekat-sekat primordial (etnisitas) dalam kehidupan bermasyarakat sehingga semua modal sosial (*social capital*) yang dimiliki masyarakat NTT dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan visi dan misi NTT.
10. “Pengawasan dan pemantapan” daerah otonom agar di satu sisi otonomi daerah dapat dijalankan dengan baik tidak saja pada kegiatan pilkada tetapi juga dalam keseluruhan proses

politik, di sisi lain agar tidak terjadi disintegrasi dan separatisme yang kontra produktif terhadap tujuan otonomi daerah itu sendiri.

11. Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
12. Pengembangan ekonomi dalam rangka ketahanan dengan berupaya menumbuhkembangkan jiwa wirausaha masyarakat NTT serta perlu dilakukan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

4.1.5. MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI WILAYAH YANG MEMILIKI KESEIMBANGAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Terwujudnya NTT yang asri dan lestari yang ditandai membaiknya pengelolaan dan penggunaan SDA dan lingkungan hidup yang dicerminkan dari terjaganya fungsi, daya dukung dan kemampuan lingkungan dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari dan terjaminnya fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Arah pembangunan jangka panjang NTT 20 tahun ke depan di bidang lingkungan hidup adalah:

1. **Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup**, diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup; penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem, termasuk di pulau-pulau kecil; Pengembangan evaluasi sumber daya alam meliputi hutan, air, pesisir, dan cadangan mineral; pendataan dan publikasi potensi sumber daya hutan; pendataan dan penyelesaian tata-batas

hutan dan kawasan perbatasan; penyusunan indikator keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dengan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan kekeringan; pengembangan sistem informasi terpadu antara sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup nasional dan daerah; Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian internasional di tingkat daerah; Penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah sebagai alat pendukung pengambilan keputusan publik; Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.

2. **Pengembangan dan Perbaikan Kawasan Konservasi/Lindung.** Untuk memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dilakukan penetapan kawasan konservasi atau kawasan lindung di darat dan di laut. Sasaran pemantapan kawasan lindung adalah: meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim (hidrologis); mempertahankan keanekaragaman flora, fauna dan tipe ekosistem serta keunikan alam; menjaga kelestarian lingkungan fisik dan biologis wilayah; menjamin keseimbangan fungsi lingkungan yang menjamin optimalnya fungsi ekologi. Kawasan lindung yang perlu dimantapkan fungsinya di NTT adalah kawasan lindung yang telah ditetapkan, kawasan pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni namun mempunyai keunikan dan menjadi tempat perlindungan aneka flora dan fauna dan wilayah-wilayah karena kebutuhan posisi geografisnya berpotensi sebagai kawasan lindung. Menyelesaikan permasalahan tumpang tindih dan konflik penggunaan tanah antara kepentingan lindung dan budidaya berdasarkan ketentuan. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.
3. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat.** Meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dan pentingnya

memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama generasi muda sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap SDA dan lingkungan. Mendorong cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan produksi dan konsumsi dan menambah nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah. Pengembangan koordinasi kelembagaan; pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Pemberdayaan kelembagaan dan nilai budaya lokal yang mendukung kelestarian lingkungan termasuk didalamnya sanksi adat dan penegakan hukum positif.

4. **Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.** Mencegah pencemaran lingkungan hidup baik di darat, air dan udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pemantauan kualitas udara khususnya di perkotaan yang didukung oleh manajemen dan sistem transportasi kota yang ramah lingkungan. Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang. Peningkatan fasilitas laboratorium lingkungan di tingkat provinsi serta fasilitas pemantauan udara (*ambient*) di kota-kota. Penyusunan regulasi dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum. Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi. Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal dalam menangani sampah. Meningkatkan upaya pengelolaan sampah perkotaan. Pendirian perusahaan TPA. Pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan limbah B3 serta pendirian fasilitas pengelola limbah B3. Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas. Meningkatkan harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penagakannya secara konsisten terhadap

pencemar lingkungan. Mengendalikan pencemaran dan merusak lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dan mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir. Merehabilitasi wilayah pesisir dan laut seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, estuaria dan lain-lain. Menurunnya aktifitas merusak sumberdaya kelautan.

5. **Pemantapan Kinerja Kelembagaan dan Aparatur Birokrasi dalam Pengelolaan Lingkungan**, diarahkan meningkatkan lembaga birokrasi dalam mengelola lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (*good environmental governance*) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengendalian lingkungan hidup. Meningkatkan kemampuan/profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas teknis dan manajemen di bidang lingkungan hidup. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, pusat; lintas wilayah dan sektor dalam pengelolaan lingkungan serta pengadaan teknologi dan peralatan yang menunjang fungsi dan peran kelembagaan pengelola lingkungan.
6. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kawasan Pesisir dan Laut**. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan lain-lain. Melindungi jenis/genetik biota laut langka dan terancam punah. Mengurangi pelanggaran dan merusak sumber daya pesisir dan laut. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum. Memadukan tata pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Penataan ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung lingkungan, yaitu: penyempurnaan rencana tata ruang kawasan perikanan terpadu.

7. Dalam rangka pengelolaan lingkungan yang memiliki keseimbangan tidak saja secara fisik lingkungan tetapi juga perlu adanya penataan hukum yang jelas dalam memberikan tuntunan kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lebih baik. Selain itu perlu di jabarkan secara jelas kewenangan provinsi sebagai pengendali tata ruang.

4.1.6. MEWUJUDKAN POSISI DAN PERAN NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PERGAULAN ANTAR NEGARA, DAERAH DAN MASYARAKAT

Dengan menginteraksikan arah pembangunan dari berbagai bidang di atas, akan dihasilkan kinerja pembangunan yang menempatkan peran wilayah ini sebagai pemimpin, konsultan, defender, transmiter, katalisator dan dinamisator interaksi antar masyarakat, antar provinsi dan antar negara untuk memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam kerangka mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah multidimensi. Terkait dengan hal tersebut, komunikasi pembangunan, provinsi maupun dengan dunia internasional perlu diefektifkan.

Selain itu masyarakat perlu secara terus menerus di dorong melalui berbagai informasi, bimbingan dan dukungan sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing serta dapat melihat serta menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat.

4.1.7. MEWUJUDKAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI PROVINSI KEPULAUAN DAN MASYARAKAT MARITIM

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan dengan luas lautan lebih besar dari luas daratan sebagaimana tergambar pada bagian depan, maka pengembangan wilayah diarahkan pada pemanfaatan dan pengawasan wilayah laut melalui perubahan perilaku dan pola hidup masyarakat berbudaya darat diarahkan kepada berbudaya maritim. Bahwa kesatuan daratan dan lautan di

NTT dengan ragam potensinya merupakan penghubung yang melahirkan provinsi kepulauan dengan karakteristik yang unik dan bersahabat dalam hubungan antar sesama manusia dan daerah. Pemekaran wilayah “daerah otonomi baru” hendaknya memperhatikan wilayah laut, **pulau terpencil/terluar/terdepan** dan tingkat kesulitannya sangat tinggi dalam layanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berlandaskan pertimbangan ini, kebijakan fiskal daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum memperhitungkan luas laut bukan saja diukur secara berurutan dengan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah “darat”, Produk Domestik Regional Bruto Perkapita, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 28.

Disamping itu pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur diarahkan untuk memantapkan tata ruang, pola hidup dan habitus kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan pariwisata dan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari; dan meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda sejak dini.

4.2. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Untuk mencapai visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 membutuhkan waktu dan perhatian semua komponen daerah dalam merencanakan dan melaksanakan skala prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi agenda pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah guna menjawab berbagai permasalahan yang hendak diselesaikan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Atas dasar tersebut perlu ada tahapan dan skala prioritas yang direncanakan sebagai berikut :

4.2.1. RPJM Ke- 1 Tahun 2005 – 2008

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program strategis Tiga Batu Tungku, berbagai keberhasilan dan kegagalan telah dicapai, maka Pemerintah Provinsi NTT menetapkan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Provinsi NTT 2004 – 2008 dan sebagai pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah NTT menetapkan Tiga Pilar Pemerataan Pembangunan yaitu Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum dan HAM serta 3 faktor dinamis: Transformasi Birokrasi, Modal Sosial dan Aksesibilitas agar tercapai pertumbuhan ekonomi, keadilan dan daya saing daerah dengan grant strategi PERTUMBUHAN MELALUI PEMERATAAN. Untuk itu, Propeda 2004 – 2008 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah; pemerintahan yang bersih dan berwibawa; peningkatan etos kerja masyarakat dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan manusia; pemantapan kepemimpinan strategik dan; peningkatan peran perempuan dan anak dalam pembangunan; meningkatkan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan serta pengembangan ekonomi kerakyatan dengan filosofi pembangunan “Mulai dengan Apa Yang Ada dan Dimiliki Rakyat”. Dan pada tahun 2009 Gubernur terpilih menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan dalam penyusunan RAPBD 2009.

Kinerja pembangunan daerah yang telah dicapai pada kurun waktu tahun 2005 – 2008 adalah

- IPM 63,6
- APM SD 85,09%, SMP 45,73% dan SMA 27,95%
- Literasi penduduk usia 10 tahun ke atas 87,96% dan buta huruf 12,04%.
- Jumlah penduduk miskin 35,50%
- Pendapatan perkapita NTT RP.3,6 juta
- Pertumbuhan ekonomi 5,08%

4.2.2. RPJM Ke- 2 Tahun 2009 – 2013

Berlandaskan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi NTT 2005 – 2008 menjadi rujukan dalam pelaksanaan RPJM ke-2 yang mengagendakan posisi tawar Provinsi NTT di forum Nasional, Regional dan Internasional dalam segala bidang dengan penuntasan MGDs dengan penekanan pada “Pertumbuhan melalui Pemerataan” demi meningkatnya daya saing sumber daya manusia Nusa Tenggara Timur, kemampuan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan kelembagaan keuangan ekonomi mikro serta menciptakan daya saing produk potensi daerah di pasar global.

Untuk mencapai kondisi sumberdaya manusia NTT berdaya saing global harus didukung oleh moral, etika, budaya dan adab baru berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ditandai dengan peningkatan profesionalisme dan moral aparatur untuk memberikan layanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel agar kesejahteraan masyarakat NTT terus menerus meningkat berdasarkan indikator pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran; meningkatnya pendidikan masyarakat dan mutu pendidikan, relevansi pendidikan serta daya saing lulusan; meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan status gizi; peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak.

Untuk mengukur manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global, ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat; meningkatnya mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan; meningkatnya manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel; meningkatnya pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan pendidikan dan layanan kesehatan.

Untuk mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum dan pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat ditentukan dengan stabilitas wilayah dan keadilan hukum demi tercapainya kondisi daerah perbatasan Negara Timor Leste dan Australia aman dan damai yang ditandai dengan peningkatan aktivitas lintas batas, meningkatnya kinerja pasar perbatasan dan tidak ada imigran gelap ke negara tujuan Australia; pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis dan damai; penegakan supremasi hukum, penurunan konflik politik dan daerah, penguatan peran masyarakat sipil dan kelembagaan keagamaan serta kelembagaan politik.

Untuk mewujudkan NTT sebagai wilayah yang bertahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan didukung oleh pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat, ditandai dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumberdaya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan; pembukaan daerah – daerah terisolasi dan terpencil; peningkatan jaringan infrastruktur transportasi; meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam serta menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT; meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik rakyat; dan terciptanya stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di daerah perbatasan serta pengarusutamaan gender pada bidang pembangunan.

Untuk mewujudkan NTT sebagai wilayah keseimbangan lingkungan membutuhkan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan – lahan kritis; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, merehabilitasi dan perbaikan daerah/kawasan sumberdaya alam yang telah dirusak oleh aktivitas manusia dan akibat alam untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan; Sumberdaya air dan DAS; Akses air bersih dan tata kelola pemukiman yang baik dan meningkatnya lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai; meningkatnya pengembangan IPTEKS yang ramah lingkungan serta redistribusi domisili baru.

Untuk mewujudkan NTT provinsi kepulauan dan masyarakat maritim perlu didukung dengan proses penyadaran masyarakat melalui Gemala; peningkatan sarana dan prasarana perikanan; peningkatan sumberdaya manusia nelayan, perlindungan dan pengawasan habitat laut; kebijakan fiskal daerah berdasarkan luas darat dan laut; regulasi perikanan dan kelautan yang berpihak pada daerah dan masyarakat; dan pemanfaatan potensi laut untuk peningkatan pendapatan rakyat; mengembangkan sekolah kejuruan berdasarkan klasifikasi dan spesifik daerah kepulauan.

Dengan harapan akan mencapai target kinerja rencana pembangunan dalam kurun waktu ini sebagai berikut :

- IPM mencapai angka 68,3.
- Buta aksara 10 ribu
- AKB 45/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 300/100.000 KH.
- Kemiskinan 22% dan
- Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,5%.
- Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat
- Good governance dan penegakan hukum dan HAM
- Pembangunan yang responsif gender
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.

4.2.3. RPJM Ke- 3 Tahun 2014 – 2018

Berlandaskan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi NTT 2009 – 2013 menjadi rujukan dalam pelaksanaan RPJM ke-3 yang mengagendakan untuk lebih memantapkan posisi tawar Provinsi NTT di forum Nasional, Regional dan Internasional secara menyeluruh dalam segala bidang kehidupan manusia dengan menekankan pada penuntasan MDGs dan **pencapaian daya saing perekonomian daerah** berlandaskan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas dan bermoral serta mengembangkan kemampuan ilmu

pengetahuan dan teknologi terus menerus sesuai kebutuhan daerah.

Masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka perlu adanya peningkatan kesadaran dan penegakan hukum secara adil dilaksanakan oleh aparaturnya yang profesional dan moral yang terpuji dalam memberikan layanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel agar kesejahteraan masyarakat NTT terus menerus meningkat seiring dengan perubahan dan kebijakan pembangunan.

Sejalan dengan itu, membutuhkan pembaharuan pikiran dan tindakan masyarakat NTT yang demokratis dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat khususnya daerah perbatasan antara RI - Negara Timor Leste dan Australia aman dan damai agar aktivitas lintas batas dan pasar perbatasan berjalan optimal; berhentinya imigran gelap ke negara tujuan Australia melalui NTT; pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis dan damai; penegakan supremasi hukum, penurunan konflik politik dan daerah dan penguatan peran masyarakat sipil dan kelembagaan politik serta pengarusutamaan gender pada bidang pembangunan dan peranserta kelembagaan agama dalam segala bidang pembangunan.

Kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan pula dengan kualitas sumberdaya manusia berdaya saing global antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran; meningkatnya pendidikan masyarakat dan mutu pendidikan, relevansi pendidikan serta daya saing lulusan; meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan status gizi; peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak. Dengan harapan agar wilayah ini berketahanan ekonomi, sosial, politik dan keamanan didukung oleh pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat yang didukung dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumberdaya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta

berkelanjutan; pembukaan daerah – daerah terisolasi dan terpencil; meningkatnya pengembangan IPTEKS yang ramah lingkungan; peningkatan jaringan infrastruktur transportasi; meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui jaringan teknologi informatika.

Untuk mewujudkan NTT provinsi kepulauan dan masyarakat maritim perlu didukung dengan proses penyadaran masyarakat tentang Gemala terus menerus; peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan; peningkatan produksi dan jaringan pemasaran; peningkatan sumberdaya manusia nelayan, perlindungan dan pengawasan habitat laut; kebijakan fiskal daerah berdasarkan luas darat dan laut; regulasi perikanan dan kelautan yang berpihak pada daerah dan masyarakat; dan pengembangan industri kelautan berbasis masyarakat dan meningkatkan peran sekolah kejuruan berdasarkan klasifikasi dan spesifik daerah kepulauan dalam menanggulangi kemiskinan.

Dengan harapan akan mencapai target kinerja rencana pembangunan dalam kurun waktu ini sebagai berikut :

- IPM mencapai angka 73,3.
- Buta aksara 0%
- AKB 40/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 250/100.000 KH.
- Kemiskinan 15% dan
- Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,6%.
- Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat
- Good governance dan penegakan hukum dan HAM
- Pembangunan yang responsif gender
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.

4.2.4. RPJM Ke- 4 Tahun 2019 – 2023

Berlandaskan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi NTT 2014 – 2018 menjadi rujukan dalam pelaksanaan RPJM ke-4 secara menyeluruh dalam aspek kehidupan dan penghidupan manusia **NTT yang maju, mandiri adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas.**

Masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan pemerintahan di bumi Republik Indonesia merupakan harapan bersama agar terwujudnya kemadirian, keadilan dan kemakmuran secara merata melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum secara adil dilaksanakan oleh aparatur yang profesional dan moral aparatur yang terpuji dalam memberikan layanan publik prima.

Sejalan dengan itu membutuhkan budaya dan pendidikan politik yang demokratis serta hubungan antar negara, daerah dan masyarakat di Provinsi NTT berjalan aman dan damai khususnya di daerah perbatasan Negara Timor Leste dan Australia agar terjadi peningkatan arus barang dan jasa dari provinsi NTT ke negara Timor Leste dan daerah tetangga; pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis dan damai; penegakan supremasi hukum, penurunan konflik politik dan daerah dan penguatan peran masyarakat sipil dan kelembagaan politik serta pengarusutamaan gender pada bidang pembangunan dan peranserta kelembagaan agama dalam pembangunan.

Kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan pula dengan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing global antara lain terus meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran;

meningkatnya pendidikan masyarakat dan mutu pendidikan, relevansi pendidikan serta daya saing lulusan siap menciptakan lapangan kerja; meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan status gizi; peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak. Dengan harapan agar wilayah ini berketahanan ekonomi, sosial, politik dan keamanan didukung oleh pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat yang didukung dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumberdaya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan; pembukaan daerah – daerah terisolasi dan terpencil; meningkatnya pengembangan IPTEKS yang ramah lingkungan; peningkatan jaringan infrastruktur transportasi; meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui jaringan teknologi informatika.

Untuk mewujudkan NTT sebagai wilayah keseimbangan lingkungan membutuhkan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan – lahan kritis; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, merehabilitasi dan perbaikan daerah/kawasan sumberdaya alam yang telah dirusak oleh aktivitas manusia dan akibat alam untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan; Sumberdaya air dan DAS; Akses air bersih dan tata kelola pemukiman yang baik,

Untuk mewujudkan NTT provinsi kepulauan dan masyarakat maritim perlu didukung dengan proses penyadaran masyarakat melalui Gemala; peningkatan sarana dan prasarana perikanan; peningkatan sumberdaya manusia nelayan, perlindungan dan pengawasan habitat laut; kebijakan fiskal daerah berdasarkan luas darat dan laut; regulasi perikanan dan kelautan yang berpihak pada daerah dan masyarakat; dan pemanfaatan potensi laut untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan sekolah kejuruan berdasarkan klasifikasi dan spesifik daerah kepulauan dalam menciptakan daya saing global.

Dengan harapan akan mencapai target kinerja rencana pembangunan dalam kurun waktu ini sebagai berikut :

- IPM mencapai angka 80
- Angka partisipasi kasar SD/MI 130, SMP/MTs 85 dan SMA/MA 80.
- AKB 35/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 200/100.000 KH.
- Kemiskinan 12%
- Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,8%.
- Pendapatan perkapita masyarakat NTT Rp. 9.500.000,-
- Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat.
- Good governance dan penegakan hukum dan HAM
- Pembangunan yang responsif gender
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 – 2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah serta tahap dan program prioritas pembangunan selama kurun waktu 5 tahun merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha, perbankan serta masyarakat umum di dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat selama 20 tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi NTT ini menjadi acuan bagi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar pijak dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 5 tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dan sekaligus menjadi pedoman dan arah bagi kabupaten/kota dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota sehingga tercapainya visi dan misi RPJP Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025 yang dikehendaki semua masyarakat Nusa Tenggara Timur

Pada tahun 2024 dan 2025 dokumen ini masih tetap berlaku sepanjang belum ada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berikutnya. Untuk itu, Kepala Daerah periode 2018-2023 diwajibkan mempersiapkan dokumen RPJPD 20026-2045 agar roda pemerintahan dan pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Timur terus berjalan sesuai arah dan kebutuhan daerah serta tuntutan perubahan jaman.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah NTT 2005 – 2025 dalam mewujudkan visi Provinsi NTT yakni “**NTT yang maju, mandiri, adil dan Makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**” perlu didukung oleh semua komponen masyarakat: komitmen dari **kepemimpinan** daerah yang demokratis dan kuat; konsistensi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; keberpihakan kepada rakyat dan kelompok marginal; peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif dan bertanggungjawab.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO

LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2005 – 2025**



PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Provinsi Nusa Tenggara Timur memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah dan pedoman sekaligus menjadi Acuan bagi seluruh pengelolaan pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 – 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 099 Seri E Nomor 058);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2005 -2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I tahun 2005-2009, RPJM Nasional II tahun 2010-2014, RPJM Nasional III tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV tahun 2020-2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RPJP Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang mengacu pada RPJP Nasional, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Penjabaran dari RPJP Daerah ini akan ditindaklanjuti dalam RPJM Daerah

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) RPJP Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan program Bupati/Walikota.

- (3) RPJM Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJM Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004-2008 sebagai pengganti RPJM Daerah Tahun I dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

- (2) RPJP Daerah Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

- (3) RPJM Daerah Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah Kabupaten/Kota yang telah disesuaikan dengan RPJM Daerah paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Januari 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JAMIN HABID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 001 SERI E NOMOR 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2005 – 2025

I. PENJELASAN UMUM :

Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 4 Pulau besar yaitu Flores, Sumba, Timor dan Alor yang biasa disebut FLOBAMORA dengan luas daratan 47,349.9 km², luas perairan kurang lebih 200.000 km² terbagi dalam 19 Kabupaten dan 1 Kota, 242 Kecamatan, 299 Kelurahan dan 2.643 Desa, ribuan pulau, yang dihuni oleh beraneka suku, agama dan adat istiadat, namun mempunyai satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional dan

RPJP Daerah yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Daerah hanya memuat arahan secara garis besar.

Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah, Tahun 2004–2008 (telah diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2004-2008) dan untuk Tahun 2009, Gubernur terpilih menggunakan RKPD, RPJM Daerah II Tahun 2009-2013 RPJM Daerah III Tahun 2014–2018 dan RPJM Daerah IV Tahun 2019–2023.

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah sebagaimana tersebut di atas dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya, yaitu pada tahun 2009, 2014, 2019 dan 2024. Namun demikian, Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2009, 2014, 2019 dan 2024 melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud diatas, maka jangka waktu keseluruhan RPJP Daerah adalah 2005-2025.

Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak harus mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah :

- a. sebagai arah dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah, masyarakat dan *stake holder*, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai koridor dalam penyusunan Visi, Misi dan program calon Kepala Daerah dan Pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diwujudkan dalam visi, misi dan arah Pembangunan Daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Daerah Nusa Tenggara Timur serta strategi untuk mencapainya. Visi bermaksud memperdayagunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945. Visi ini sebagaijabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi pembangunan nasional, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi pembangunan Nusa Tenggara Timur, yaitu :

1. mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global;
3. mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
5. mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
6. mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat;
7. mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, Pemerintah Provinsi menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Rancangan RPJP Daerah hasil Musrenbangda dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selanjutnya RPJP Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan RPJM Daerah merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJM Daerah Tahun 2004-2008 sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, beberapa daerah telah menetapkan RPJM Daerah. Peraturan Daerah ini tetap mengakui keberadaan RPJM Daerah tersebut. Namun demikian, Peraturan Daerah ini memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan RPJP Daerah dan RPJM Daerah sesuai dengan RPJP Daerah Nusa Tenggara Timur menurut Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 terdiri dari 5 Bab dan 8 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP Daerah, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJP Daerah yang telah ada dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2005-2025 yang berisi Visi, Misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 0011